

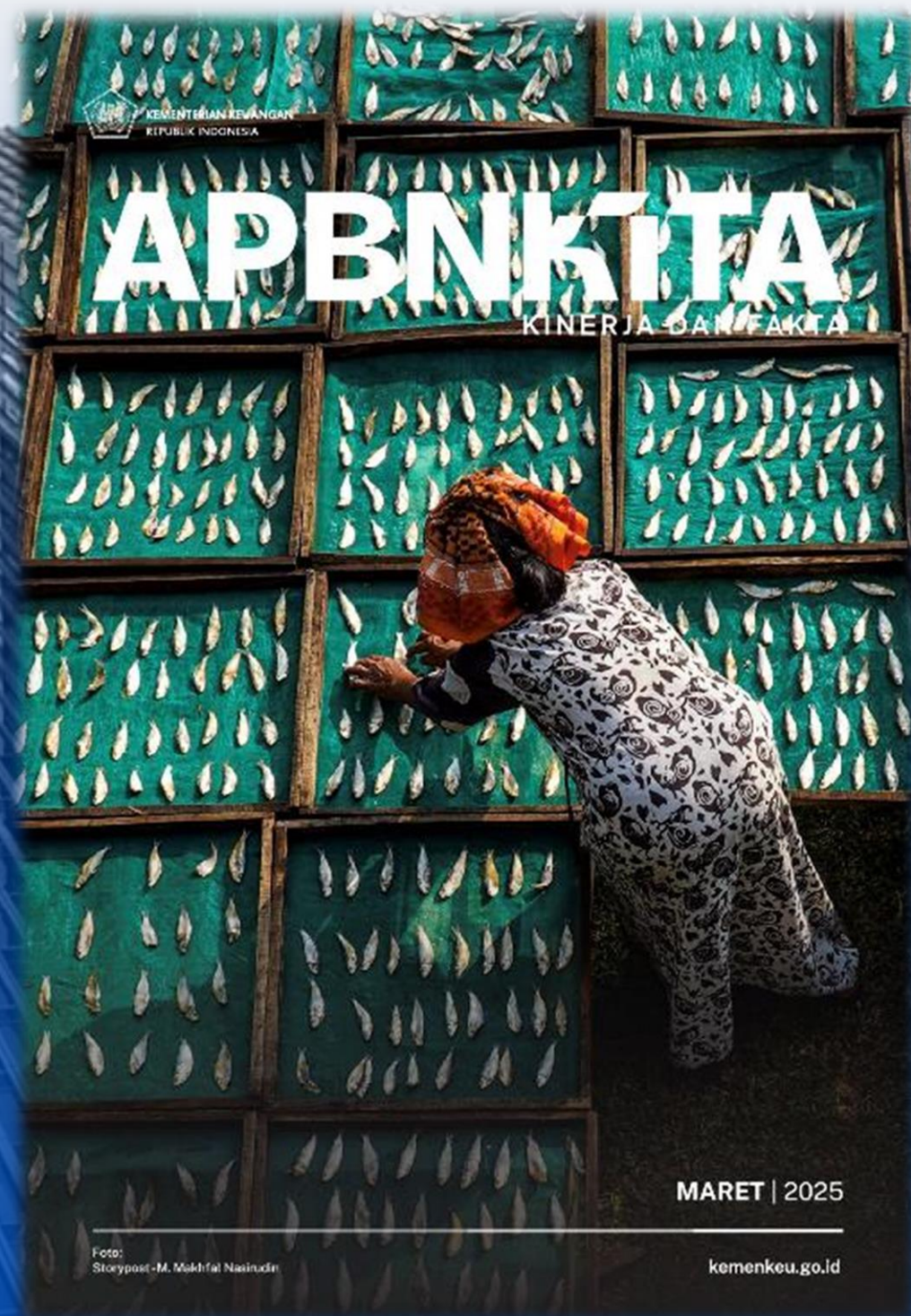


KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Konferensi Pers APBN KiTa

13 Maret 2025

www.kemenkeu.go.id/apbnkita



PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

Inflasi terkendali dan *yield* SBN stabil, di tengah dinamika nilai tukar dan upaya peningkatan *lifting* migas.

INDIKATOR	2024		2025	
	APBN	Realisasi	APBN	Realisasi Februari
Pertumbuhan Ekonomi				
(%, yoy)	5,2	2024: 5,03%	5,2	-
Inflasi				
(%)	2,8	1,57 (yoy)	2,5	-0,09% (yoy) -0,48% (mtom)
Nilai Tukar				
(Rp/US\$)	15.000	16.162 (eop) 15.847 (ytd)	16.000	16.340 (eop)* 16.309 (ytd)*
Yield SBN 10 Tahun				
(%)	6,7	7,0 (eop) 6,8 (ytd)	7,0	6,88% (eop)* 6,98% (ytd)*
Harga minyak mentah Indonesia				
(USD/barel)	82	71,6 (eop) 78,1 (ytd)	82	74,3 (eop) 75,6 (ytd)
Lifting Minyak				
(ribu barel per hari)	635	579,7	605	551,7
Lifting Gas				
(ribu barel setara minyak per hari)	1.033	978,8	1.005	978.0

Keterangan: * Nilai Tukar dan Yield SBN 10 tahun per 10 Maret 2025

Pertumbuhan Ekonomi

Di tengah stagnasi global, ekonomi domestik 2024 tumbuh 5,03% didukung permintaan domestik yang kuat, inflasi yang terkendali, dan penciptaan lapangan kerja baru.

Laju Inflasi

Inflasi masih bergerak rendah dipengaruhi program diskon listrik, namun diperkirakan normalisasi. Harga pangan terus dikendalikan, terutama dalam menghadapi Ramadan dan Lebaran. Berbagai langkah kebijakan penurunan tarif angkutan lebaran, tol menjelang Lebaran diperkirakan berkontribusi besar dalam pengendalian inflasi.

Nilai Rupiah dan Yield SBN

Nilai tukar masih dibayangi volatilitas pasar global. *Yield* SBN stabil dan terjaga pada level yang kompetitif. Potensi risiko dinamika global terhadap pasar keuangan domestik terus diwaspadai dan dimitigasi.

Harga Minyak Mentah Indonesia

Faktor geopolitik masih sangat memengaruhi pergerakan harga minyak ke depan. Harga cenderung menurun dipengaruhi masih lemahnya *demand* dan sentimen kebijakan AS. OPEC+ akan mempertimbangkan kembali pemotongan produksi.

Lifting Migas

Lifting migas dioptimalkan melalui peningkatan investasi dan pengembangan teknologi.



POSTUR APBN 2025 TETAP SESUAI UU APBN No 62 TAHUN 2024

Realisasi s.d. 28 Februari 2025

Uraian (triliun rupiah)	2025		
	APBN	Real s.d. 28 Feb	% thd APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	3.005,1	316,9	10,5
a.l. I. Penerimaan Perpajakan	2.490,9	240,4	9,7
1. Penerimaan Pajak	2.189,3	187,8	8,6
2. Kepabeanan & Cukai	301,6	52,6	17,5
II. PNBP	513,6	76,4	14,9
B. BELANJA NEGARA	3.621,3	348,1	9,6
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.701,4	211,5	7,8
1. Belanja K/L	1.160,1	83,6	7,2
2. Belanja non-K/L	1.541,4	127,9	8,3
II. Transfer Ke Daerah	919,9	136,6	14,9
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(63,3)	48,1	(76,0)
D. SURPLUS/ (DEFISIT)	(616,2)	(31,2)	5,1
% thd PDB	(2,53)	(0,13)	
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	616,2	220,1	35,7

**PENDAPATAN
NEGARA**

Rp316,9 T

**BELANJA
NEGARA**

Rp348,1 T

**DEFISIT
APBN**

**Rp31,2 T
0,13% PDB**

**Surplus
Keseimbangan Primer**

Rp48,1 T



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kondisi Perekonomian

www.kemenkeu.go.id/apbnkita



DUNIA BERUBAH, GEOPOLITIK MENGIKIS MULTILATERALISME, PROTEKSIONISME NAIK, NEGARA MAKIN DOMINAN DALAM EKONOMI & SOSIAL

Institusi multilateral global melemah



**Sistem
multilateral**

**Unilateral dan
intervensi aktif negara**

Kemunduran kerja sama ekonomi

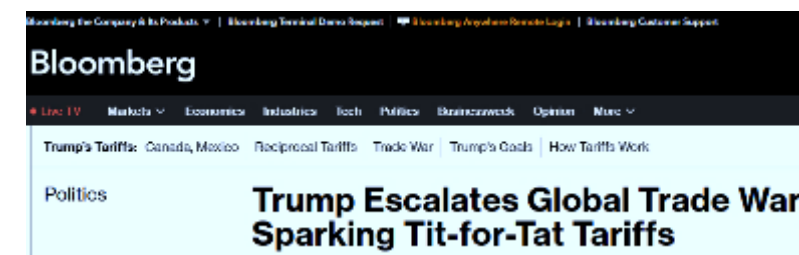
- G7 goyah vs BRICS menguat
- Ketidadaan konsensus dalam kebijakan ekonomi global

Kebijakan *inward looking*

- Geostrategi
- Proteksionisme

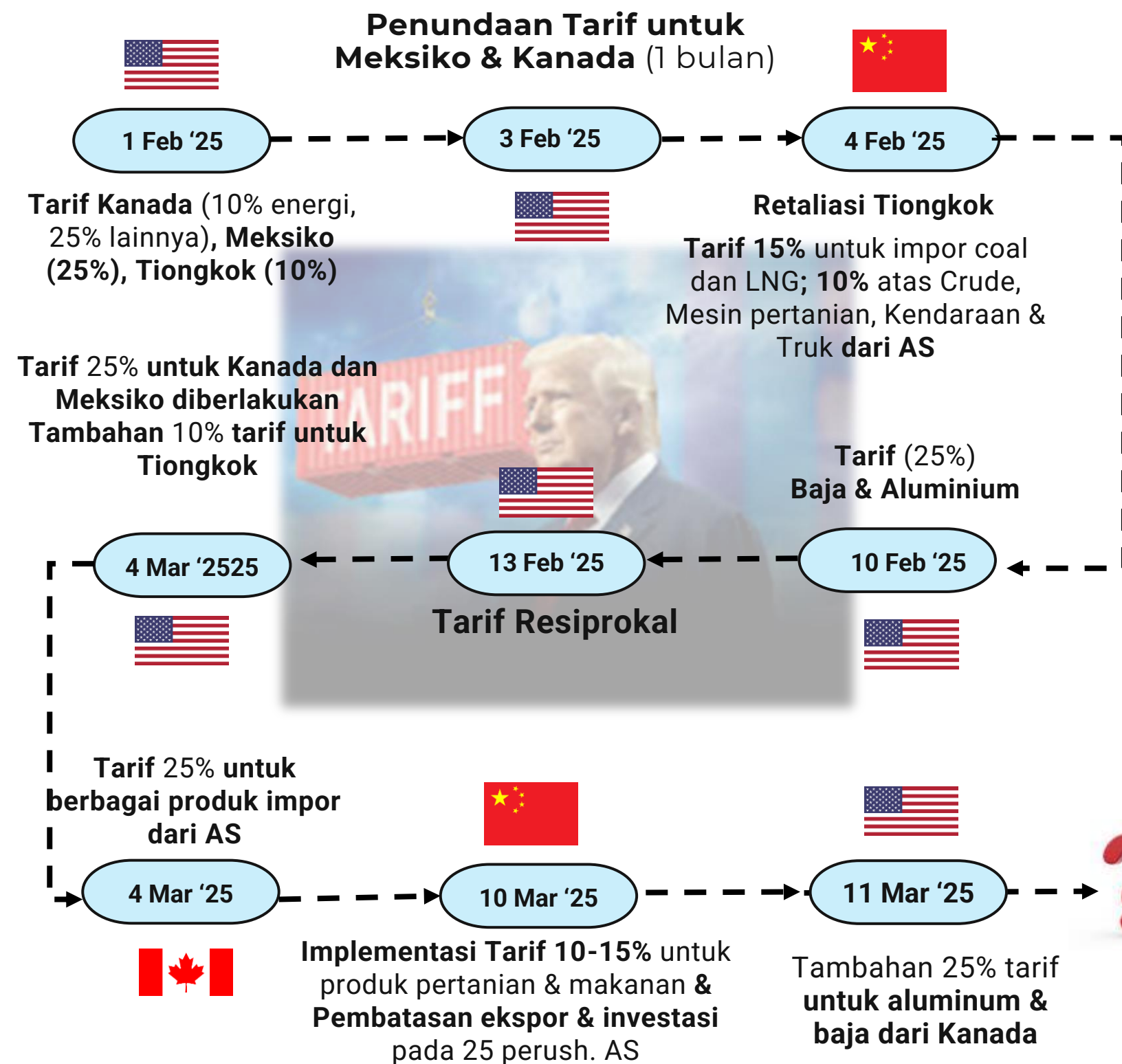
Keruntuhan *rules-based trading system*

- Praktik *friendshoring*, *nearshoring*
- Blok dagang berbasis Kawasan
- Negosiasi bilateral (*bilateral deal-making principle*)
- Aksi unilateral dan retaliasi
- Peningkatan *dispute* di WTO

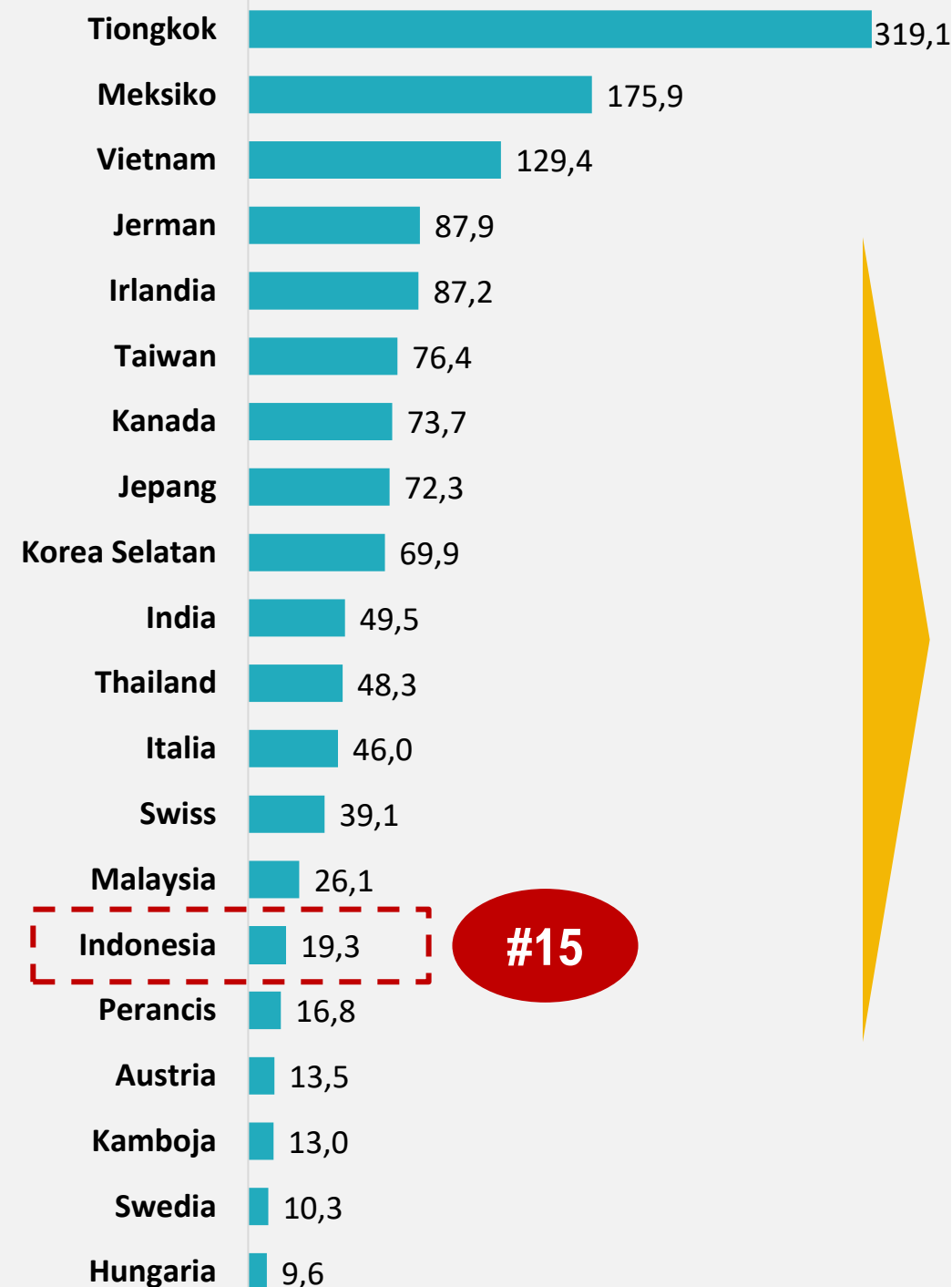


TARIF TRUMP 2.0 PICU PERANG DAGANG INDONESIA HARUS SIAP MITIGASI RISIKO & MANFAATKAN PELUANG

Timeline Kebijakan Tarif Trump 2.0 AS 2025



Top 20 Negara Asal Defisit Perdagangan AS 2024 (miliar USD)



Potensi Dampak Tarif Trump 2.0 bagi Indonesia

Diberlakukan kebijakan tarif kepada negara surplus dagang

Biaya Sektor Manufaktur & Digital lebih tinggi

Disrupsi rantai pasok akibat perang dagang

Volatilitas Harga Komoditas

Volatilitas Pasar Keuangan

Peluang Relokasi dari Rekonfigurasi Rantai Pasok

Peluang Kerja Sama ASEAN & BRICS yang lebih kuat

HARGA KOMODITAS ENERGI RENDAH, PANGAN BERVARIASI, MINERAL LOGAM MELAMBUNG

Penerimaan Migas berisiko tertekan, sementara volatilitas harga pangan & mineral memicu ketidakpastian.

HARGA KOMODITAS ENERGI

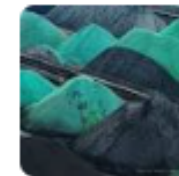
Coal (US\$/Metric Ton)



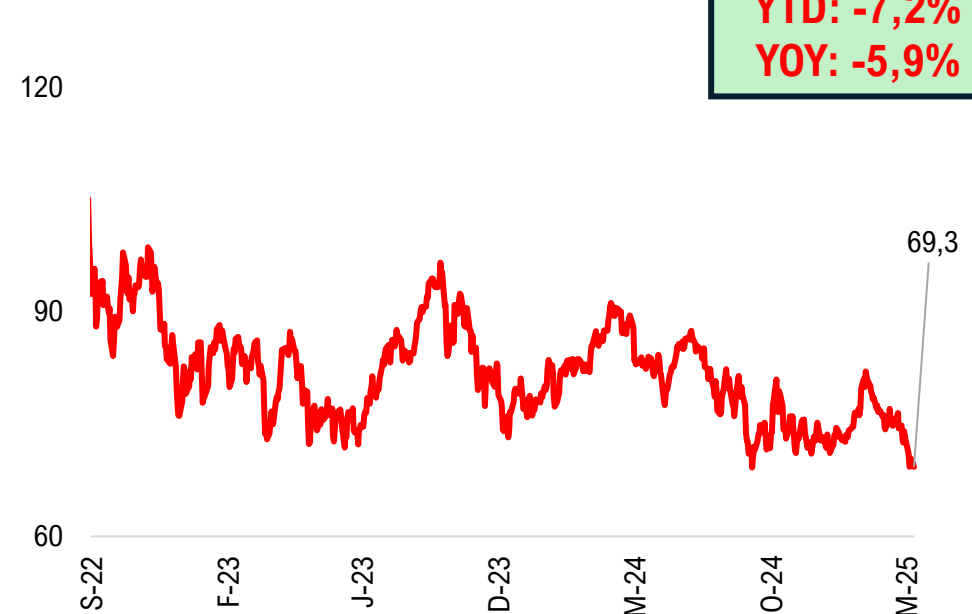
Bloomberg.com

Coal Prices Set for Comeback as Strong Demand Meets Moribund Supply

The world will eventually ditch the dirtiest fossil fuel, but its near-term popularity seems assured.



Brent (US\$/barrel)



HARGA KOMODITAS PANGAN

CPO (US\$/Ton)



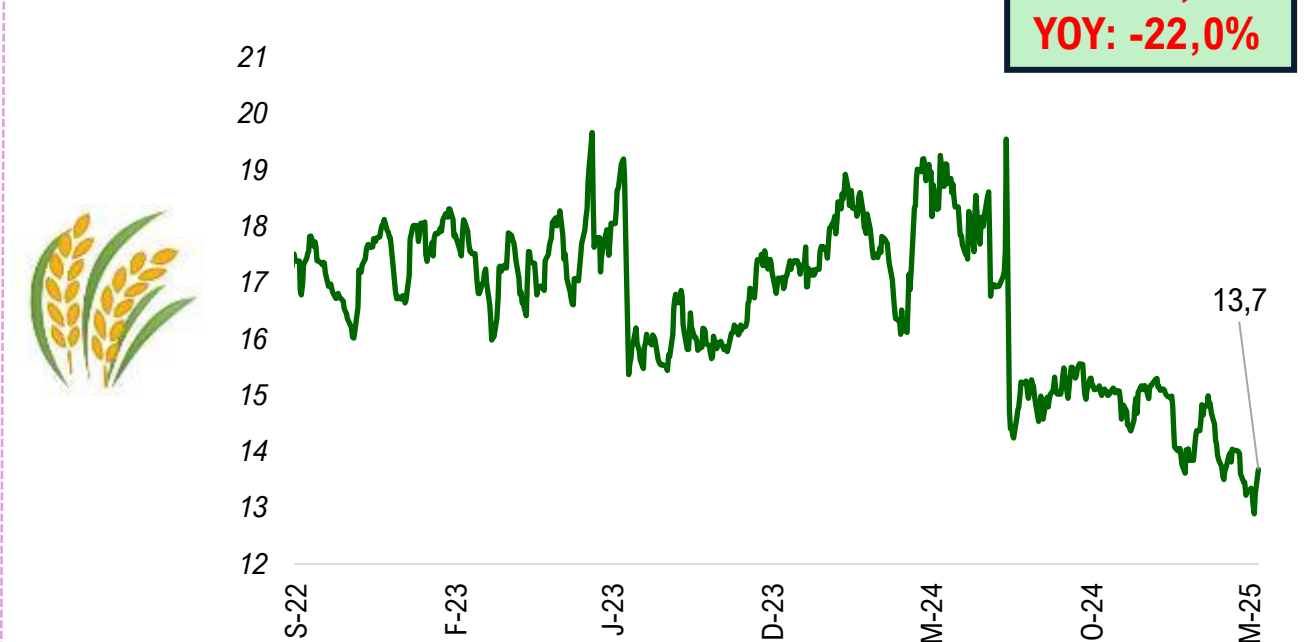
Malay Mail

End of cheap palm oil? Malaysia, Indonesia face supply crunch as biodiesel demand surges

KUALA LUMPUR, March 11 — Prices of cooking oil could be buoyed up for years by stagnating production and a biodiesel push in top producer Indonesia that are...



Rice (US\$/cwt)



HARGA KOMODITAS MINERAL LOGAM

Copper (US\$/MT)



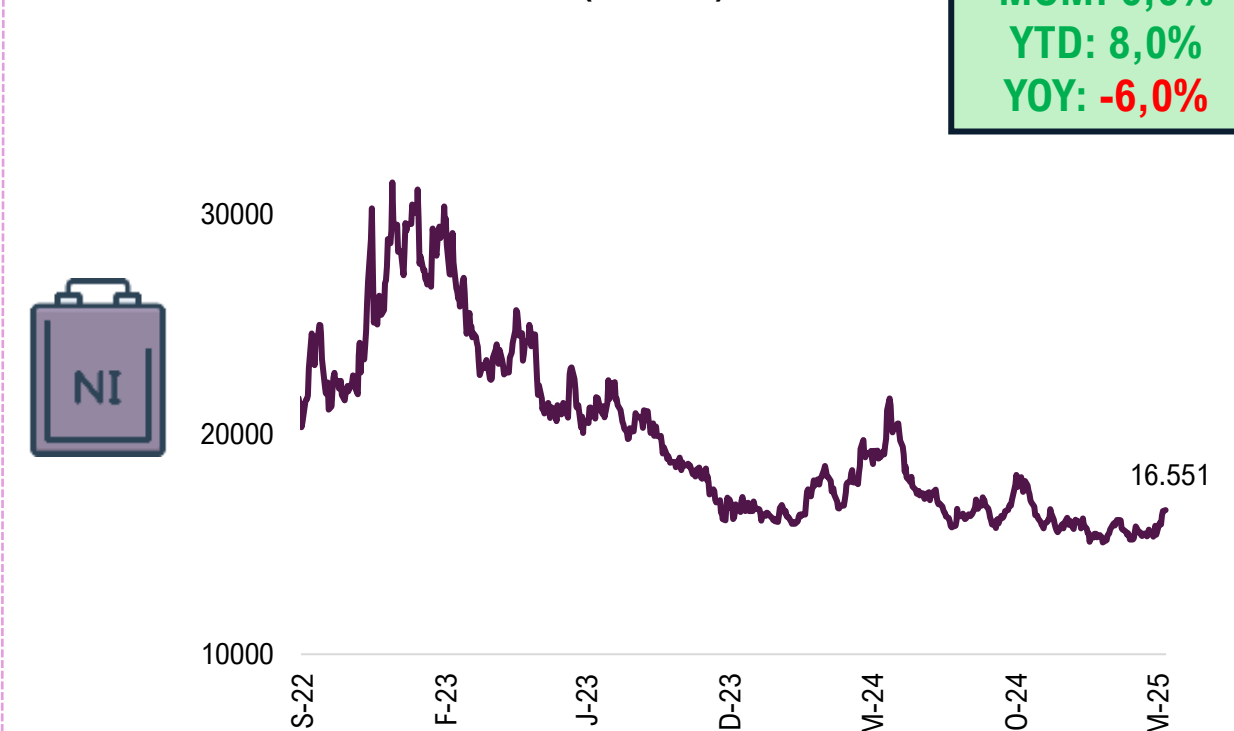
Reuters

US tariff threat brings boom time for physical copper traders

While financial markets gyrate to the uncertain beat of U.S. President Donald Trump's unpredictable tariffs, physical copper traders are reaping the rewards...



Nickel (US\$/MT)



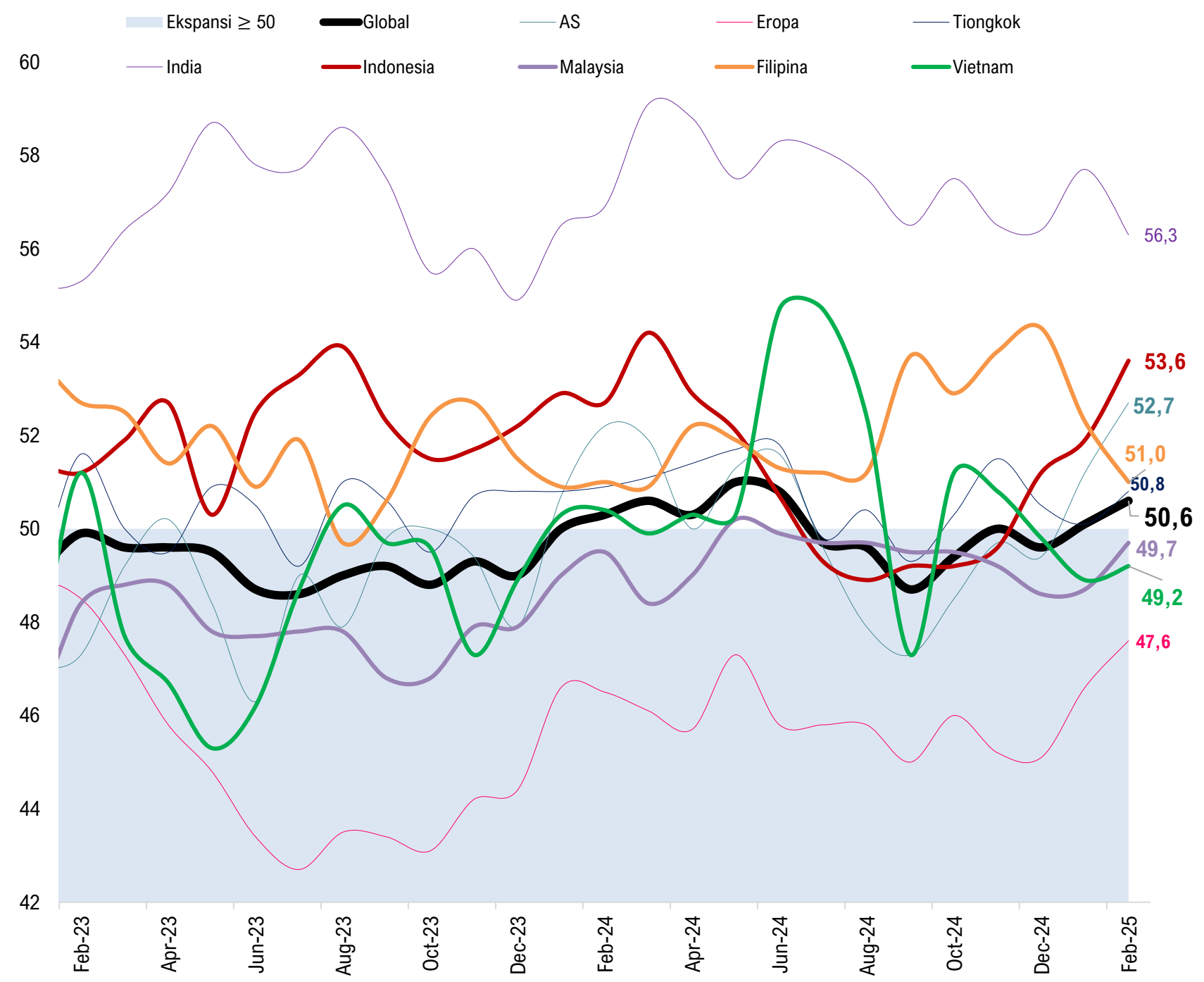
Sumber: Bloomberg, data penutupan 10 Maret 2025; nilai YOY menggunakan rata-rata harga sejak awal tahun hingga tanggal penutupan data

AKTIVITAS MANUFAKTUR GLOBAL FEBRUARI 2025 MELANJUTKAN PENGUATAN

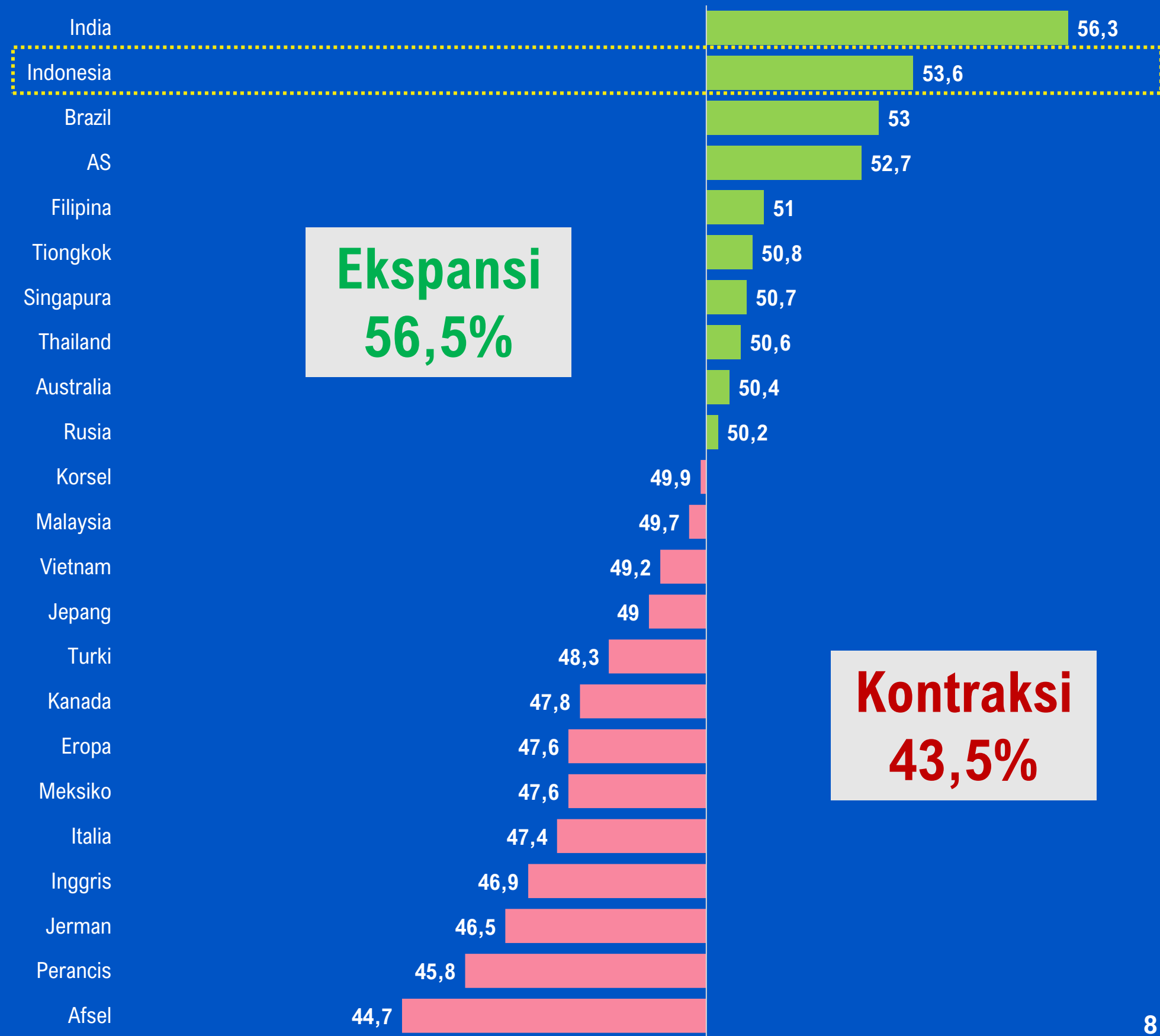
India, Indonesia, Brazil, dan AS menjadi negara G20 dengan kinerja manufaktur terkuat.

PMI Manufaktur Indonesia lebih cepat *rebound* dibanding negara *peers*

PMI Manufaktur Beberapa Negara G20 & ASEAN



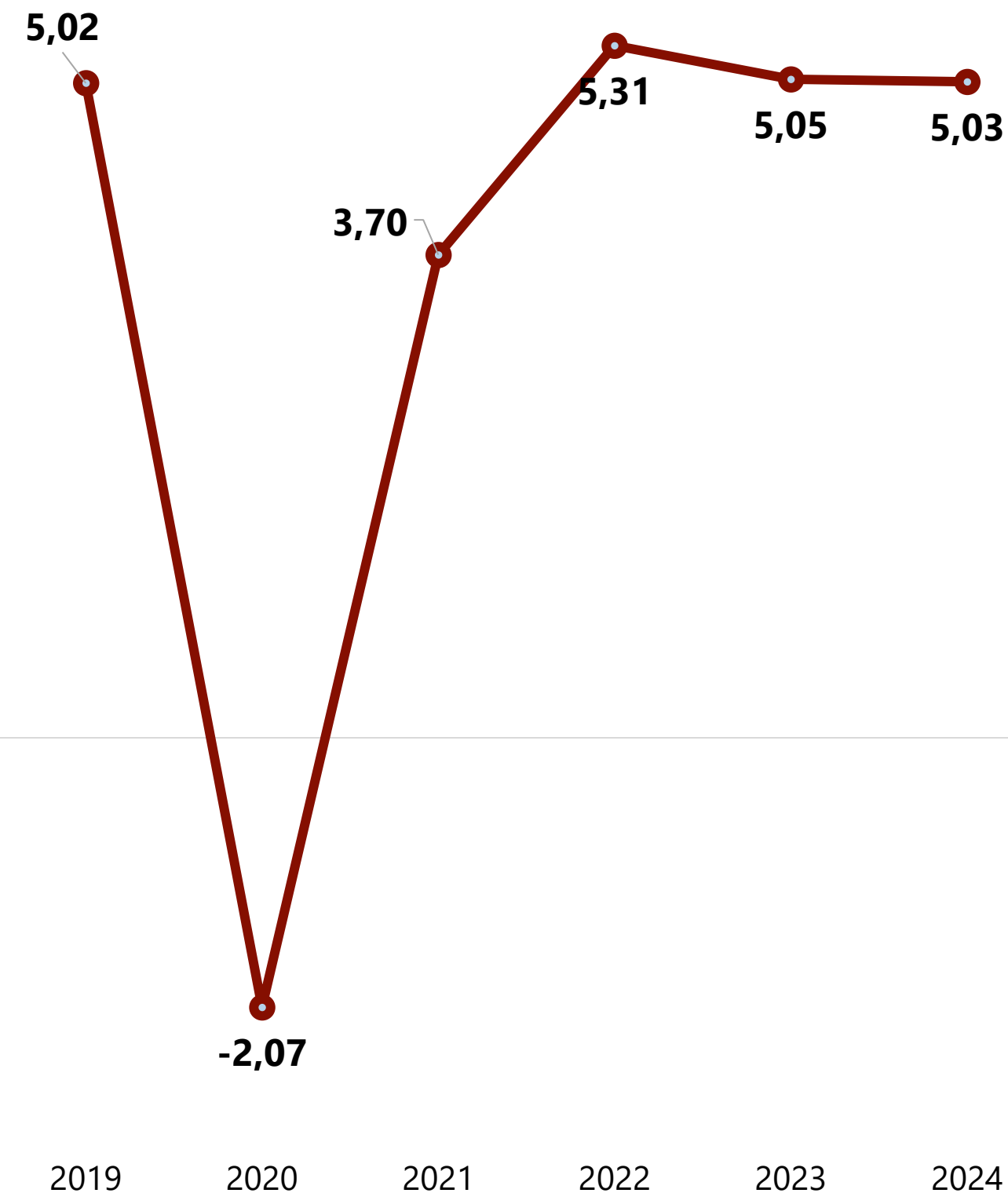
Distribusi PMI Manufaktur bulan Februari 2025 negara G20 dan ASEAN-6
(minus SAU, ARG)



KINERJA EKONOMI RESILIEN DI TENGAH TEKANAN GLOBAL

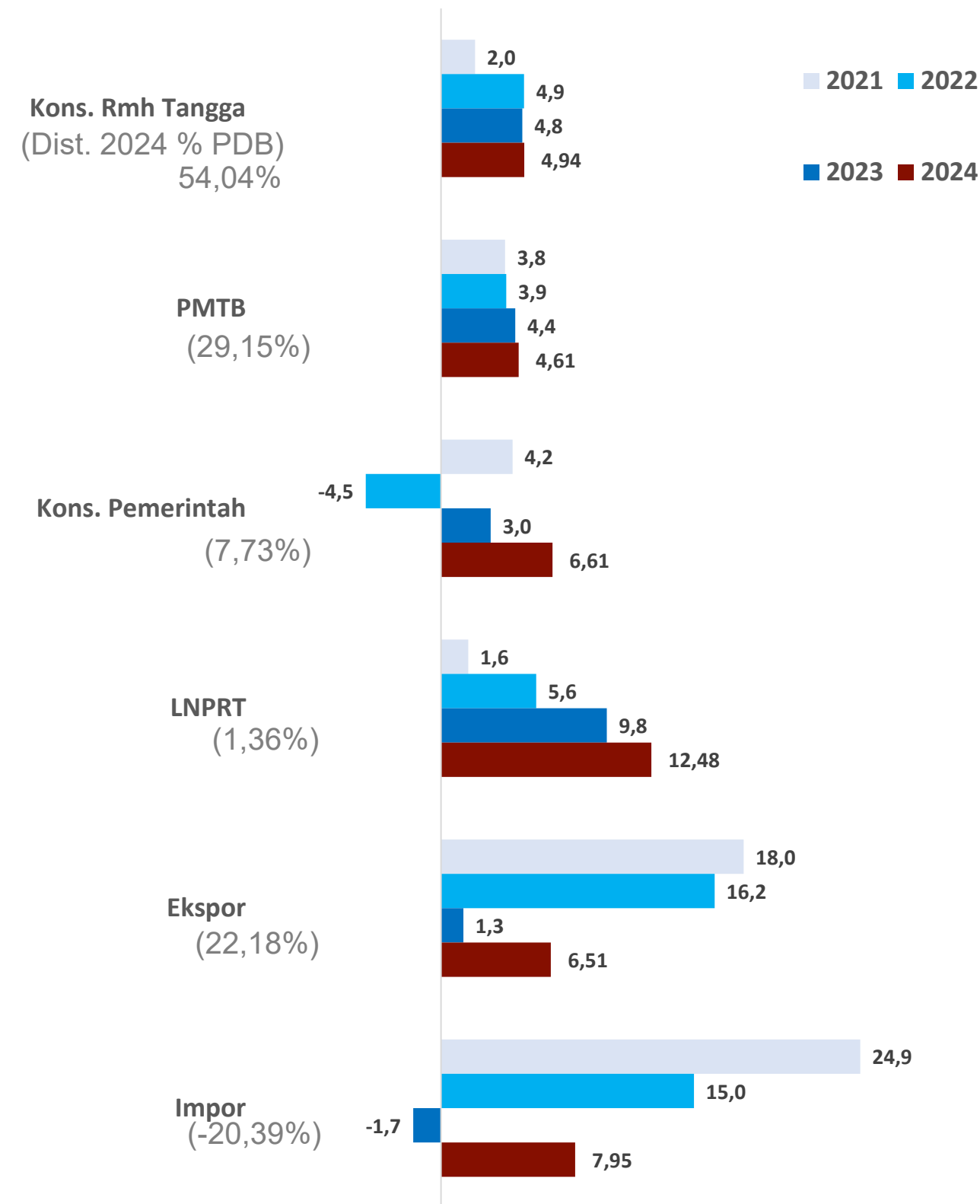
Konsumsi rumah tangga sebagai komponen terbesar tumbuh mendekati 5%, sektor manufaktur dan perdagangan sebagai kontributor utama menunjukkan kinerja yang baik.

Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)

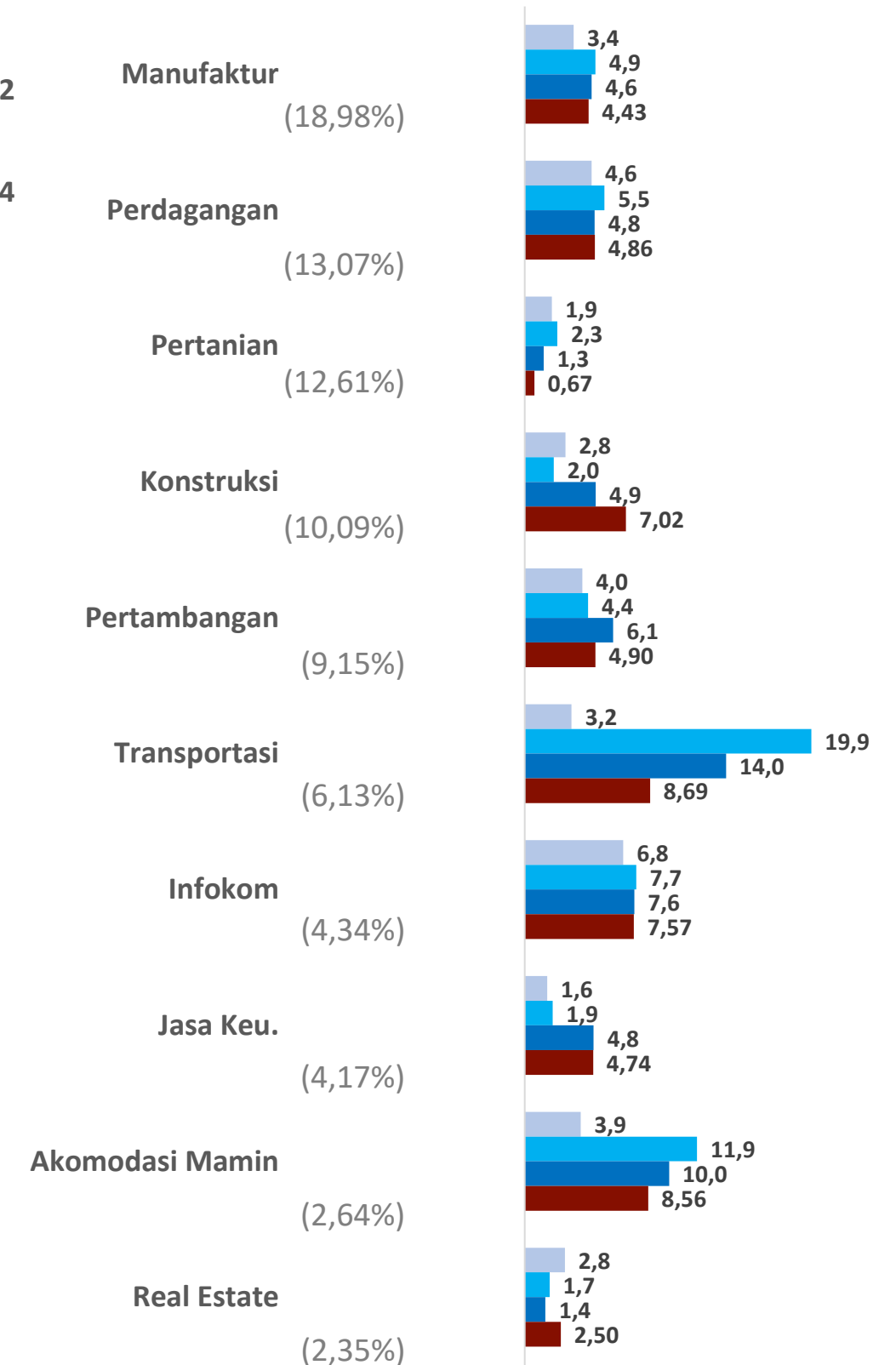


Sumber: BPS

Pert. Komponen Pengeluaran (%yoy)



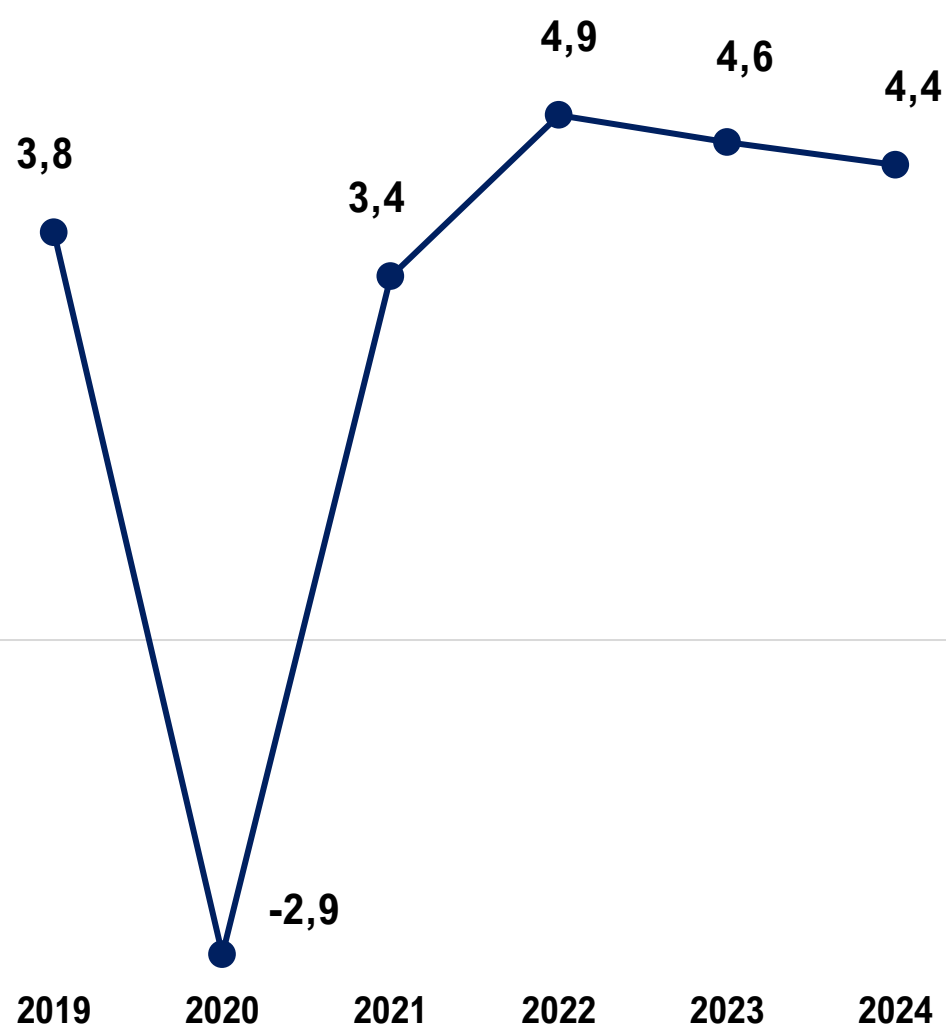
Pert. Komponen Produksi (%yoy)



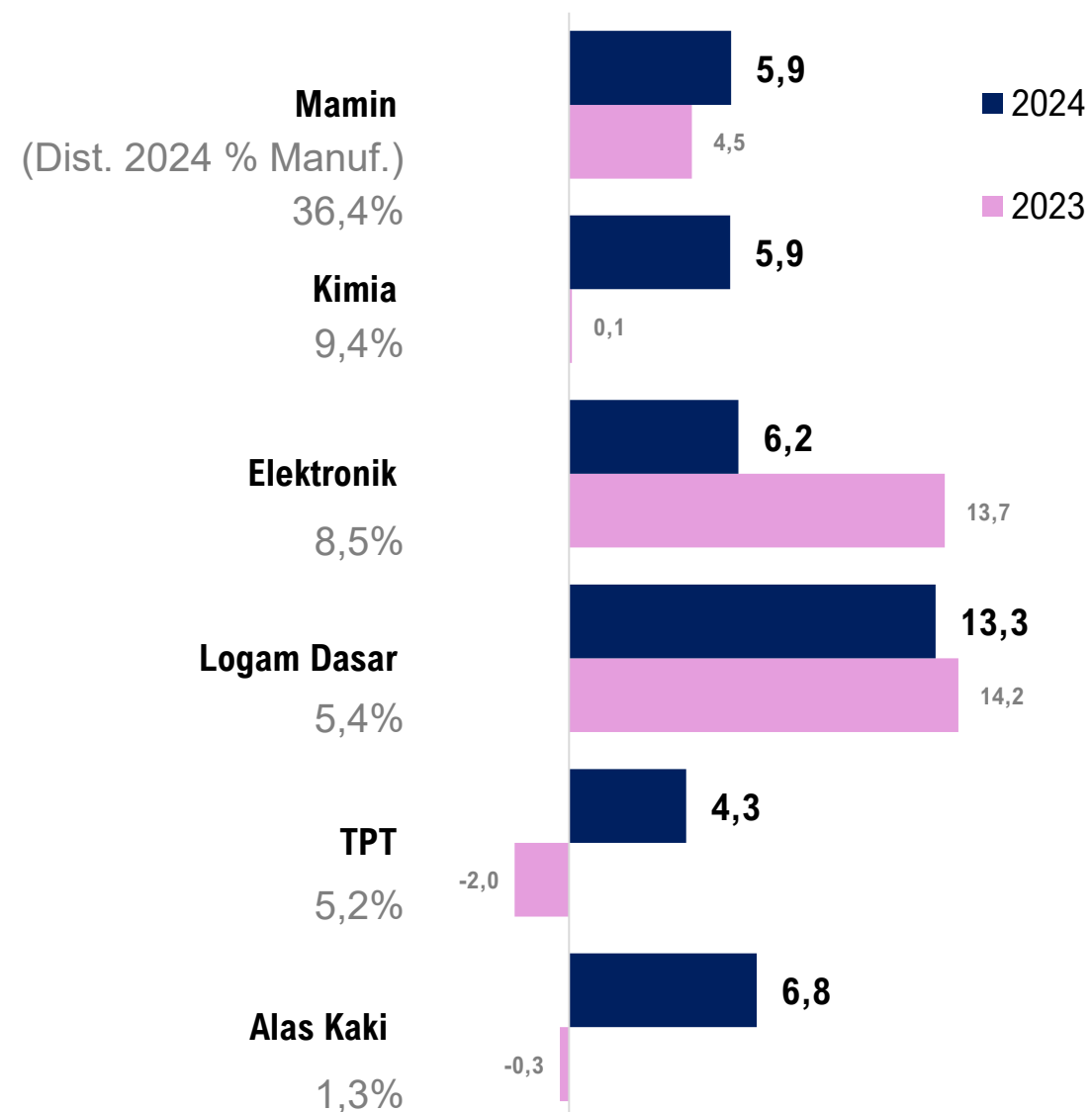
INDUSTRI BERBASIS HILIRISASI MENDORONG KINERJA SEKTOR MANUFAKTUR

Dorongan tersebut berasal dari industri Mamin (5,9% yoy), Logam Dasar (13,3% yoy), dan Elektronika (6,2% yoy).

Pert. Sektor Manufaktur (% yoy)



Pert. Kontributor Utama Manufaktur (% yoy)



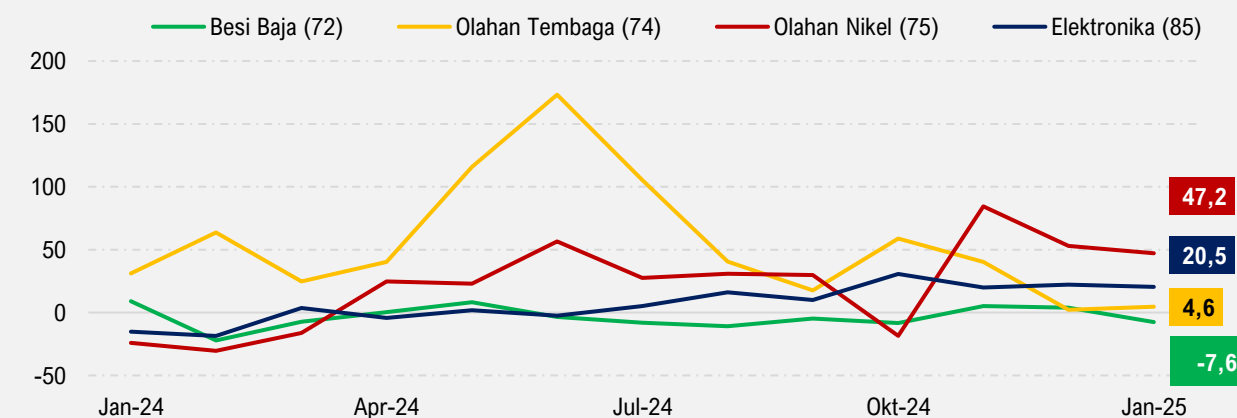
PMI Manufaktur Ekspansif Februari 2025 : 53,6

(Sumber : IHS Markit)

Komponen)	Indeks	Komponen)	Indeks
Output	54,4	Tenaga Kerja	53,0
Total Permintaan	54,8	Stok Barang Jadi	51,7
Ekspor	49,4	Stok Input Produksi	54,1

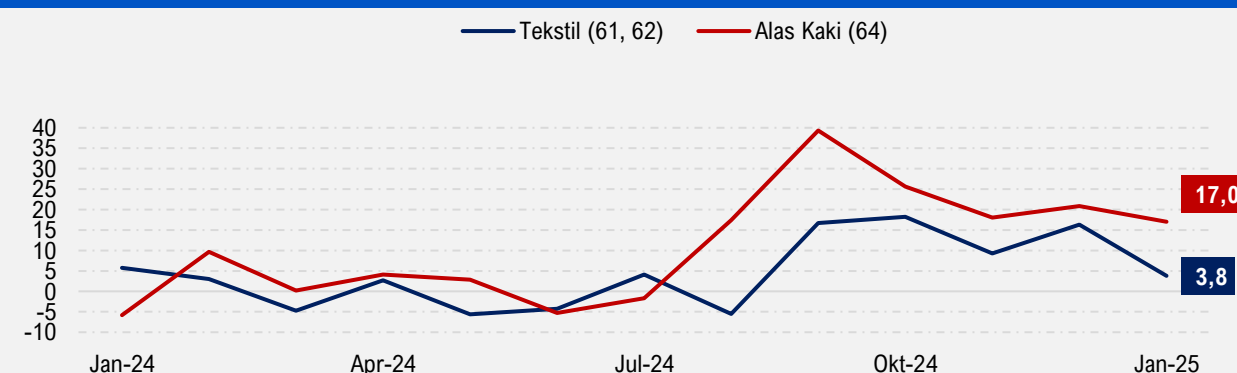
Ekspor Ind. Logam Dasar & Elektronika Terjaga pada Jan. 2025

(Sumber : CEIC, BPS)



Ekspor Tekstil & Alas Kaki Tumbuh pada Januari 2025

(Sumber : CEIC, BPS)

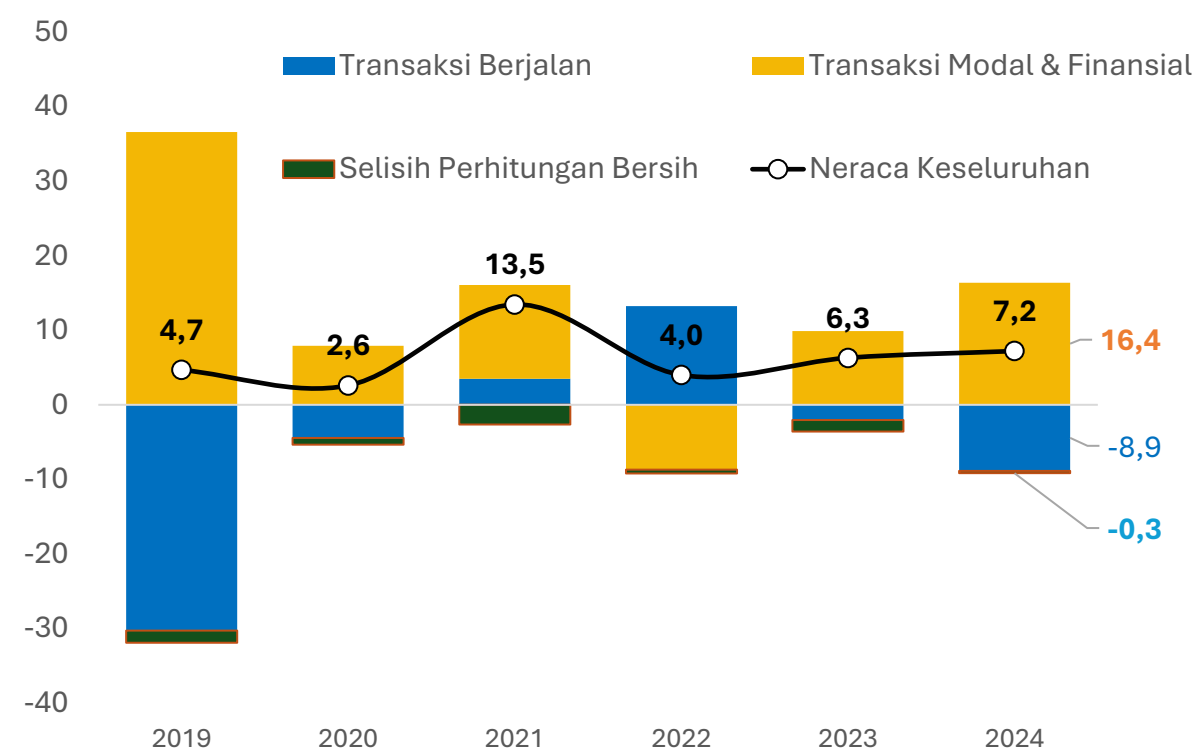


- **Ind. Makanan & Minuman** tumbuh 5,9% (Q4: 6,4%) didorong permintaan domestik, sementara **Logam Dasar** dan **Elektronika** tumbuh masing-masing 13,3% (Q4: 7,4%) dan 6,2% (Q4: 10,3%) ditopang ekspor hilirisasi serta permintaan luar negeri.
- Penguatan industri kunci penting untuk dorong manufaktur. Pada 2024, **ind. kimia** tumbuh 5,9% (Q4: 4,5%). Sedangkan **Ind. TPT** dan **Alas Kaki** mulai pulih, yaitu masing-masing tumbuh 4,3% (Q4: 7,2%) dan 6,8% (Q4: 9,2%), didorong permintaan domestik dan ekspor. Sampai dengan Januari 2025 ekspor alas kaki tumbuh 17,0% (yoy).

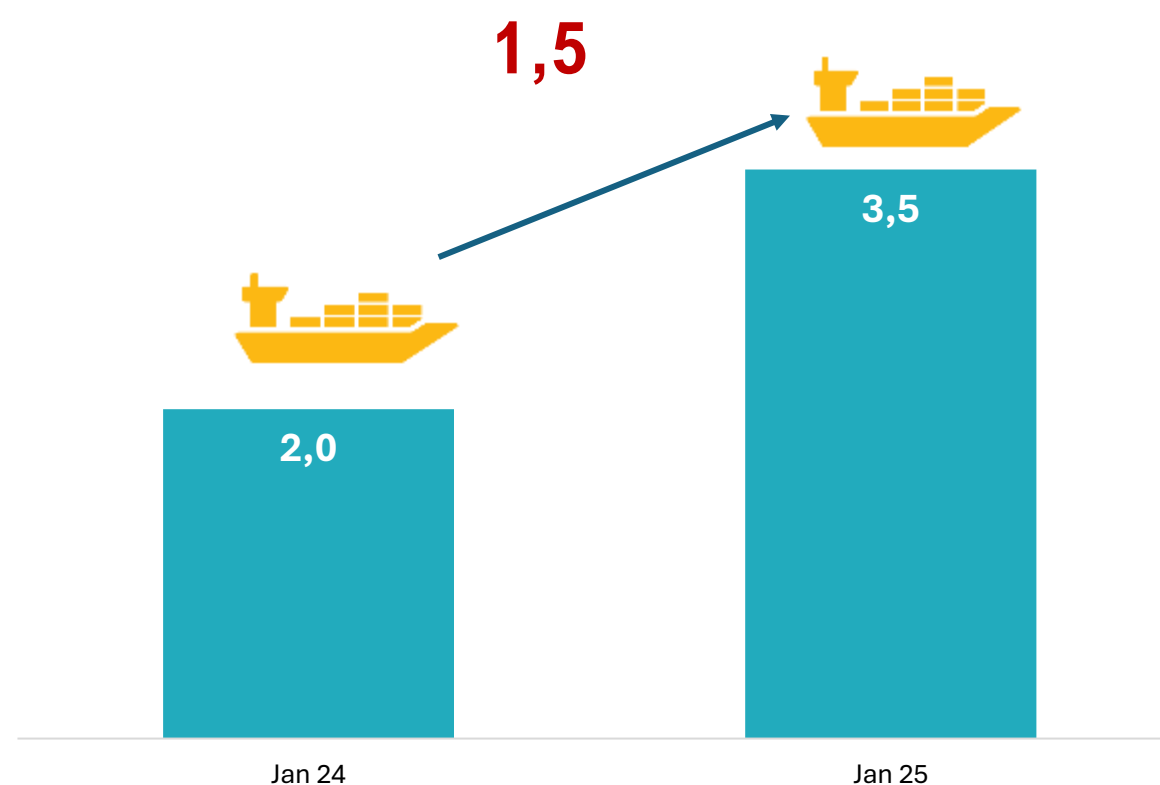
NERACA PEMBAYARAN 2024 DITUTUP SURPLUS \$7,2 MILIAR

Berlanjutnya surplus neraca perdagangan menunjukkan kinerja eksternal yang solid, dengan momentum hingga 2025.

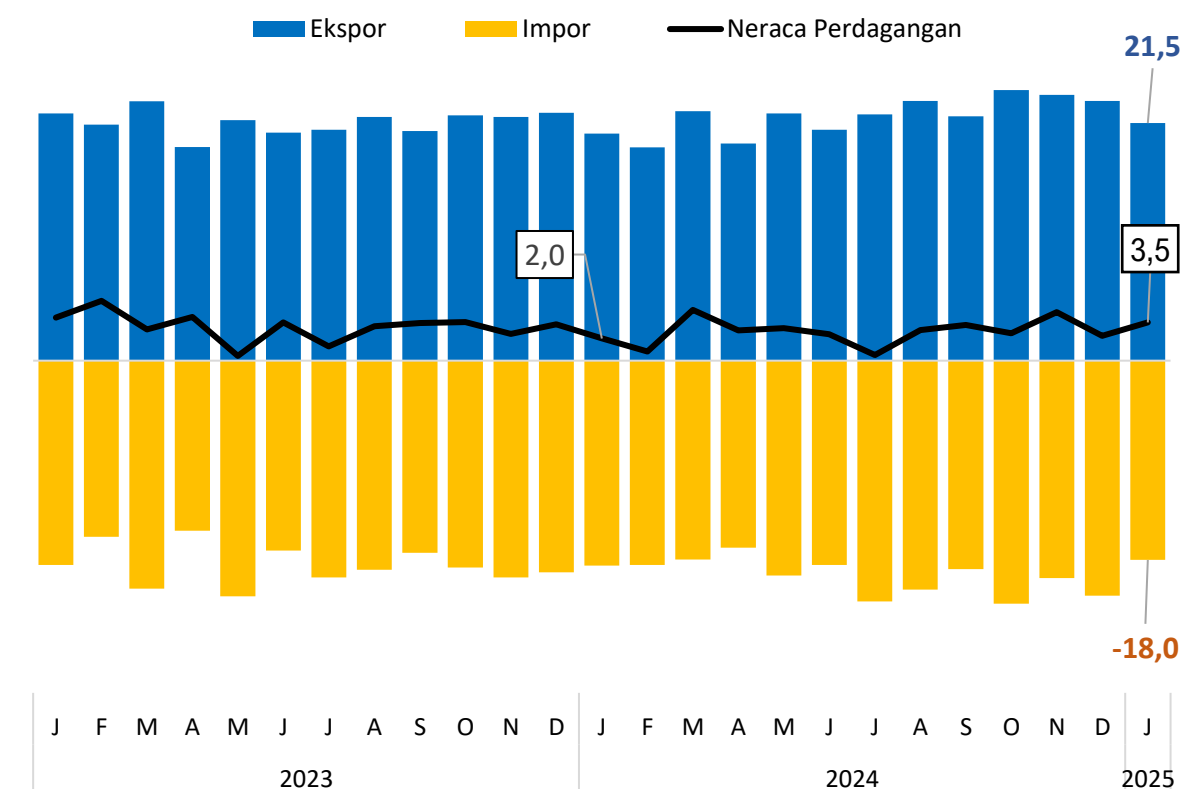
Neraca Pembayaran 2019 - 2024
(USD miliar)



Neraca Perdagangan Januari 2025
(USD Miliar)



Perkembangan Neraca Perdagangan Indonesia
(USD Miliar)



Surplus neraca pembayaran tahun 2024 **meningkat ke level USD7,2 miliar** (2023: USD6,3 miliar).

Kontribusi utama berasal dari peningkatan **surplus neraca transaksi modal dan finansial** (aliran modal di SBN, saham, dan SRBI 2024 **surplus Rp216 T**).

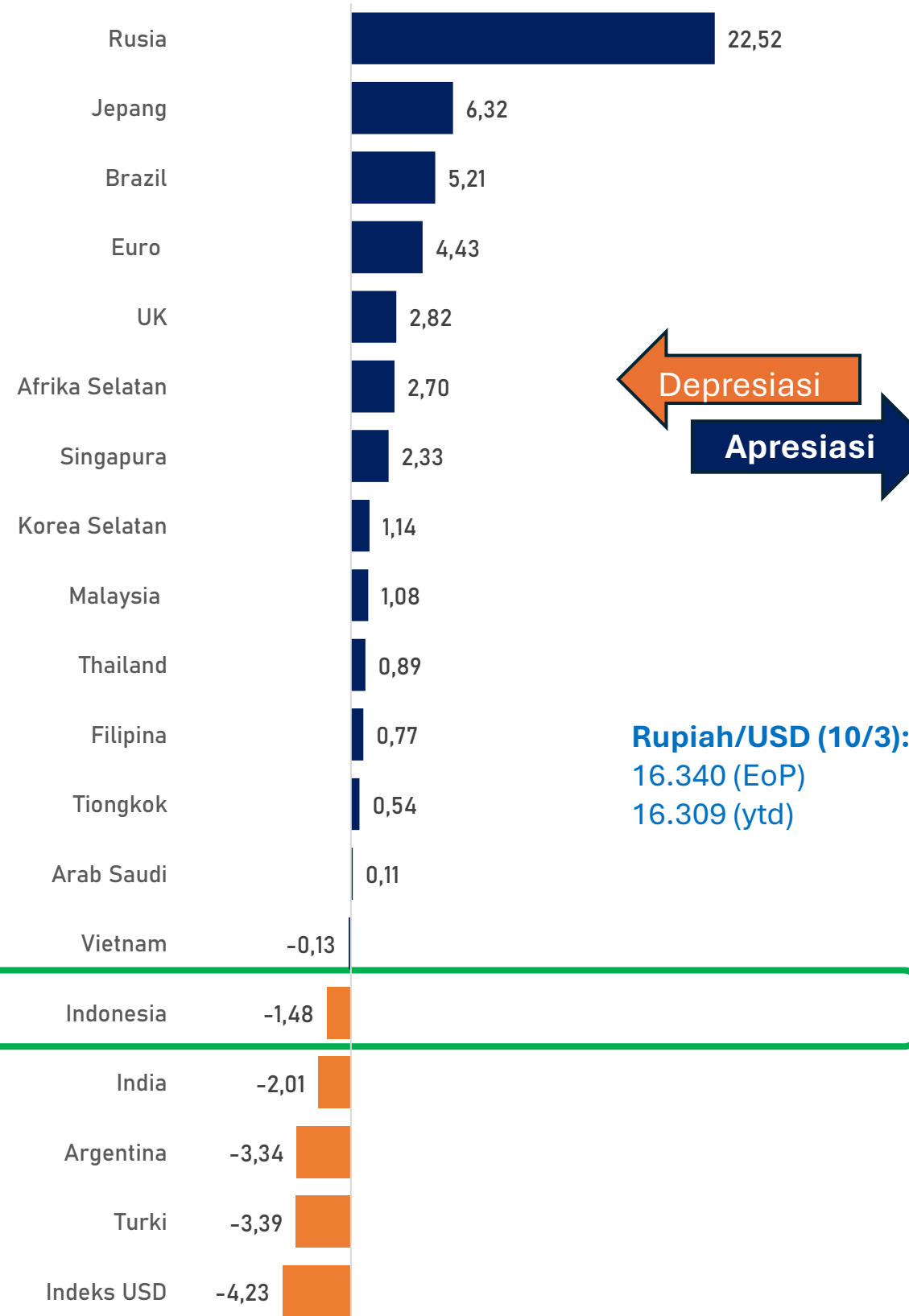
Januari 2025: surplus neraca perdagangan **meningkat USD1,5 miliar** dibandingkan Januari 2024:

- Manufaktur yang ekspansif;
- Hilirisasi yang berlanjut.

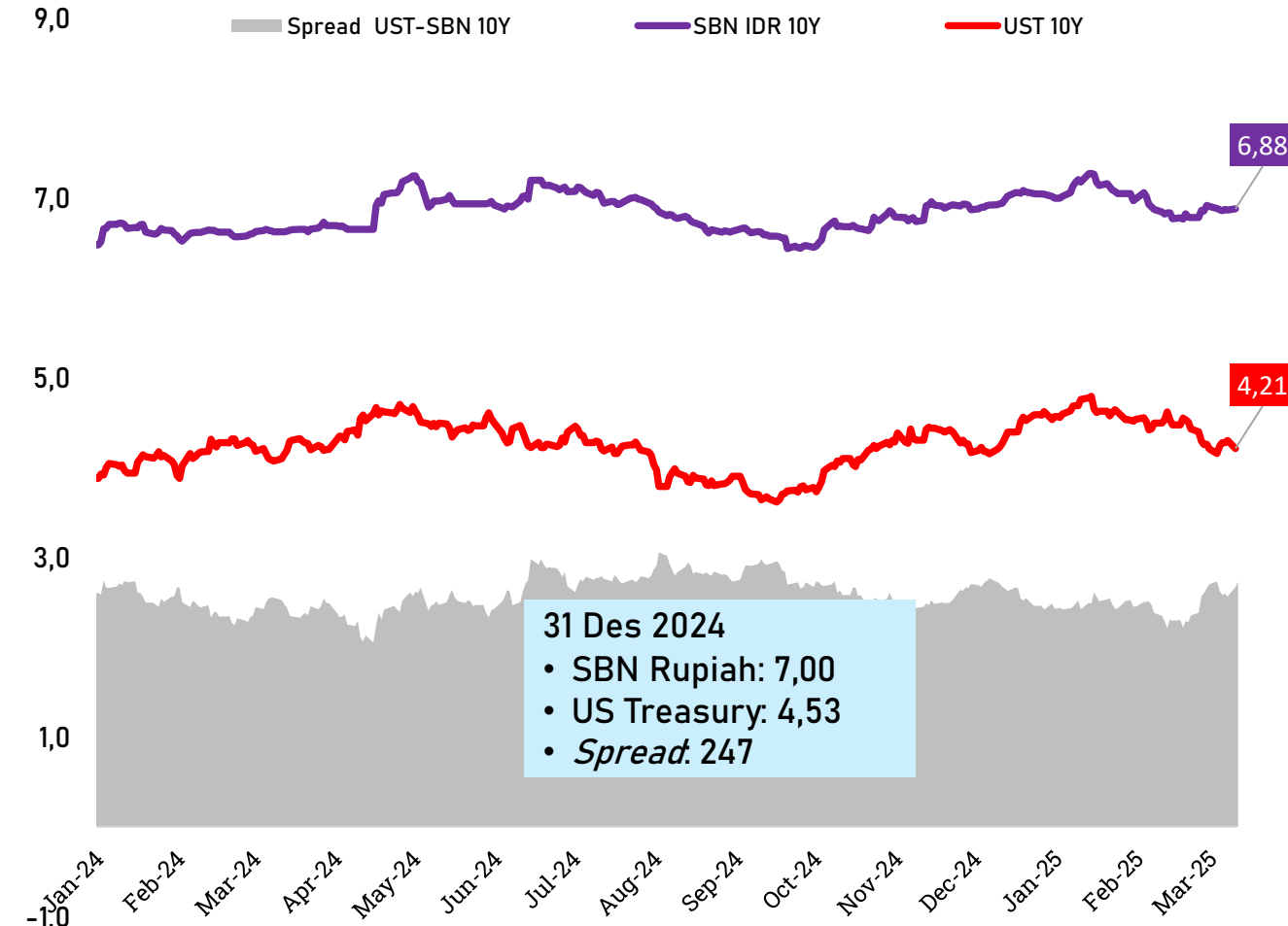
INSTRUMEN SBN RESILIEN DI TENGAH TEKANAN PASAR KEUANGAN GLOBAL

Penguatan Dolar AS & *Yield* UST memicu tekanan di sebagian besar *Emerging Market*.

Nilai Tukar (% ytd)



Yield SBN 10Y LCY & USD (%)

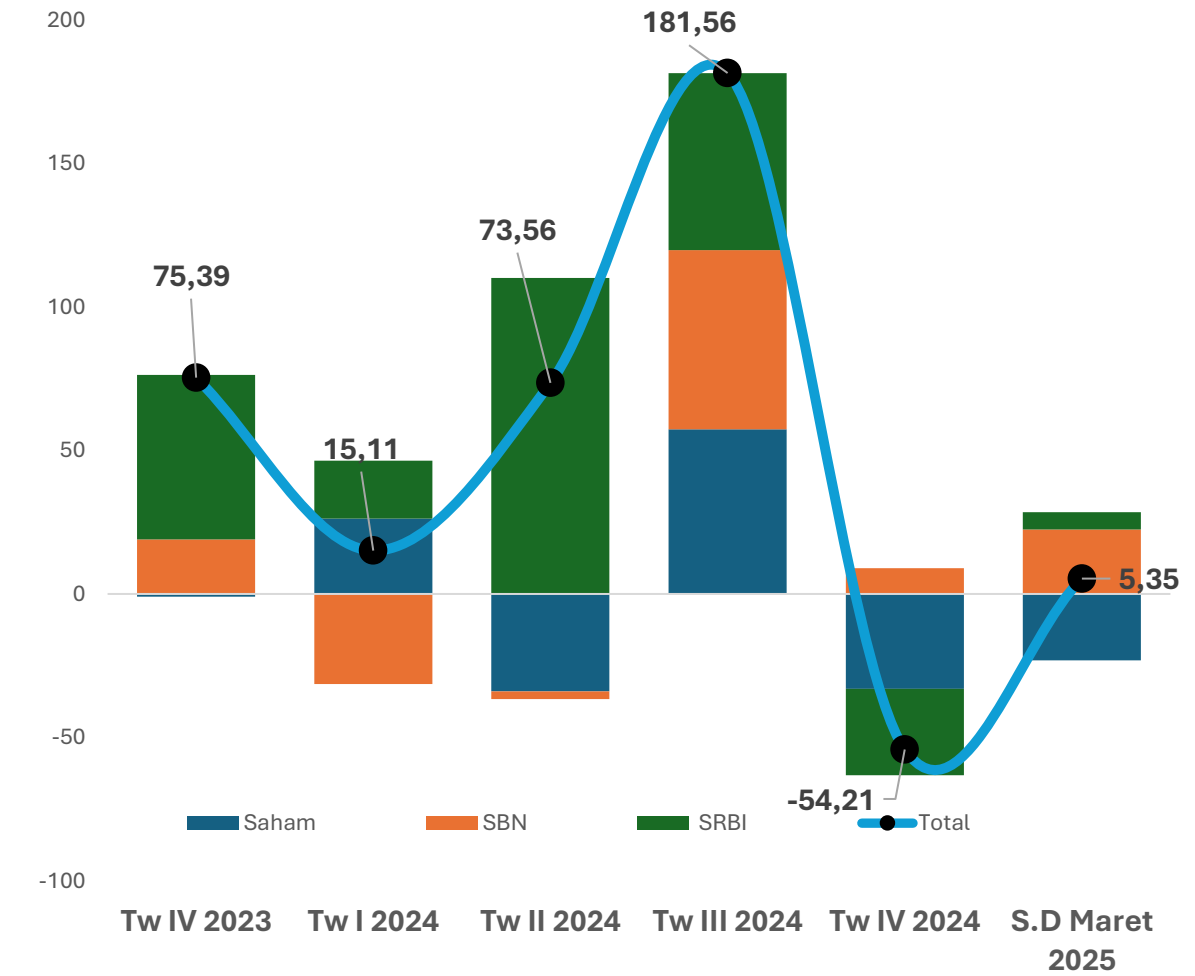


Sumber: Kemenkeu, Bloomberg, CEIC diolah (per 10 Mar 2025)

31 Des 2024
Yield 7,0%
Spread: 247 bps

10 Mar 2025
6,9%
267 bps

Capital Flow Indonesia (akumulasi triwulanan, Rp T)



Sumber: Bloomberg dan BI diolah (per 10 Maret 2025, SRBI per 6 Maret 2025)

Akumulasi 2024: **Inflow**
Rp213,1 T

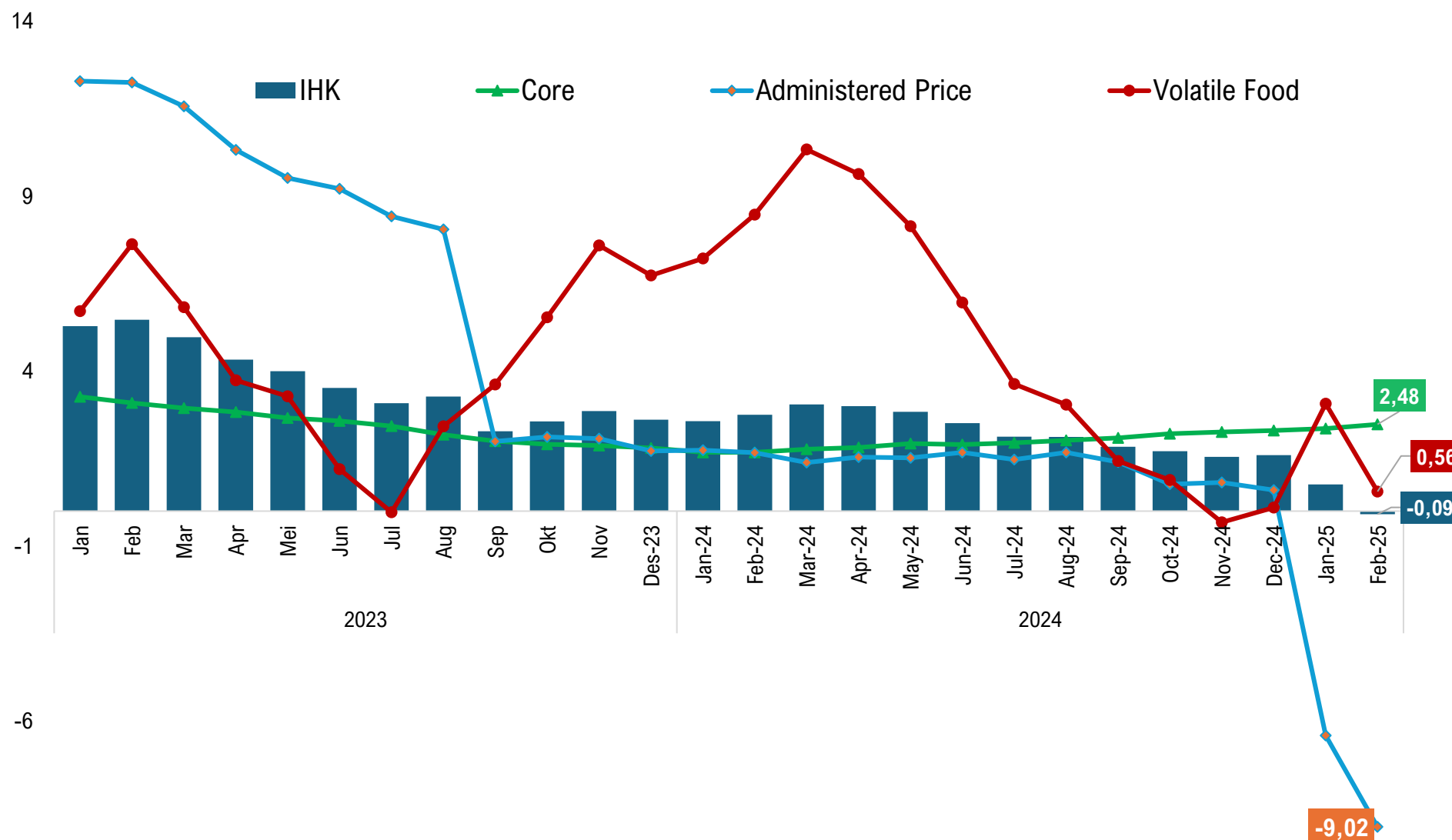
- SBN inflow Rp34,6 T
- SRBI inflow Rp162 T
- Saham inflow Rp16,5 T

Akumulasi Jan-Mar 2025:
Inflow Rp5,35 T

- SBN inflow Rp22,43 T
- SRBI inflow Rp6,11 T
- Saham outflow Rp23,19 T

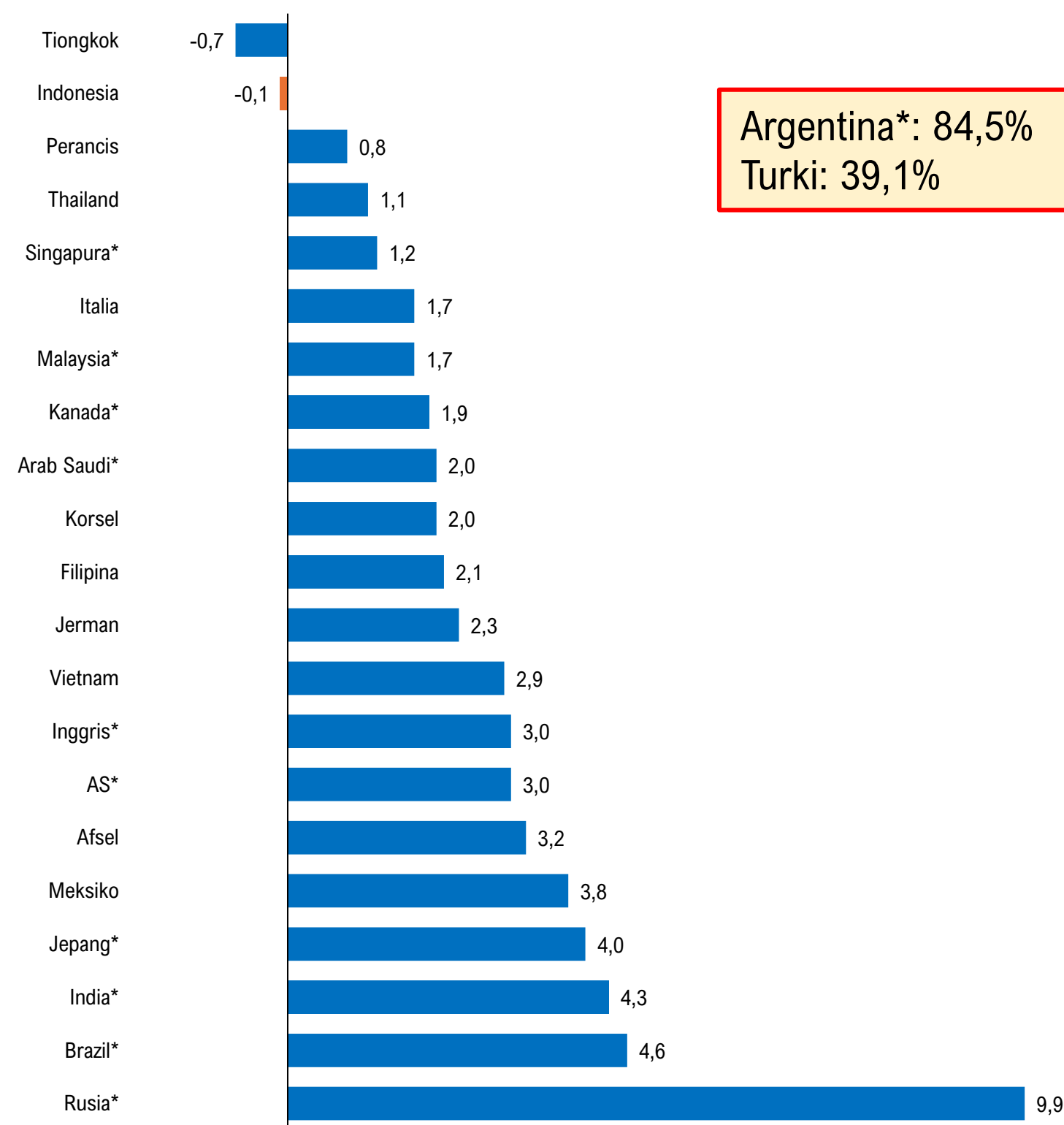
INFLASI TERKENDALI, DISKON LISTRIK DAN HARGA PANGAN RENDAH MENDUKUNG DAYA BELI SELAMA RAMADHAN DAN IDUL FITRI

Perkembangan Inflasi (% yoy)



- Inflasi inti 2.48% kembali tumbuh positif sejak Maret 2024.
- Deflasi *Administered Price* dipengaruhi oleh dampak temporer program diskon listrik.
- Inflasi *volatile food* yang rendah dipengaruhi penurunan pada harga pangan akibat mulai masuknya musim panen.

Inflasi Februari 2025 Negara *Peers* (% yoy)



Argentina*: 84,5%
Turki: 39,1%

*Inflasi Januari 2025

Sumber: BPS, Bloomberg

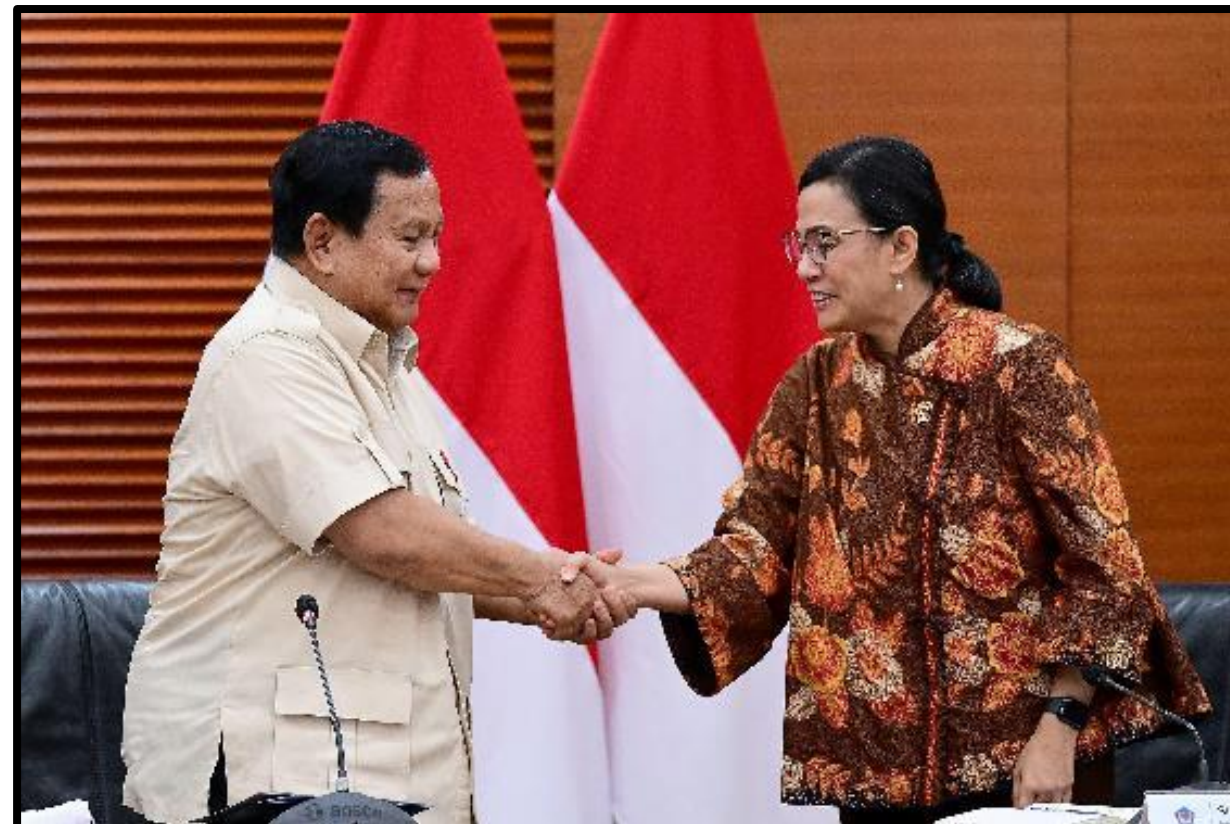


KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Belanja Negara

www.kemenkeu.go.id/apbnkita





Efisiensi Pemerintahan Efisiensi Anggaran

- Anggaran harus digunakan secara efisien, **sehingga dapat digunakan untuk belanja yang betul-betul prioritas.**
- **Efisiensi Anggaran** dicapai dengan “menyisir” berbagai belanja seperti perjalanan dinas, ATK, seminar, kajian, acara seremonial & peringatan, dll.
- Dilaksanakan untuk seluruh K/L (99 Bagian Anggaran / BA).
- Pencadangan TKD dan Efisiensi APBD untuk prioritas nasional.

EFISIENSI
BELANJA K/L

Rp256,1 T

Efisiensi Anggaran tidak
menyentuh:

(a) belanja pegawai,

**(b) layanan pegawai (operasional
dasar prioritas), dan**

(c) layanan publik/bantuan sosial

EFISIENSI TKD

Rp50,6 T

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Realisasi s.d. 28 Februari 2025 mencapai **Rp211,5 T atau 7,8% APBN**
(Tahun 2024 : 9,7% APBN karena adanya pelaksanaan Pemilu dan bantuan pangan)



Belanja K/L Rp83,6 T (7,2% dari Pagu APBN)

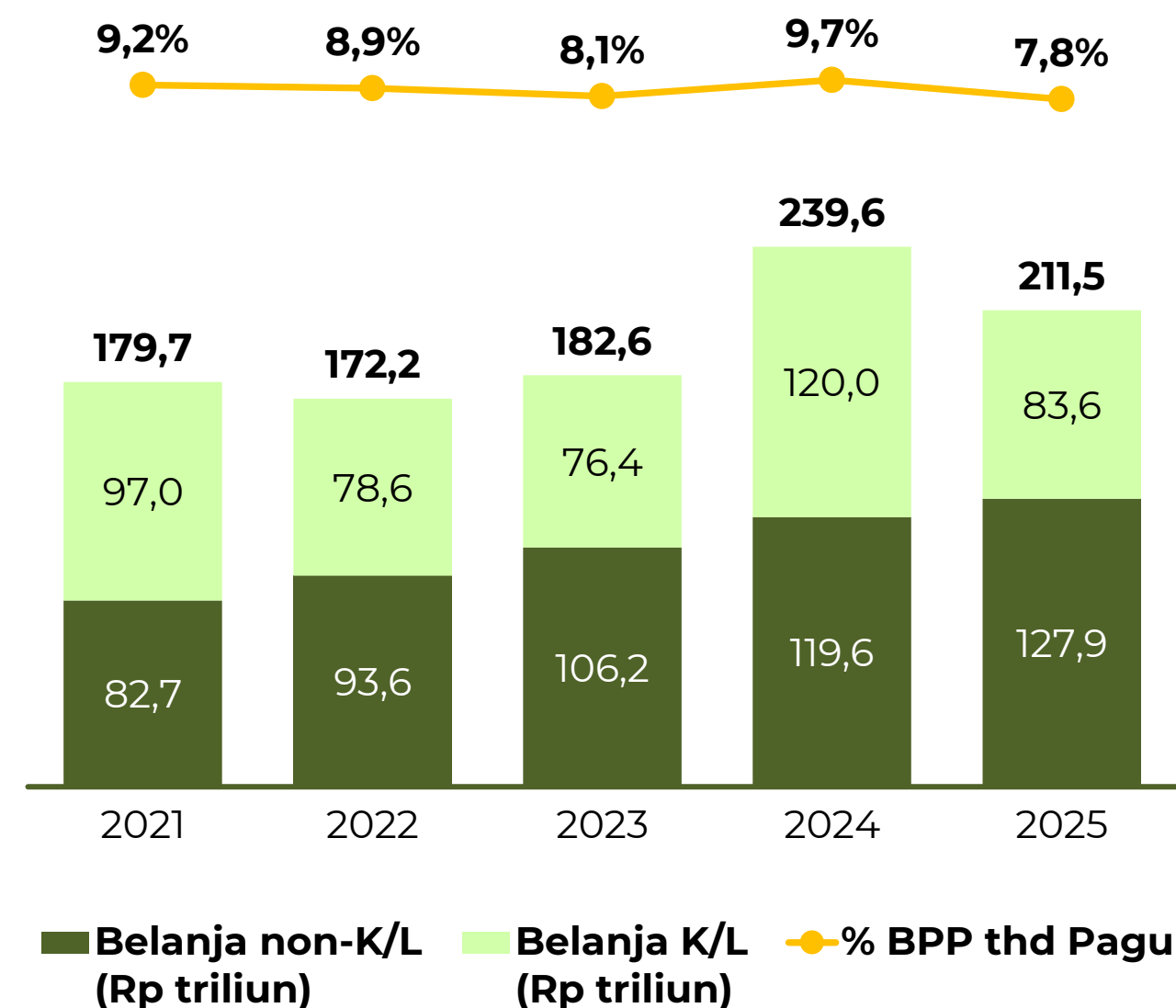
Belanja Pegawai ASN/TNI/Polri tetap dibayarkan
Bantuan Sosial (a.l. PBI JKN, PKH, Kartu sembako dll) tetap disalurkan sesuai jadwal



Belanja Non-K/L Rp127,9 T (8,3% dari Pagu APBN)

didukung pembayaran manfaat pensiun, subsidi, dan kompensasi sesuai jadwal

Realisasi BPP s.d 28 Februari, 2021 – 2025
(triliun rupiah)

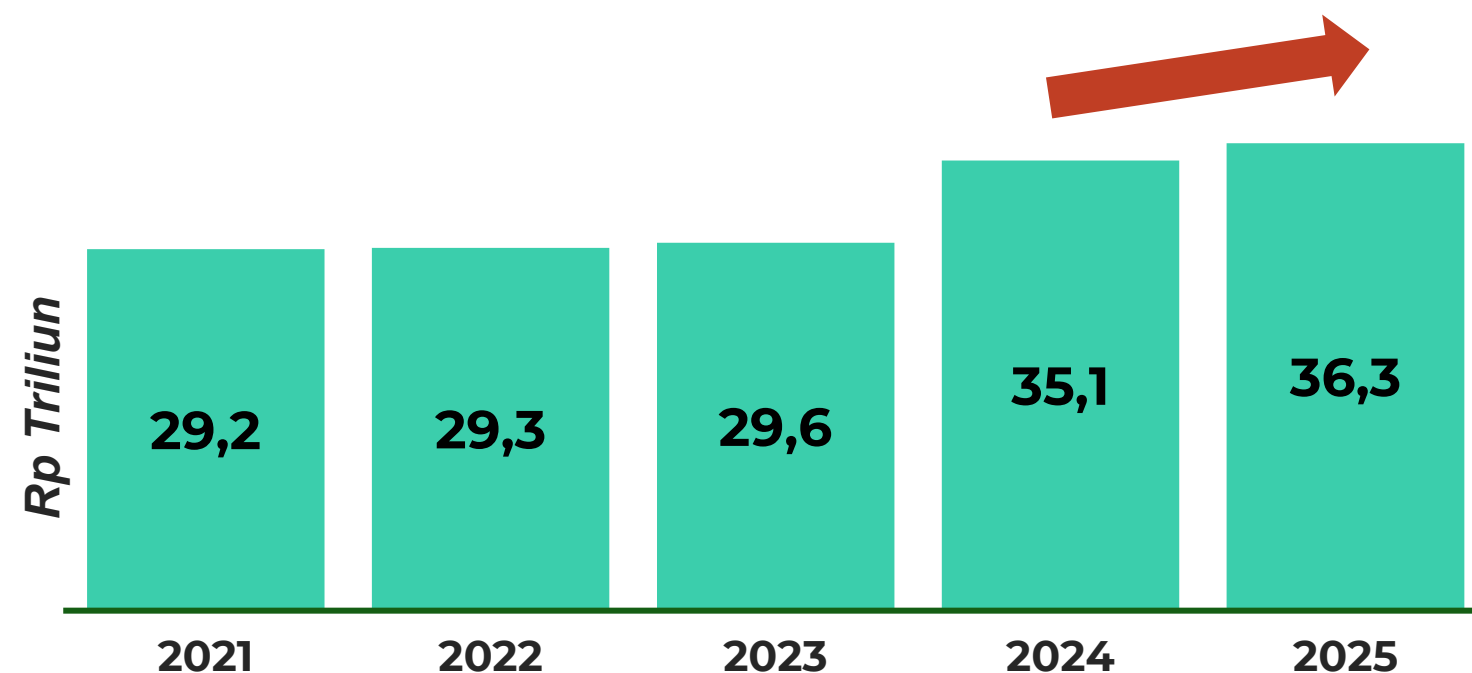


BELANJA K/L Rp83,6 T (1)

Realisasi s.d. 28 Februari 2025.

Belanja Pegawai Rp36,3 T (11,9%)

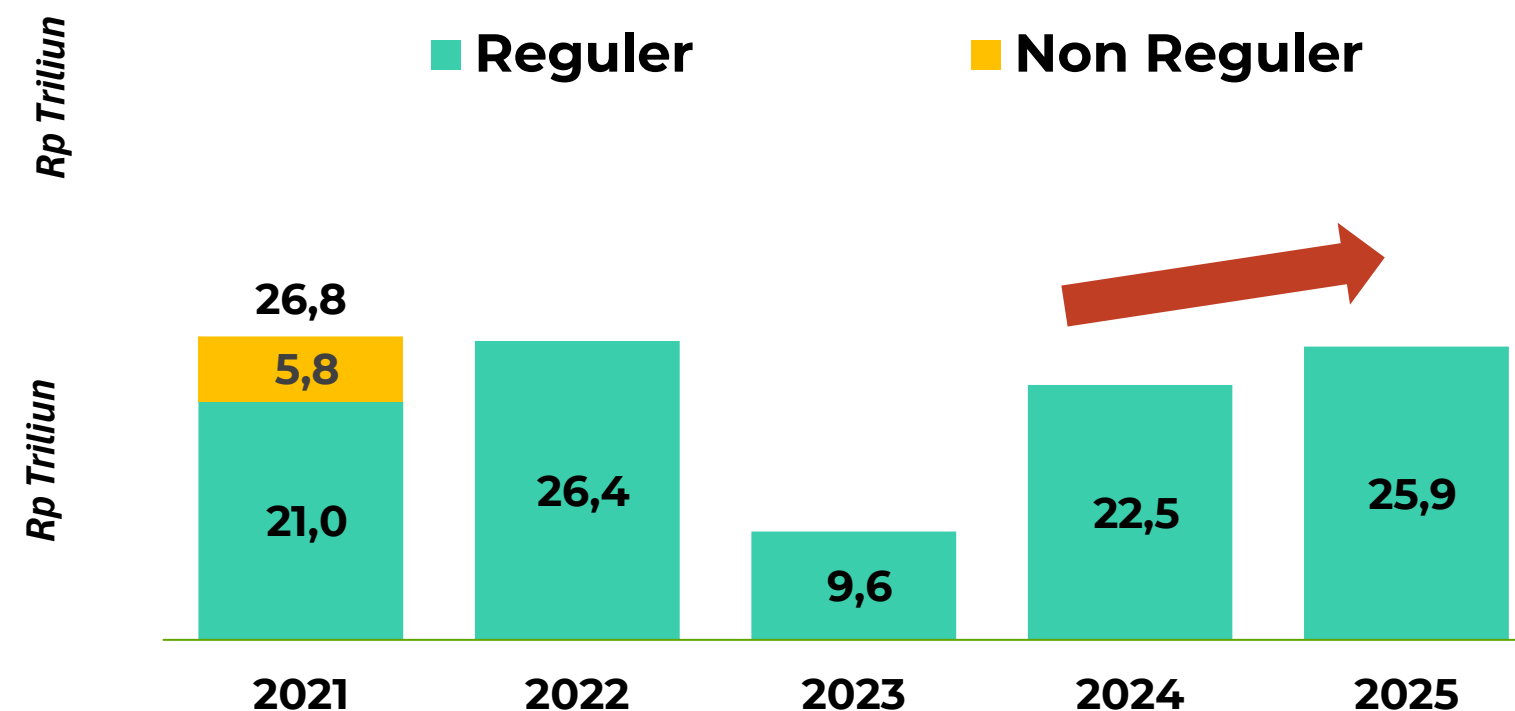
Pembayaran gaji dan tunjangan sesuai jadwal



Belanja Pegawai K/L (Rp Triliun)	36,3
- Gaji dan Tunjangan	23,8
- Tunj Kinerja, Lembur, dll	12,5

Belanja Bansos Rp25,9 T (19,2%)

Manfaat kepada masyarakat miskin



Pemanfaatan a.l. untuk :

- ☐ Bantuan PKH Rp7,3 T
- ☐ Bantuan Kartu Sembako Rp10,3 T
- ☐ Bantuan iuran PBI JKN Rp7,7 T
- ☐ Bantuan PIP Rp0,6 M
- ☐ Bantuan KIP Kuliah Rp156,3 M

BELANJA K/L Rp83,6 T (2)

Realisasi s.d. 28 Februari 2025.

Belanja Modal Rp3,1 T (1,6%)

Antara lain:

- ☐ **Kemenhan Rp1,3 T** → a.l. modernisasi alutsista, non-alutsista, peningkatan rumah dinas, dan sarana bidang pendidikan
- ☐ **Polri Rp867,9 M** → a.l. pengadaan almatsus
- ☐ **Kejaksaan Rp418,5 M** → a.l. pengadaan sarpras internal
- ☐ **Kemenag Rp112,8 M** → a.l. prasarana pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
- ☐ **KL lainnya Rp0,4 T** → a.l. infrastruktur konektivitas, prasarana pendidikan, dan prasarana lainnya

Belanja Barang Rp18,3 T (3,8%)

Antara lain:

- ☐ Pembayaran subsidi selisih biodiesel (BPDPKS) Rp3,8 T
- ☐ Pelayanan Kesehatan UPT Kemenkes Rp1,4 T
- ☐ Dukungan keamanan & ketertiban masyarakat Rp767,8 M
- ☐ Bantuan dan peningkatan kapasitas perguruan tinggi Rp235 M
- ☐ Pelayanan transportasi darat, laut dan udara Rp384,3 M

BELANJA NON-K/L Rp127,9 T

Realisasi s.d. 28 Februari 2025.

Manfaat Pensiun

Rp35,3 T

Pembayaran dan
Penyaluran *on-track*

Subsidi & Kompensasi

Rp10,7 T

Pemanfaatan	2024	2025	
	Realisasi	Realisasi	Growth (%)
Manfaat Pensiun	34,0	35,3	▲ 3,9
- Taspen	29,8	31,0	▲ 4,0
- Asabri	4,2	4,3	▲ 3,1

Pemanfaatan a.l.	2024	2025	
	Realisasi	Realisasi	Growth (%)
BBM (ribu KL)	1.463,8	1.482,2	▲ 1,3%
LPG 3 Kg (juta kg)	693,9	689,1	▼ 0,7%
Listrik bersubsidi (juta pelanggan)	40,1	41,8	▲ 4,3%
Diskon listrik (juta pelanggan)	-	Jan: 71,1 Feb: 64,8	-
Pupuk (juta ton)	0,87	1,30	▲ 49,4%

Realisasi subsidi s.d. 28 Februari 2025 berasal dari subsidi energi Rp10,6 T dan subsidi non-energi Rp53,6 M

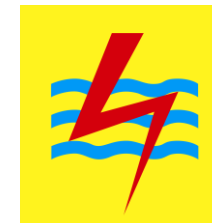
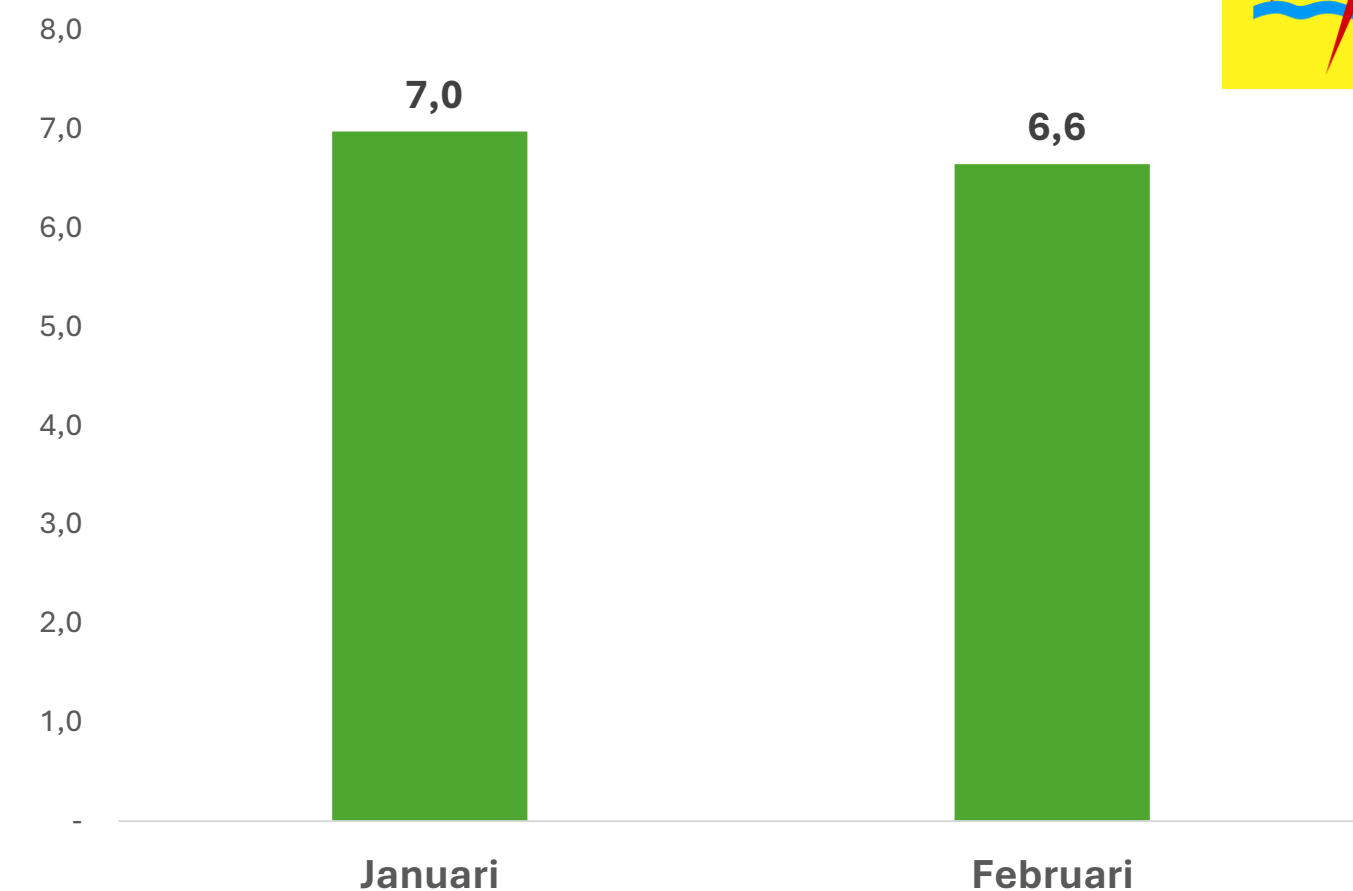
PEMBERIAN DISKON LISTRIK MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT

Kebijakan	Anggaran	Penerima Manfaat
Diskon Biaya Listrik Januari-Februari 2025	Rp13.615,8 M ^{*)}	Januari : 71,1 jt pelanggan Februari : 64,8 jt pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA

^{*)} angka sementara

Bulan	Pelanggan
Januari	71,1 juta pelanggan
Februari	64,8 juta pelanggan

Penggunaan Diskon Listrik Januari-Februari
(Rp Triliun)



SUBSIDI DAN KOMPENSASI APBN 2025

Diarahkan untuk Stabilisasi Harga Dan Menjaga Daya Beli.

Subsidi Energi dan Kompensasi, 2024-2025

(Triliun Rupiah)

Subsidi Energi diberikan untuk stabilisasi harga dan menjaga daya beli masyarakat

Subsidi Enegi dan Kompensasi (Rp triliun)	2024 Realisasi	2025 APBN
1. Subsidi Energi	177,6	203,4
a. Subsidi BBM	21,6	26,7
b. Subsidi LPG Tabung 3 Kg	80,2	87,0
c. Subsidi Listrik	75,8	89,7
2. Kompensasi	209,3	190,9
JUMLAH	386,9	394,3

Kuota Subsidi Energi 2025



Listrik Bersubsidi
42,1 juta pelanggan



BBM Bersubsidi
19,4 juta KL



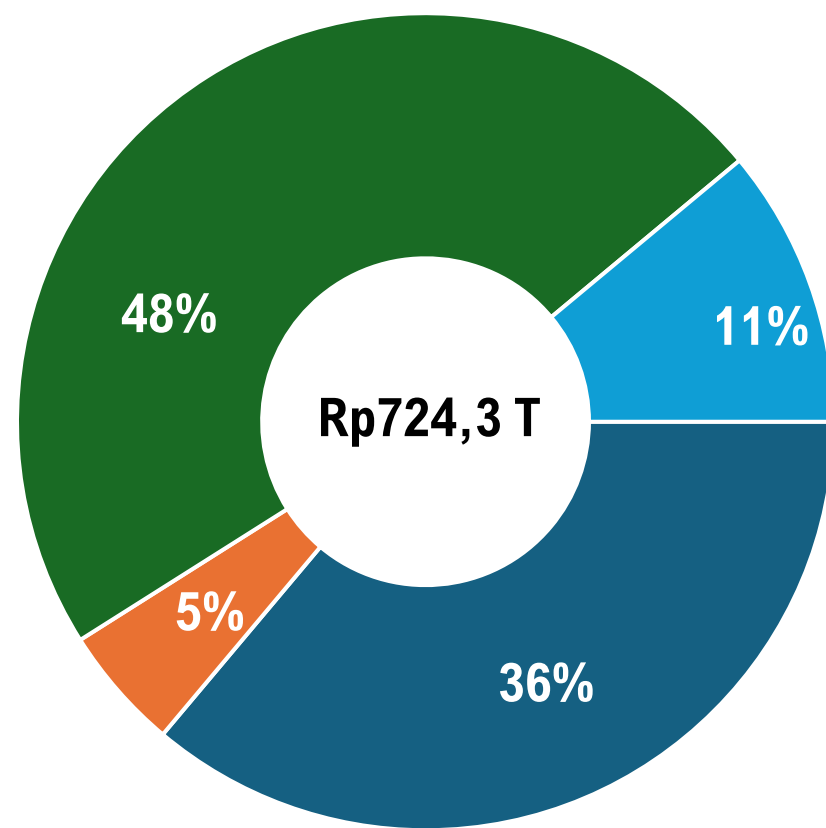
LPG 3 Kg
8,2 juta MT

Masyarakat menikmati harga lebih murah melalui subsidi dan kompensasi

Kategori	Harga Seharusnya	Dibayar Masyarakat */ Harga Jual Eceran **	Ditanggung APBN	Penerima Manfaat 2024
Solar	Rp11.950 /Liter	Rp6.800 /Liter*	Rp5.150/L (43%)	> 4,0 juta kendaraan
Pertalite	Rp11.700 /Liter	Rp10.000 /Liter*	Rp1.700/L (15%)	> 157,4 juta kendaraan
LPG 3 Kg	Rp42.750 /tabung	Rp12.750 /tabung**	Rp30.000/tbg (70%)	40,3 Juta pelanggan
Listrik RT 900VA Subsidi	Rp1.800 /kwh	Rp600 /kwh*	Rp1.200/kwh (67%)	41,5 Juta pelanggan subsidi
Pupuk Urea	Rp5.558 /Kg	Rp2.250 /Kg**	Rp3.308/Kg (59%)	7,3 Juta Ton Pupuk untuk petani
Pupuk NPK	Rp10.791 /Kg	Rp2.300 /Kg**	Rp8.491/Kg (78%)	

ANGGARAN PENDIDIKAN APBN 2025

(Realisasi s.d 28 Februari 2025 Rp76,4 T (10,6% APBN)).



- K/L: Rp261,62 T
- Non K/L: Rp35,55 T
- TKD: Rp347,09 T
- Pembiayaan: Rp80 T

Meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui program unggulan:

- **Renovasi dan revitalisasi sekolah**
- **Sekolah Unggulan, Sekolah Taruna Nusantara, Sekolah Rakyat**
- **Makan bergizi serta Digitalisasi Pembelajaran**

Alokasi tahun 2024 Rp665 T

Output Strategis Anggaran Pendidikan 2025, a.l :



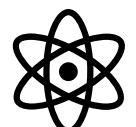
Bidikmisi/ Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah *1.1 juta mahasiswa*



Program Indonesia Pintar (PIP) *20,4 juta siswa*



Bantuan Operasional Sekolah (BOS) *9,1 juta siswa*



Bantuan Operasional PTN (BOPTN) *197 lembaga*



Beasiswa LPDP *10.500 mahasiswa*



Sekolah Rakyat



Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS *477,7 ribu guru*



Sertifikasi Guru *666,9 ribu guru*



Renovasi Sekolah *22 ribu pembangunan/ rehabilitasi sekolah*



Makan Bergizi Gratis (MBG)



Sekolah Unggulan



Sekolah Taruna Nusantara



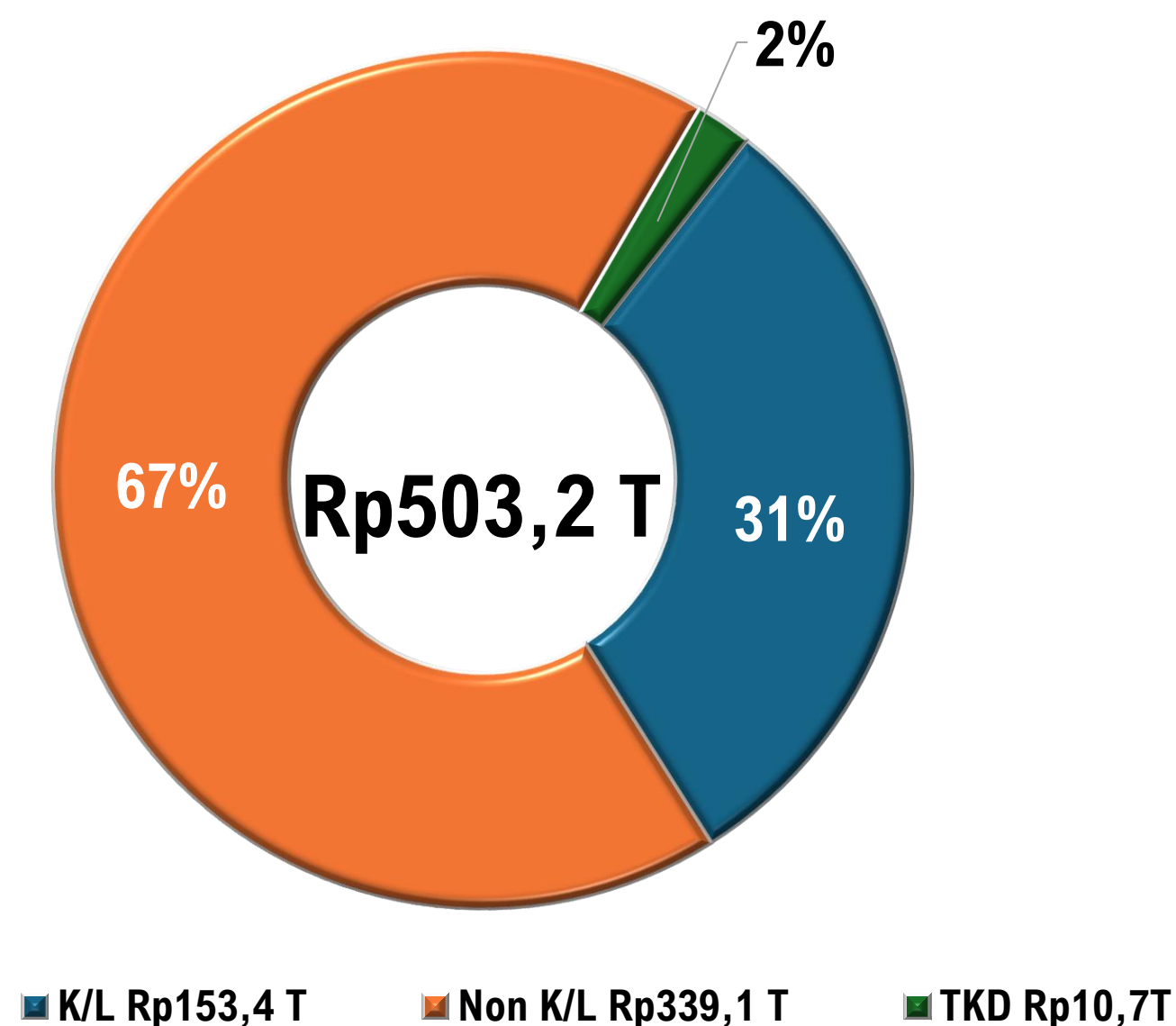
Digitalisasi Pembelajaran

Efisiensi anggaran tetap menjaga 20% Anggaran Pendidikan

ANGGARAN PERLINDUNGAN SOSIAL APBN 2025

(Realisasi s.d. 28 Februari 2025 Rp36,7 T (7,3% APBN)).

Dalam APBN 2025, Anggaran Perlinsos dialokasikan dengan melanjutkan program PKH, Kartu Sembako, Subsidi, PIP, BLT Dana Desa, dlll. :



Alokasi tahun 2024 Rp496,7 T

Akses keluarga miskin untuk kebutuhan dasar, melalui:



Program Keluarga Harapan (PKH)

● 10,0 juta KPM



Program Kartu Sembako

● 18,3 juta KPM



Subsidi BBM

● 19.41 juta kilo liter



Subsidi LPG 3kg

● 8.170 juta Kg



Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa

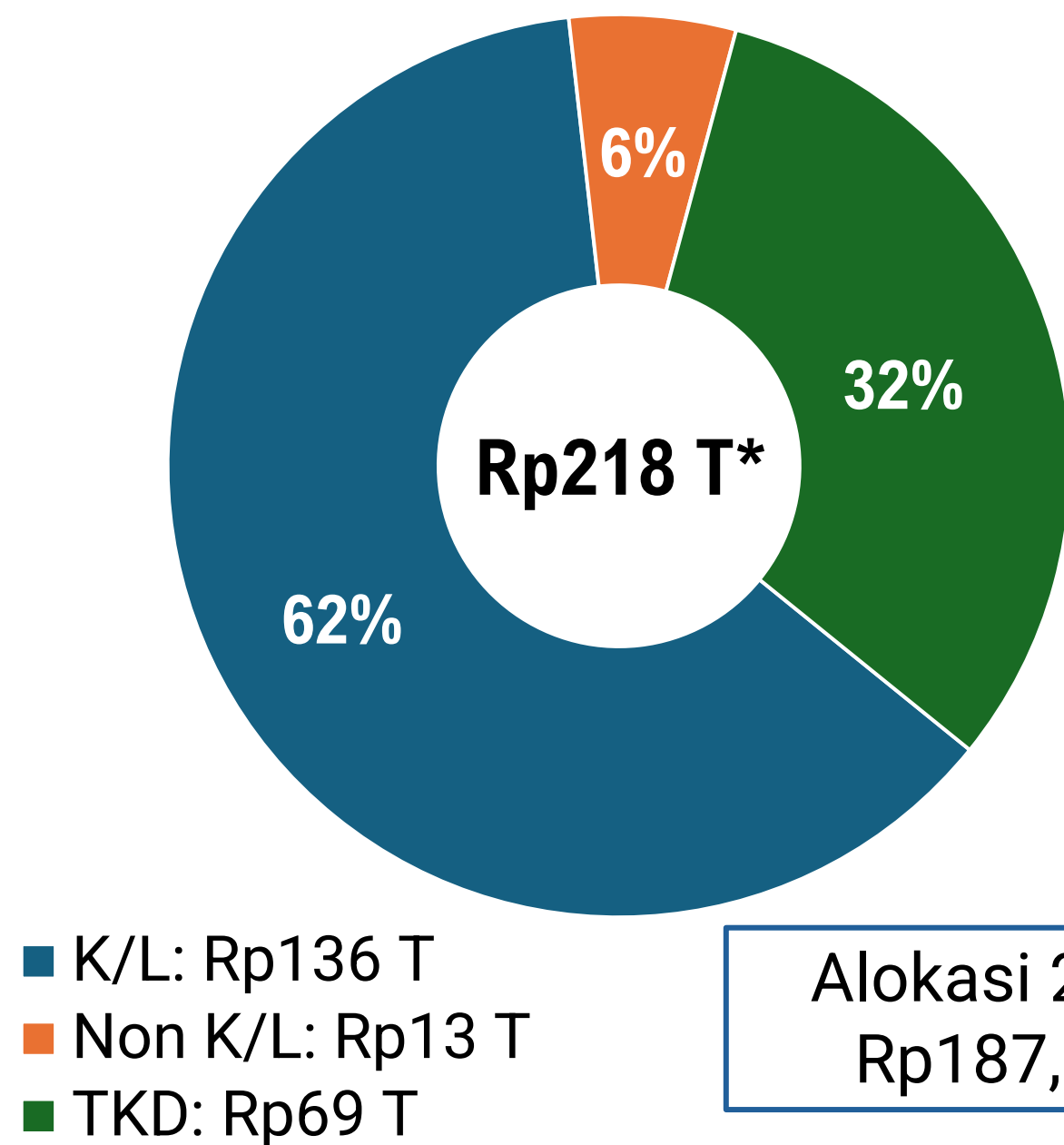
● 2.96 juta KPM

Termasuk untuk PIP. KIP Kuliah, PBI JKN

ANGGARAN KESEHATAN 2025 Rp218 T (2024 Rp187,5T)

Realisasi s.d. 28 Februari 2025 Rp17,9 T (8,2%).

Dalam APBN 2025 Anggaran Kesehatan diarahkan untuk mewujudkan SDM sehat dan produktif, serta mendukung transformasi sistem kesehatan.



*Catatan: angka sementara

Termasuk dukungan untuk:



Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Target* a.l.:

- 2.974.733 Bayi baru lahir
- 13.449.455 Balita & anak prasekolah
- 24.205.423 Usia sekolah & remaja
- 85.258.763 Dewasa
- 16.972.302 Lanjut usia



Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Daerah

Target:

- Peningkatan Kelas D/D Pratama menjadi Kelas C pada 10 Rumah Sakit



Penuntasan TB melalui deteksi atau skrining

Target a.l.:

- 0,3 juta skrining a.l. untuk penemuan kasus TBC, Pemeriksaan TBC, dan Pengobatan sampai sembuh
- Pendampingan 2 lembaga dalam pelaksanaan uji klinis TB



Penerima Bantuan Iuran JKN

Target:

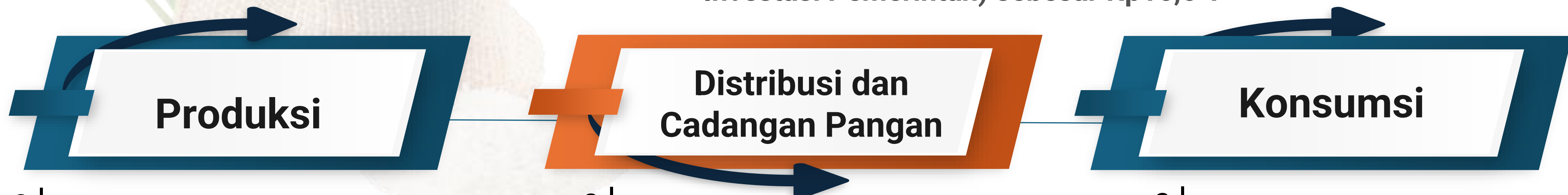
96,8 juta orang

ANGGARAN KETAHANAN PANGAN 2025 MENINGKAT

Rp155,5 T*
(alokasi 2024 Rp114,3 T)

- K/L Rp40,0 T
- TKD Rp16,6 T
- Non K/L Rp74,3 T
- Pembiayaan Rp24,6 T

- Mendorong produktivitas pertanian/perikanan
- Mendukung rantai pasok pangan
- Memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat
- Meningkatkan Nilai Tukar Petani / Nelayan
- Mendukung pengadaan beras oleh BULOG (sebagai Operator Investasi Pemerintah) sebesar Rp16,6 T



a.l.

- Subsidi Pupuk 9,5 jt ton
- Cetak Sawah (Ekstensifikasi) 225 rb Ha
- Intensifikasi 80 rb Ha
- Bendungan 20 unit
- Alsintan pra-panen 77,4 rb unit

a.l.

- Jalan usaha tani 102 km
- Pembangunan/Peningkatan sarpras di 63 Pelabuhan Perikanan
- Koperasi Desa Merah Putih
- Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)
- Penguatan badan usaha bidang pangan

a.l.

- Bantuan pangan
- Bantuan sembako
- Gelar pasar murah (GPM)
- Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)

*) angka sementara

PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS (PKG)

Program *Quick Win* Bidang Kesehatan.



Anggaran PKG TA 2025: Rp3,4T

- Kemenkes Rp2,2 T
- DAK NonFisik Rp1,2 T

Layanan PKG di hari ulang tahun



→ bayi dan anak hingga usia 6 tahun (balita dan prasekolah) dan usia 18 tahun ke atas.

Layanan PKG di sekolah



→ anak usia 7 – 17 tahun (usia sekolah dan remaja), dilaksanakan di sekolah setiap tahun ajaran baru.

Layanan PKG Rutin



→ ibu hamil bayi dan anak hingga usia 6 tahun (balita dan prasekolah), pemeriksaan kesehatan yang harus dilakukan lebih dari sekali setahun sesuai kondisi dan usia.

Realisasi dan Sebaran PKG Nasional Per 6 Maret 2025

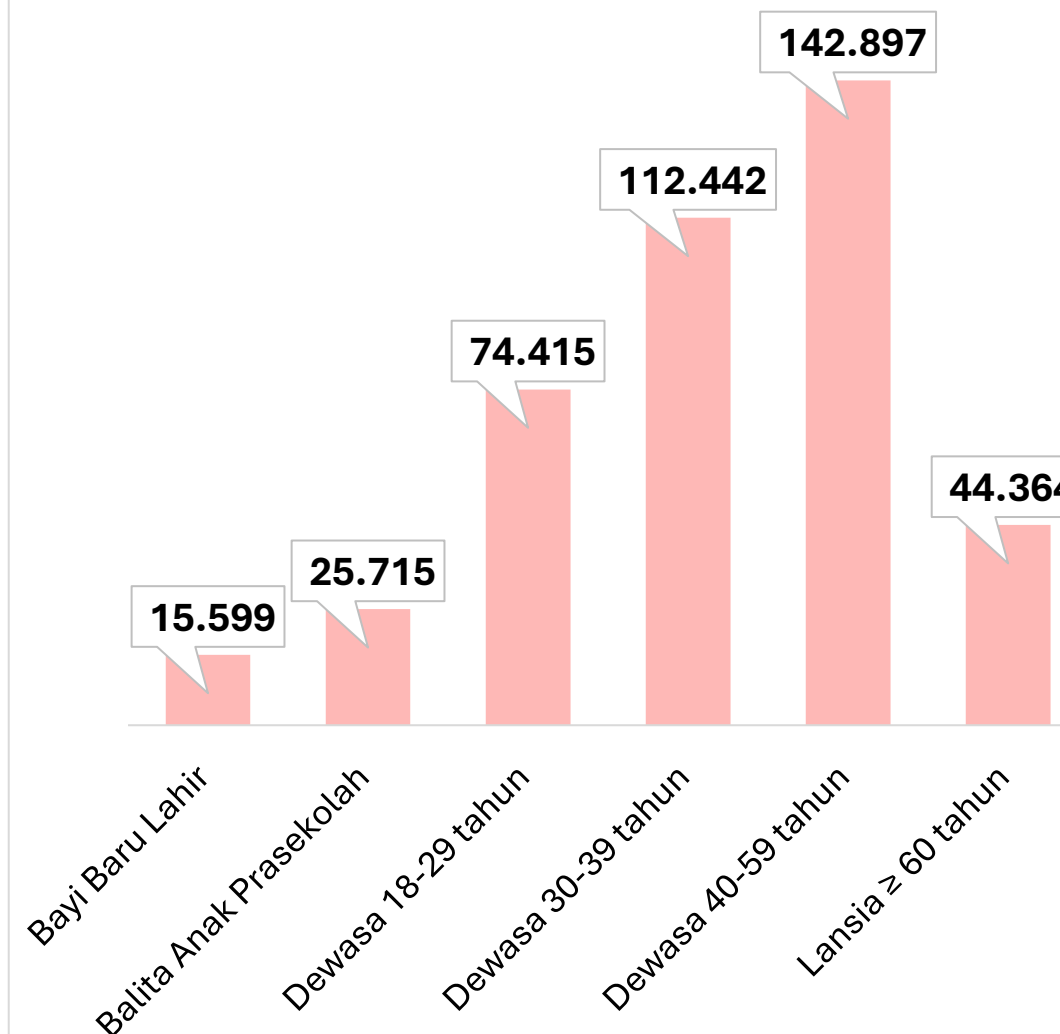
415.211
orang

8.885 (86%)
puskesmas

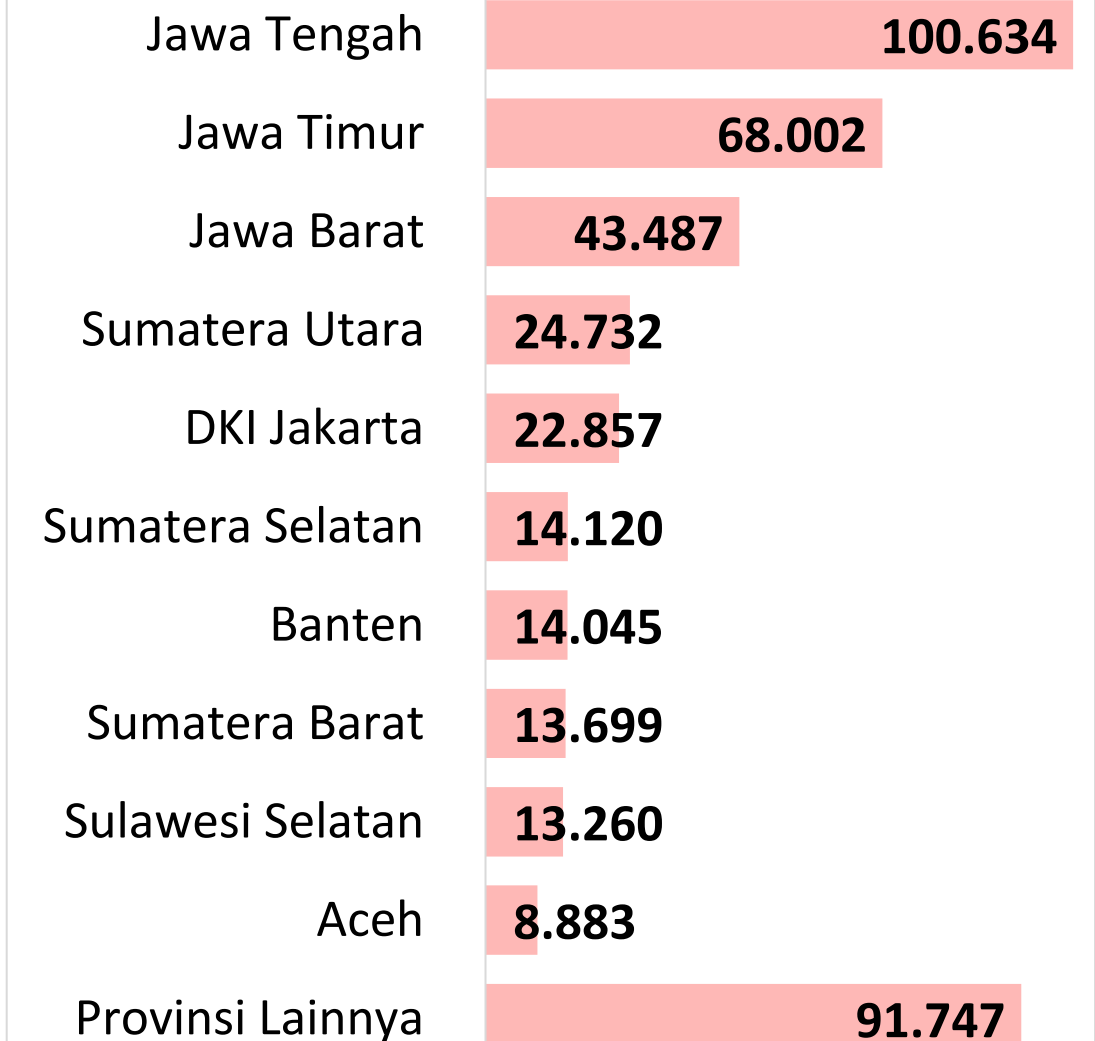
498 (97%)
kab/kota

38 (100%)
provinsi

Pemanfaat PKG Berdasarkan Usia (orang)



Sebaran Pemanfaat PKG (orang)



Data update: 6 Maret 2025 pukul 09.00 WIB

TOTAL ANGGARAN THR 2025 SEBESAR RP49,4 T

PP no. 11 Tahun 2025 dan PMK untuk pelaksanaan THR telah di tandatangani.



“Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan libur lebaran”

ASN
Pusat/TNI/Polri
Rp17,7 T



Tunjangan Perbaikan
Penghasilan dari APBD
(±Rp16,5T)

Pensiunan:
Rp12,4 T



ASND sebesar
Rp19,3 T
(dari APBN)



Waktu Pembayaran:
THR dibayarkan 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri dan mulai cair pada tanggal 17 Maret 2025.

Ketentuan Pembayaran:

- Komponen : Gaji, Tunjangan melekat, & Tunjangan Kinerja (100%).
- Dasar perhitungan THR : penghasilan Februari 2025.
- Tidak kena potongan/iuran & PPh ditanggung pemerintah.
- Ketentuan lebih lanjut diatur PMK (APBN) dan Perkada (APBD).

KEBIJAKAN INSENTIF BERKAITAN DENGAN HARI RAYA

Momentum Menjaga Pertumbuhan dan Daya Beli Masyarakat.



Penurunan harga tiket pesawat setidaknya sebesar 13-14 % (a.l. PPN Ditanggung Pemerintah tiket pesawat sebesar Rp286,1 M):

- selama 2 minggu masa liburan Idul Fitri **15 hari, 24 Maret -7 April 2025.**
- kelas ekonomi sesuai tipe pesawat.
- kelompok layanan pada 500 rute dalam negeri.



Penurunan harga tarif tol dan transportasi selama mudik lebaran:

- diskon 20% selama 6 hari (4 hari arus mudik 24-27 Maret dan 2 hari arus balik 8-9 April 2025).
- diskon tarif tambahan hingga 30% itu bakal diberikan kepada pemudik yang terdampak pengalihan arus melalui Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu).



Pemberian THR bagi karyawan swasta, BUMN, BUMD (SE Menaker):

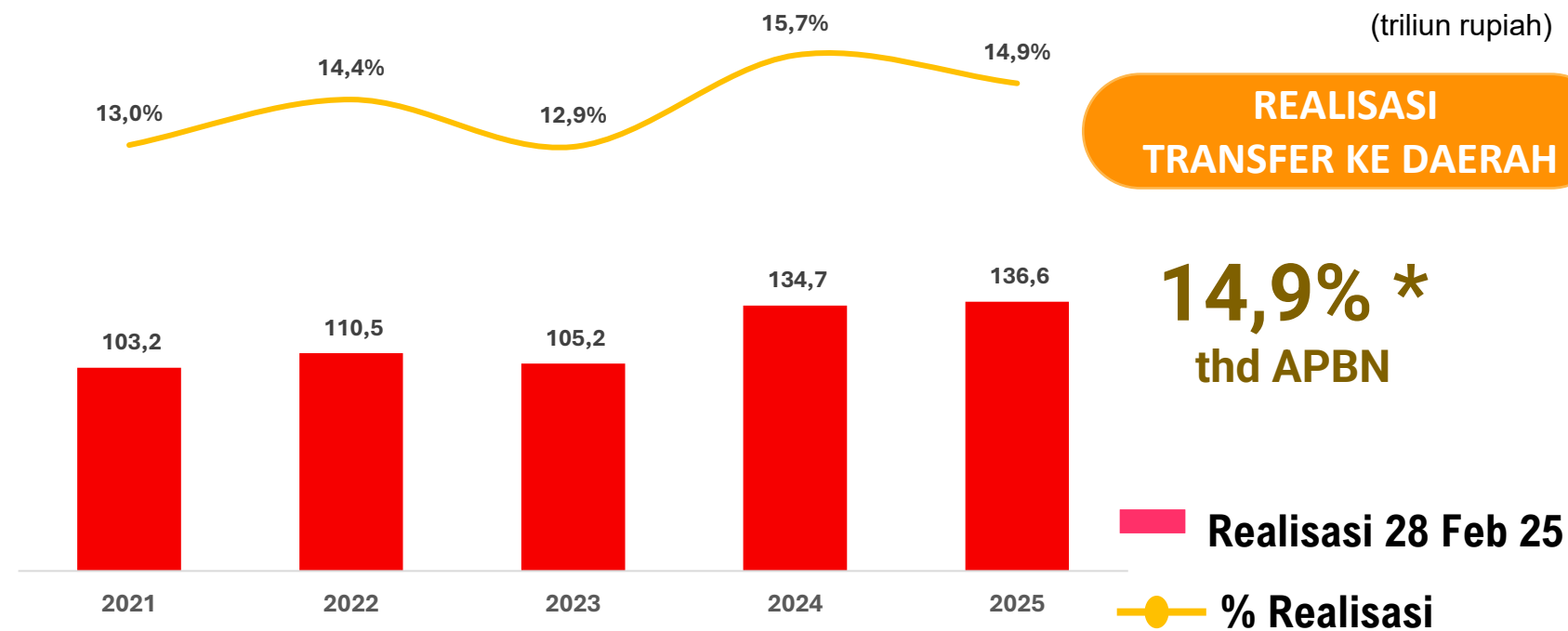
- Pekerja/Buruh, masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.
- Pekerja/Buruh yang mempunyai Hubungan Kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja.
- dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan.



Himbau Bonus Hari Raya untuk pengemudi dan kurir online (SE Menaker):

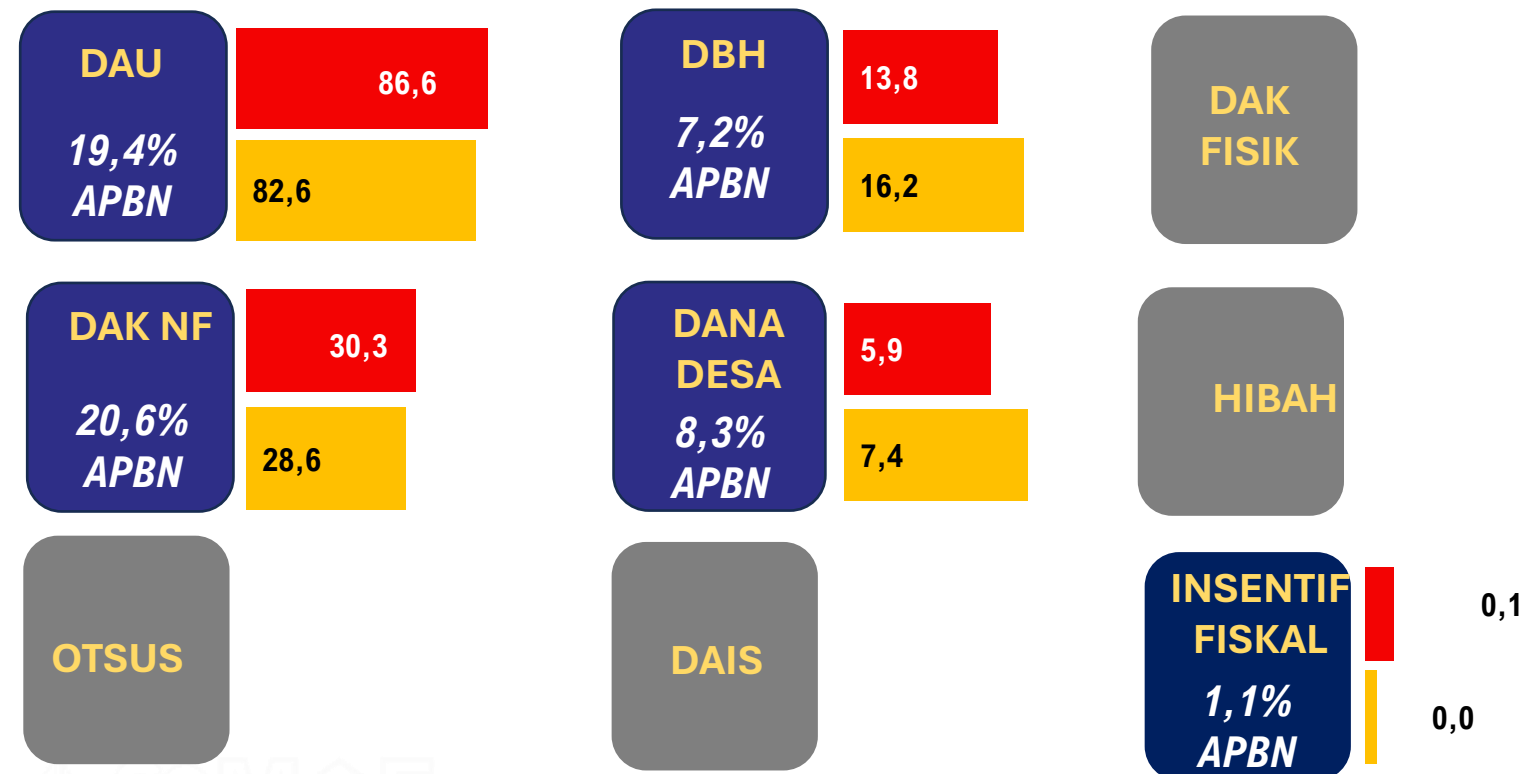
- diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada seluruh pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi.
- paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
- proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai.

REALISASI TKD LEBIH TINGGI DARI TAHUN SEBELUMNYA, MENUNJUKKAN KOMITMEN APBN DALAM MENDUKUNG LAYANAN PUBLIK DI DAERAH



KINERJA REALISASI TKD PER JENIS (YoY)

2024 2025



- DAU, DAK Nonfisik, Insentif Fiskal lebih tinggi → peningkatan realisasi DAU Block Grant, realisasi BOS yang lebih tinggi karena pemerintah daerah sudah lebih tertib menyampaikan syarat salur.
- DBH lebih rendah → perubahan perubahan periode salur dan persentase salur untuk setiap periode.
- Dana Desa lebih rendah → banyak Pemda belum menyampaikan syarat salur.
- Sebagian dana TKD belum dilakukan penyaluran karena belum terpenuhinya penyampaian persyaratan salur dari Pemda dan/atau belum masuk jadwal penyaluran.

Pada Bulan Maret, TKD diperkirakan akan tersalur sebesar **Rp57,1 Triliun**, untuk mendukung layanan publik daerah seperti sekolah dan puskesmas melalui DAK NF BOS dan BOK (Rp3,5 Triliun), serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui DAU (Rp 30,4 Triliun).

*Pagu TKD APBN 2025

TRANSFER KE DAERAH TERUS DIOPTIMALKAN UNTUK Mendukung LAYANAN PUBLIK DI DAERAH : Pendidikan Dasar & Kesehatan

Tunjangan Profesi Guru (TPG) Mulai Bulan Maret —> disalurkan langsung ke rekening masing-masing Guru secara bertahap

Mendukung Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Mendanai Penyelenggaraan Layanan Publik/Belanja Aparatur

Melalui DAU

Jumlah Pemda	546
Jumlah ASND	3,1 juta
Kontribusi DAU sd Februari	Rp.59,05 T
Penyaluran Maret	Rp.30, 4 T



Mendanai Belanja Pendidikan

Melalui DAK Non Fisik

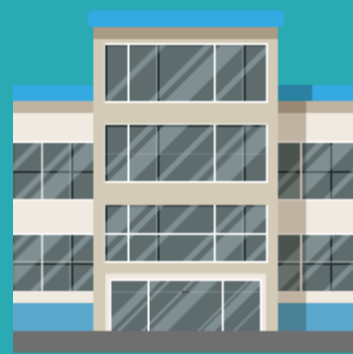
Realisasi	%	Proyeksi Maret
BOS 25,89T	48,4%	0,07T
TPG -	0%	1.95 T



1,5 juta
Guru



43 juta
Siswa



219 ribu
sekolah

Mendanai Belanja Kesehatan

Melalui DAK Non Fisik

Realisasi	%	Proyeksi Maret
1,33 T	8,3%	1,57 T

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK dan BOKB)

10.165
Puskesmas



PERUBAHAN SKEMA PENYALURAN DANA TUNJANGAN PROFESI GURU

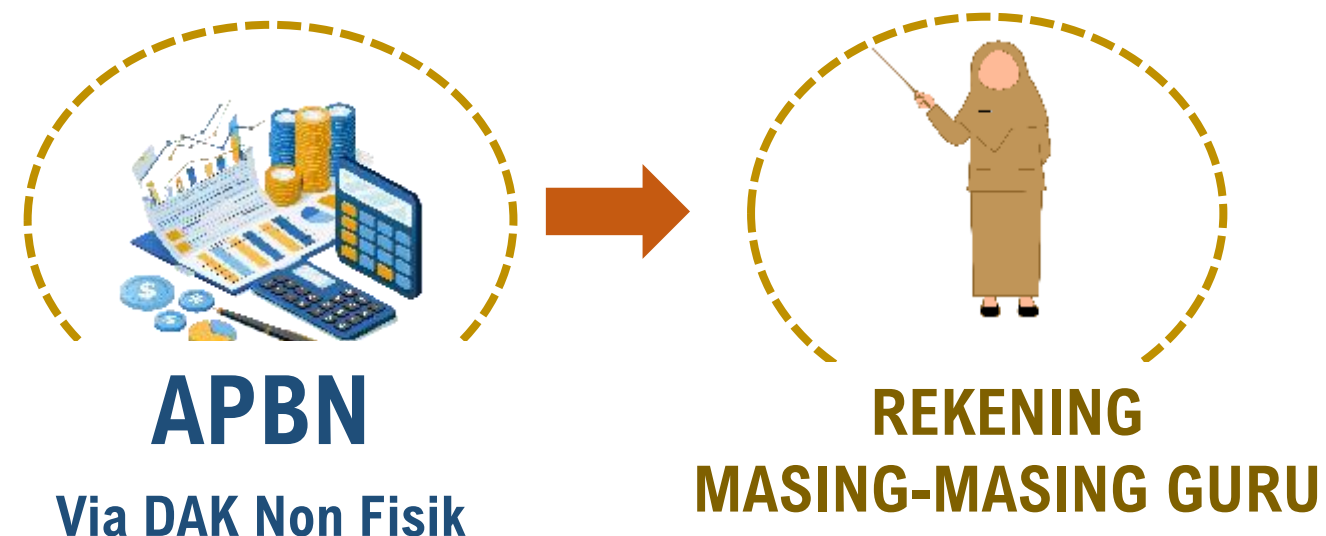
SEBELUM



Perubahan Skema Penyaluran:
mempercepat penerimaan
tunjangan agar lebih **tepat waktu,**
akurat dan terukur.



SESUDAH



- Pagu TPG: **Rp66,9T**
- Target Penerima: **1,5 juta Guru di 544 Daerah**
- Tahap I: Bulan Maret: disalurkan **Rp 1,25 Triliun untuk 103.197 guru di 204 Daerah**



Tunjangan Profesi Guru adalah Tunjangan yang diberikan kepada Guru yang telah Bersertifikasi, yang diberikan sebesar 1 kali gaji pokok per bulan, sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

PENCADANGAN TKD & EFISIENSI APBD (INPRES 1/2025)



Arahan Presiden: Efisiensi Belanja Agar Produktif

- Tidak mengganggu operasional dan penyediaan layanan dasar.
- Tidak mengurangi manfaat yang diterima langsung masyarakat → digunakan mendanai prioritas Pemerintah, seperti **program MBG, ketahanan pangan dan energi**.
- **Belanja APBD diefisiensi → tambahan *fiscal space*** untuk belanja produktif dan mendanai program visi misi kepala daerah baru.

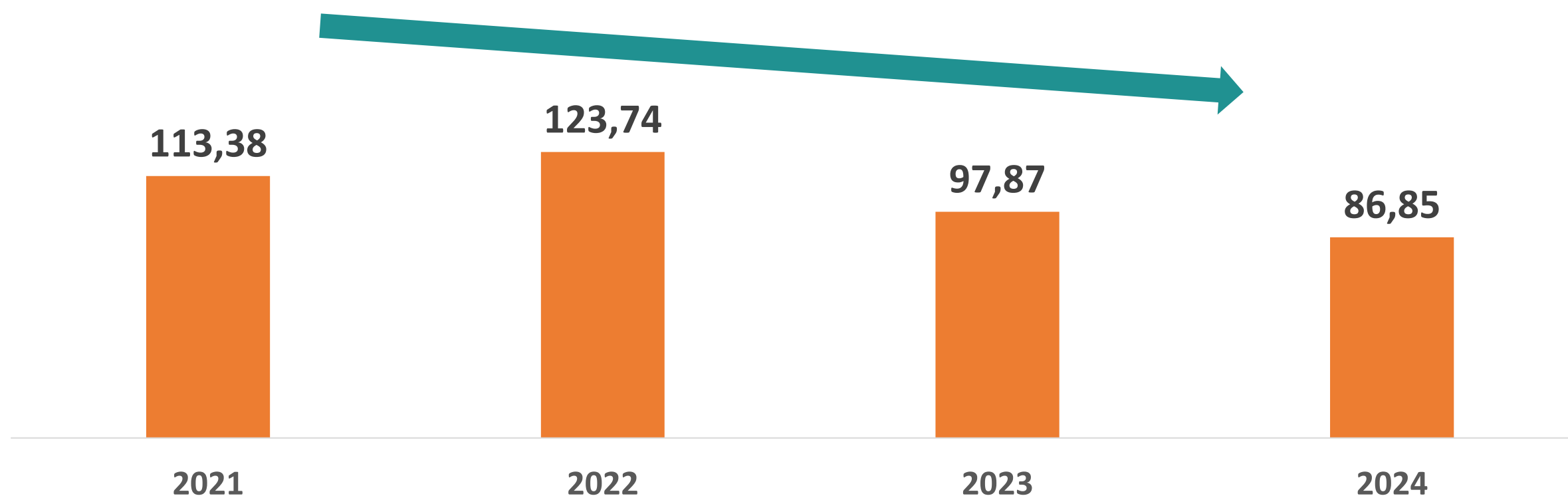
**BELANJA
K/L** ➔ **256,1T**
(22,1% pagu
awal)

TKD ➔ **50,6T**
(5,5% pagu
awal)

Kurang Bayar DBH	13,9T	Belum dirinci alokasi per daerah sehingga belum menjadi penerimaan APBD.
Insentif Dana Desa	2T	Belum dirinci desa penerima sehingga belum menjadi penerimaan APBDes.
DAU Pekerjaan Umum	15,6T	Bidang infrastruktur yang menjadi fokus efisiensi presiden.
DAK Fisik	18,3T	
Dana Otsus	0,5T	Dana Otsus dialokasikan 3,25% dari Pagu DAU Nasional (sesuai UU HKPD). Penurunan dana otsus merupakan konsekuensi karena penurunan pagu DAU Nasional.
Dais	0,2T	Dana Keistimewaan Yogyakarta mengikuti penurunan TKD secara umum.

POSISI DANA PEMDA (NASIONAL) DI PERBANKAN TERUS MEMBAIK

TREN DANA PEMDA DI PERBANKAN TAHUN 2021-2024 (Rp Triliun), posisi per 31 Desember



- **Posisi dana Pemda di perbankan sepanjang tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2023 dengan nilai terendah sebesar Rp86,85T di Bulan Desember.**
- **Trend Penurunan:** Hasil kebijakan penerapan syarat salur yang lebih baik dan kebijakan *Treasury Deposit Facility* (TDF). Penyaluran TDF Kurang Bayar DBH dilakukan menjelang akhir tahun. Untuk tahun 2023 sebesar Rp45 triliun & untuk tahun 2024 sebesar Rp13 triliun.
- **Akselerasi belanja daerah:** APBD mampu memberikan stimulus bagi perekonomian daerah.



Sumber : Bank Indonesia, Laporan Umum Terintegrasi/LBUT, data dari 34 provinsi per Januari 2025, diterima dari BI per tanggal 19 Februari 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

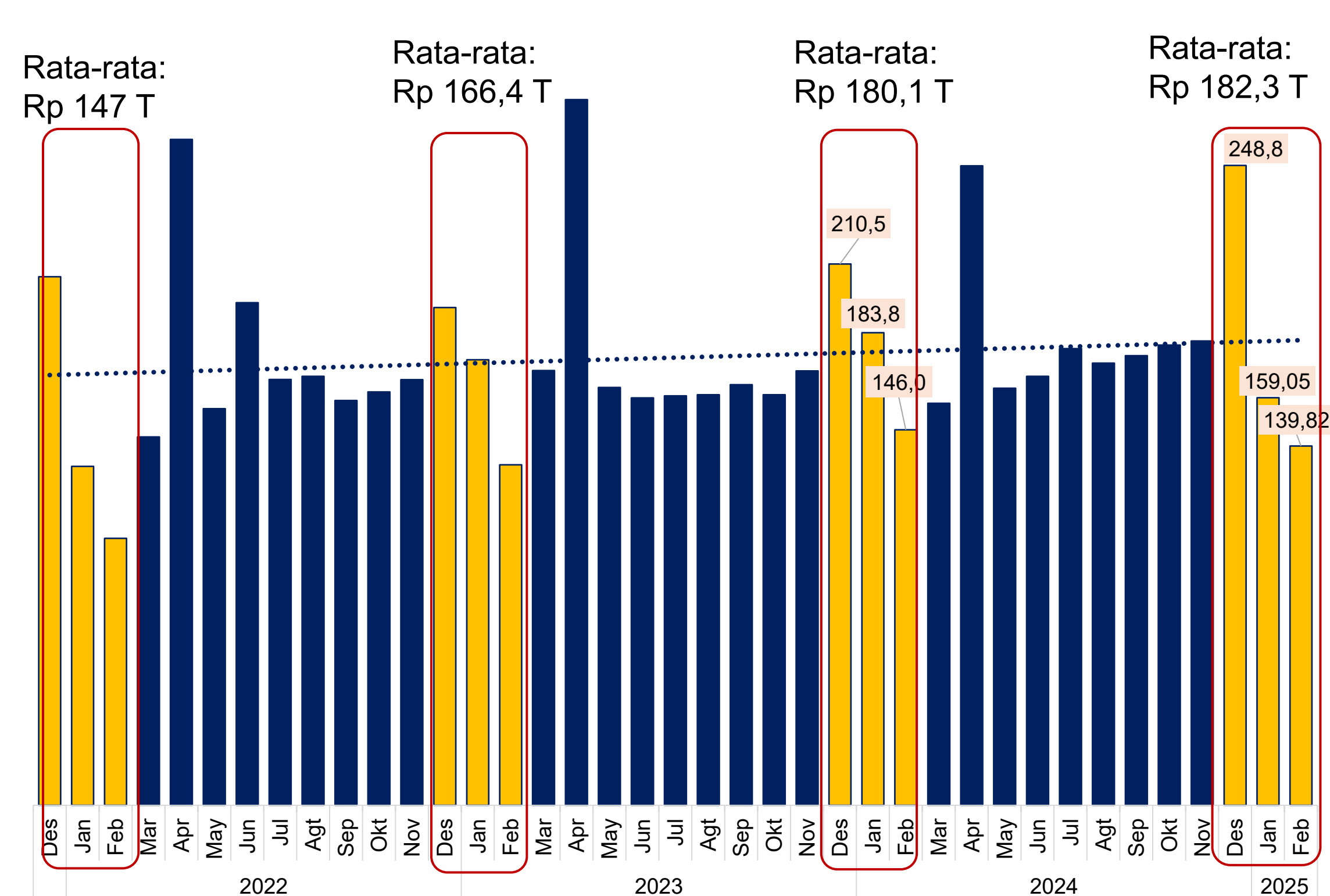
Pendapatan Negara

www.kemenkeu.go.id/apbnkita



PENERIMAAN PAJAK BRUTO S.D. FEBRUARI 2025 SEBESAR RP298,87 T

Penerimaan pajak tertekan karena faktor harga komoditas.



Penerimaan pajak memiliki tren bulanan yang spesifik, salah satunya adalah pada saat pergantian tahun. Penerimaan akan meningkat pada bulan Desember (efek Nataru dan akhir tahun anggaran) yang kemudian menurun pada bulan Januari dan Februari.



Penerimaan Des-24 s.d. Feb-25 menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

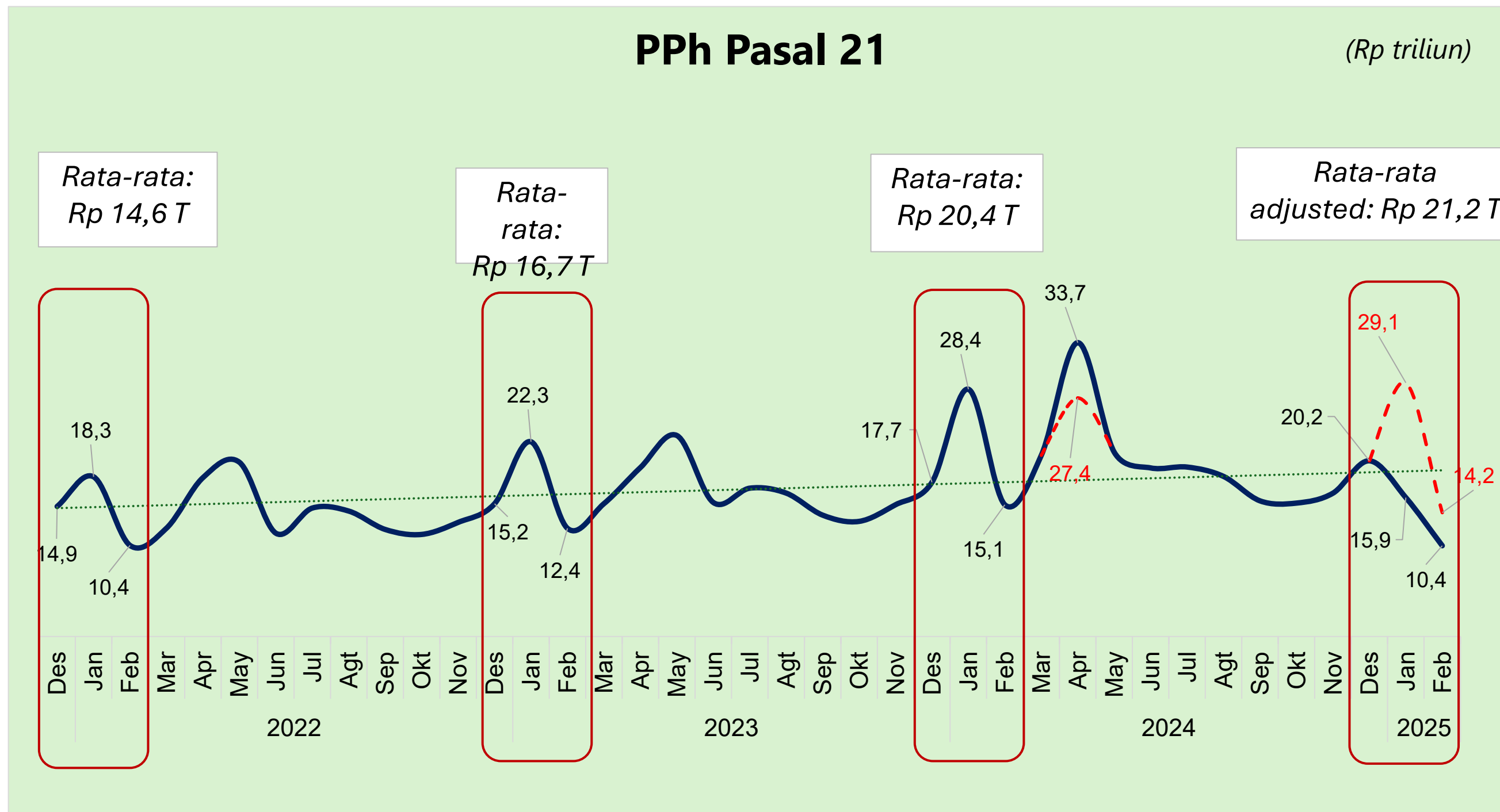


Penerimaan pajak Jan-Feb 2025 melambat dibandingkan tahun 2024 akibat harga komoditas. Beberapa harga komoditas utama yang melambat antara lain Batubara (-11,8%), Brent (-5,2%), dan Nikel (-5,9%).

Data penerimaan pajak bulan Januari, tidak dapat diperbandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya karena adanya beberapa kebijakan, seperti TER, relaksasi, dan restitusi yang signifikan.

PENERIMAAN PAJAK PER JENIS PAJAK YANG TERKAIT DENGAN AKTIVITAS EKONOMI

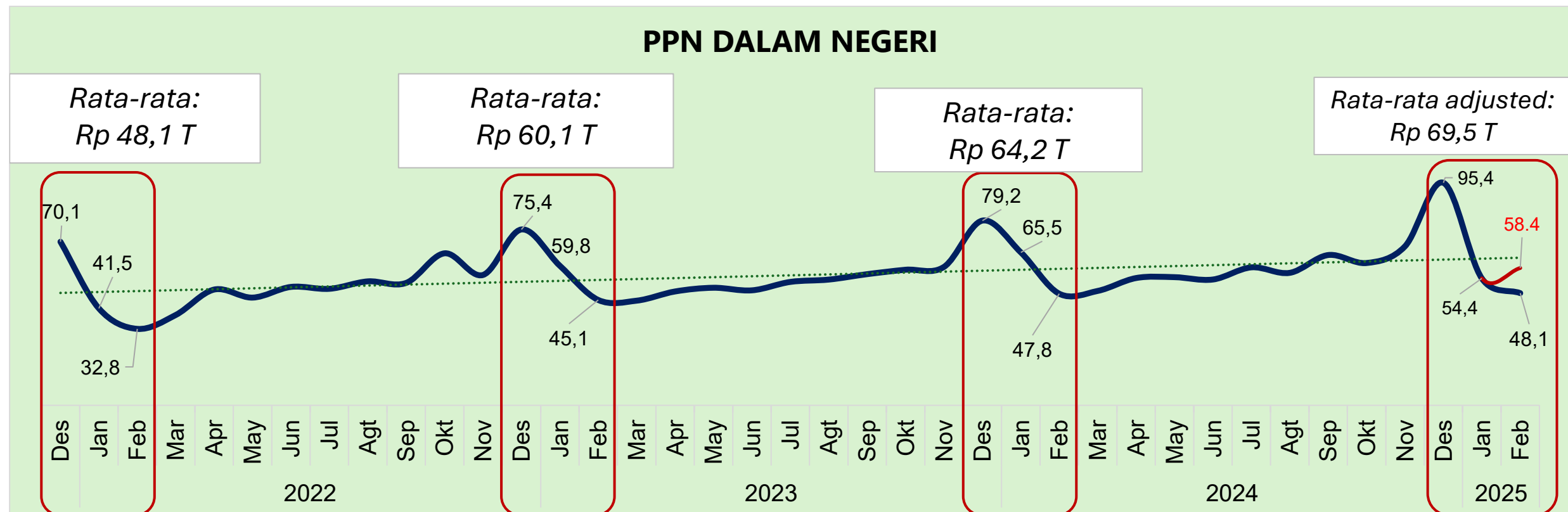
PPh Pasal 21 dipengaruhi penerapan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan TER.



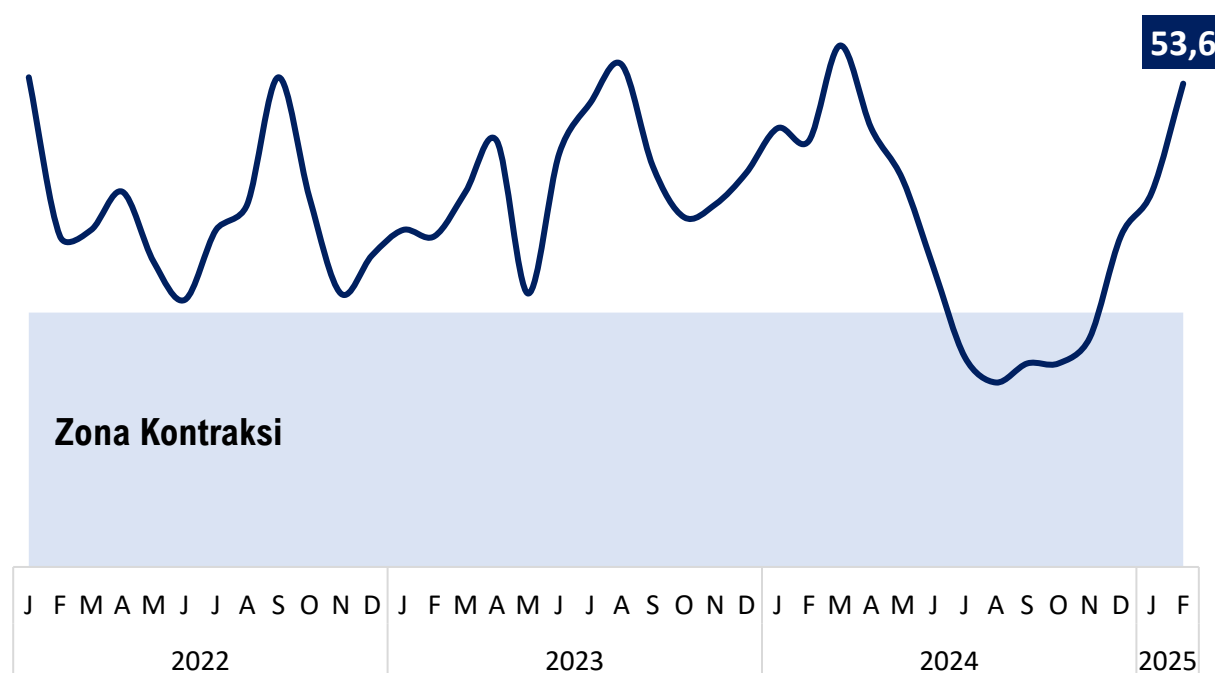
- Penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) PPh 21 sejak Januari 2024 mengakibatkan lebih bayar sebesar Rp16,5 Triliun di tahun 2024.
- Lebih bayar tersebut diklaim Kembali pada Januari dan Februari 2025.
- Apabila dampak klaim lebih bayar diperhitungkan (dinormalisasi), rata-rata PPh Pasal 21 Des-24 s.d. Feb-25 masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

PENERIMAAN PAJAK PER JENIS PAJAK YANG TERKAIT DENGAN AKTIVITAS EKONOMI

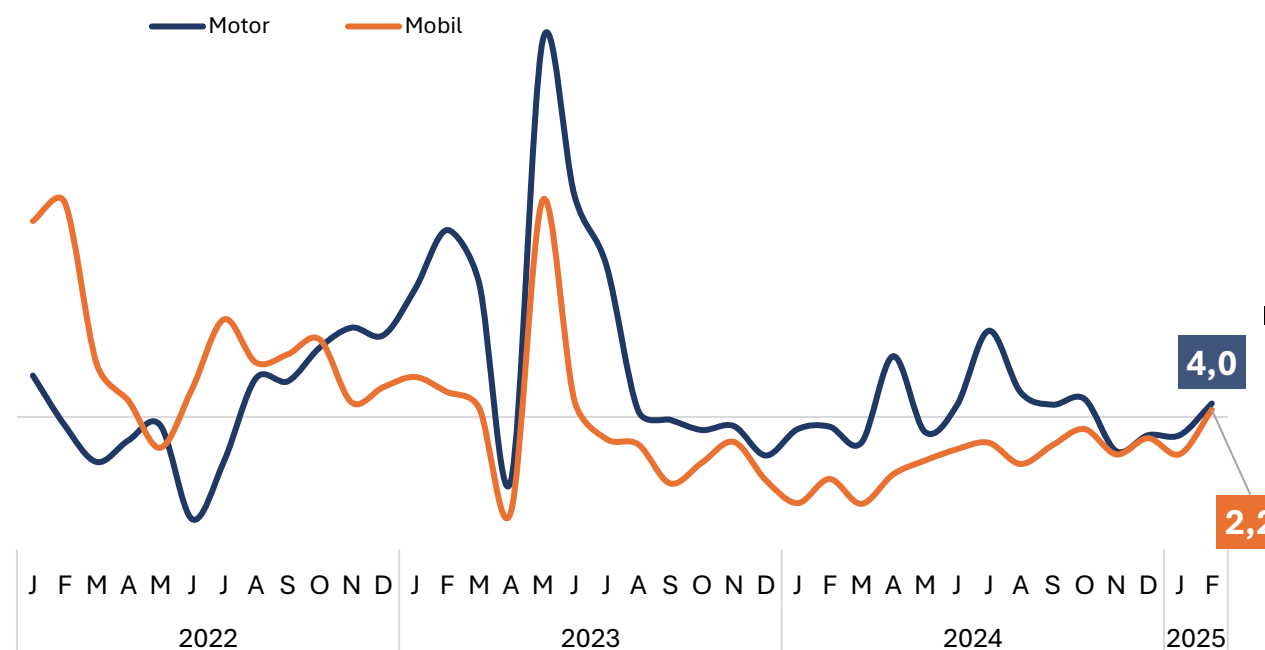
Kinerja PPN DN sejalan dengan tingkat konsumsi yang Terjaga.



PMI Indonesia melanjutkan tren penguatan, didorong permintaan khususnya sisi domestik (Februari, Index)



Penjualan kendaraan mulai tumbuh positif (Motor Mobil Februari, %YoY)

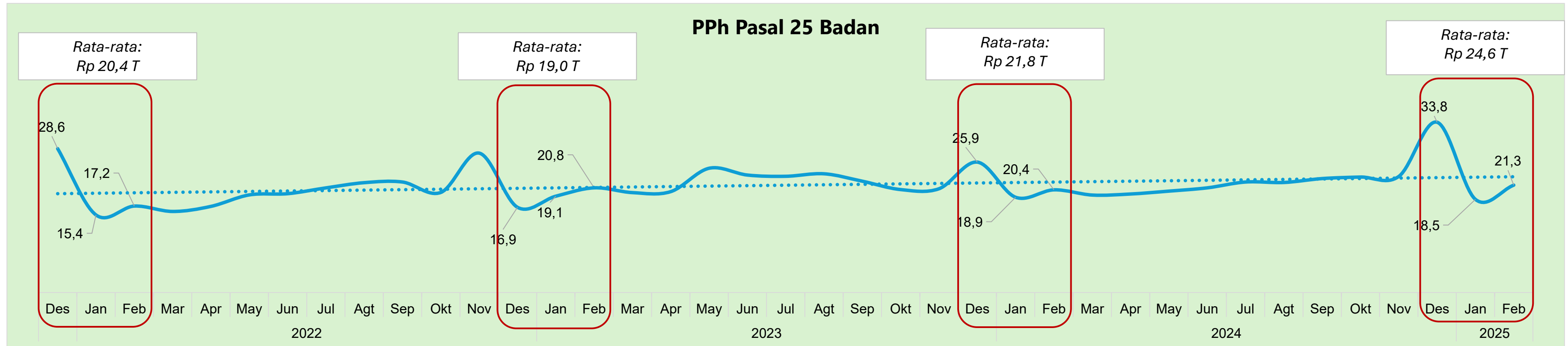


Sumber: Gaikindo, AISI

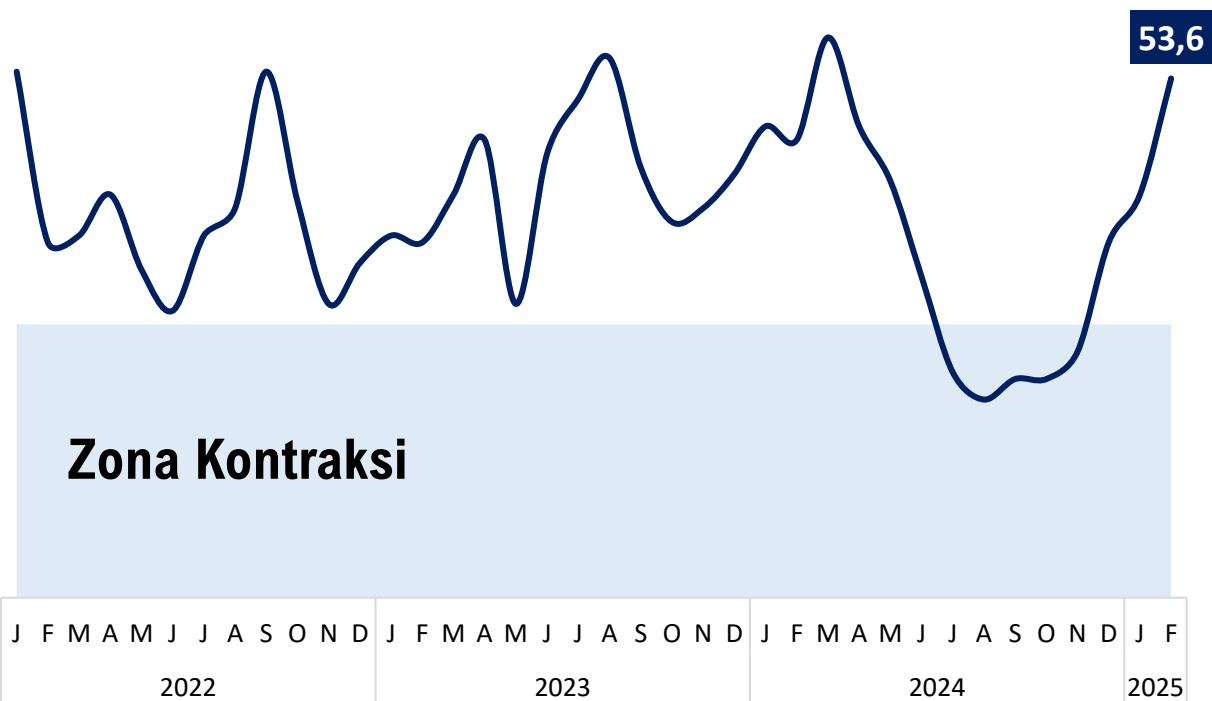
- **PPN Dalam Negeri mengikuti pola musiman** dimana bulan Januari menurun dibandingkan Desember tahun sebelumnya.
- Tahun 2025, diberikan kebijakan relaksasi pembayaran PPN DN selama 10 hari. Dengan demikian, PPN DN Januari dapat dibayarkan hingga 10 Maret 2025.
- Apabila dampak relaksasi diperhitungkan (dinormalisasi), rata-rata PPN DN periode Des-24 s.d. Feb-25 yaitu Rp69,5 T, masih lebih tinggi (tumbuh 8,3%) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
- Indeks PMI yang ekspansif dan perbaikan penjualan kendaraan bermotor menjadi landasan bagi peningkatan kinerja PPN DN pada periode mendatang.

PENERIMAAN PAJAK PER JENIS PAJAK YANG TERKAIT DENGAN AKTIVITAS EKONOMI

Kinerja PPh Pasal 25 Badan mencerminkan ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang positif.

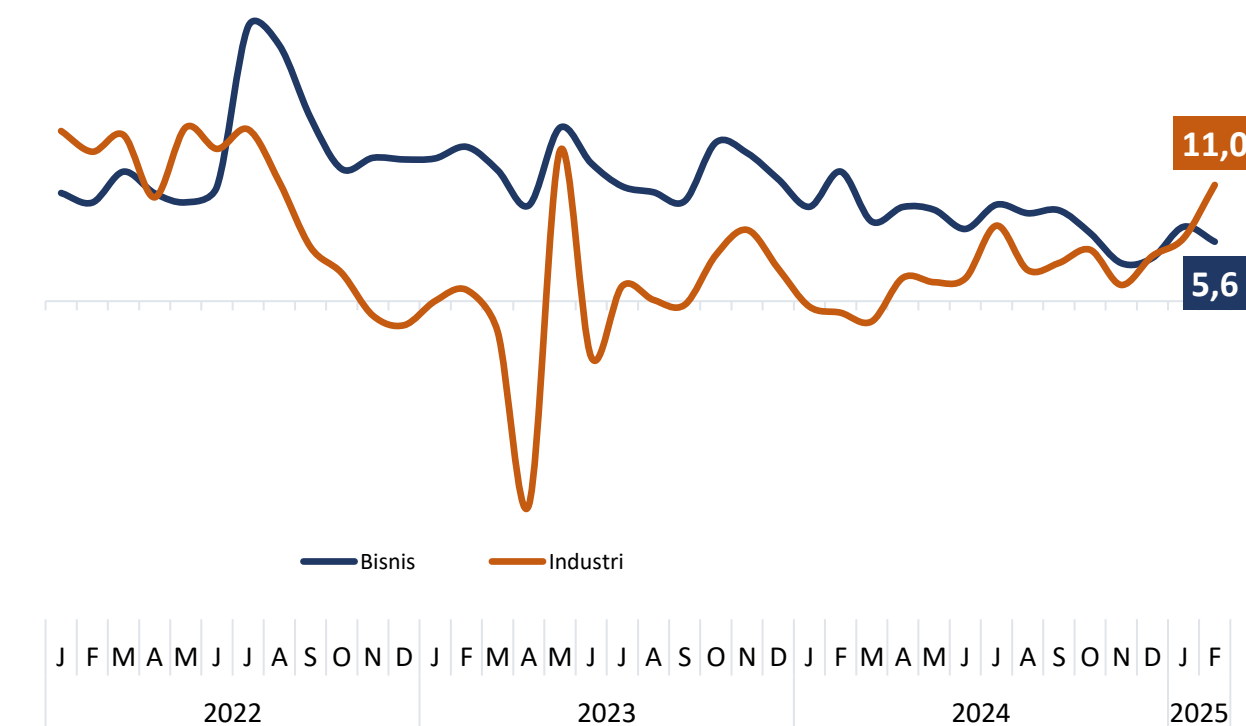


PMI Indonesia melanjutkan tren penguatan, didorong permintaan khususnya sisi domestik (Februari, Index)



Sumber: Bloomberg

Konsumsi listrik industri tumbuh menguat, sementara bisnis tetap tumbuh positif (Februari, % YoY)

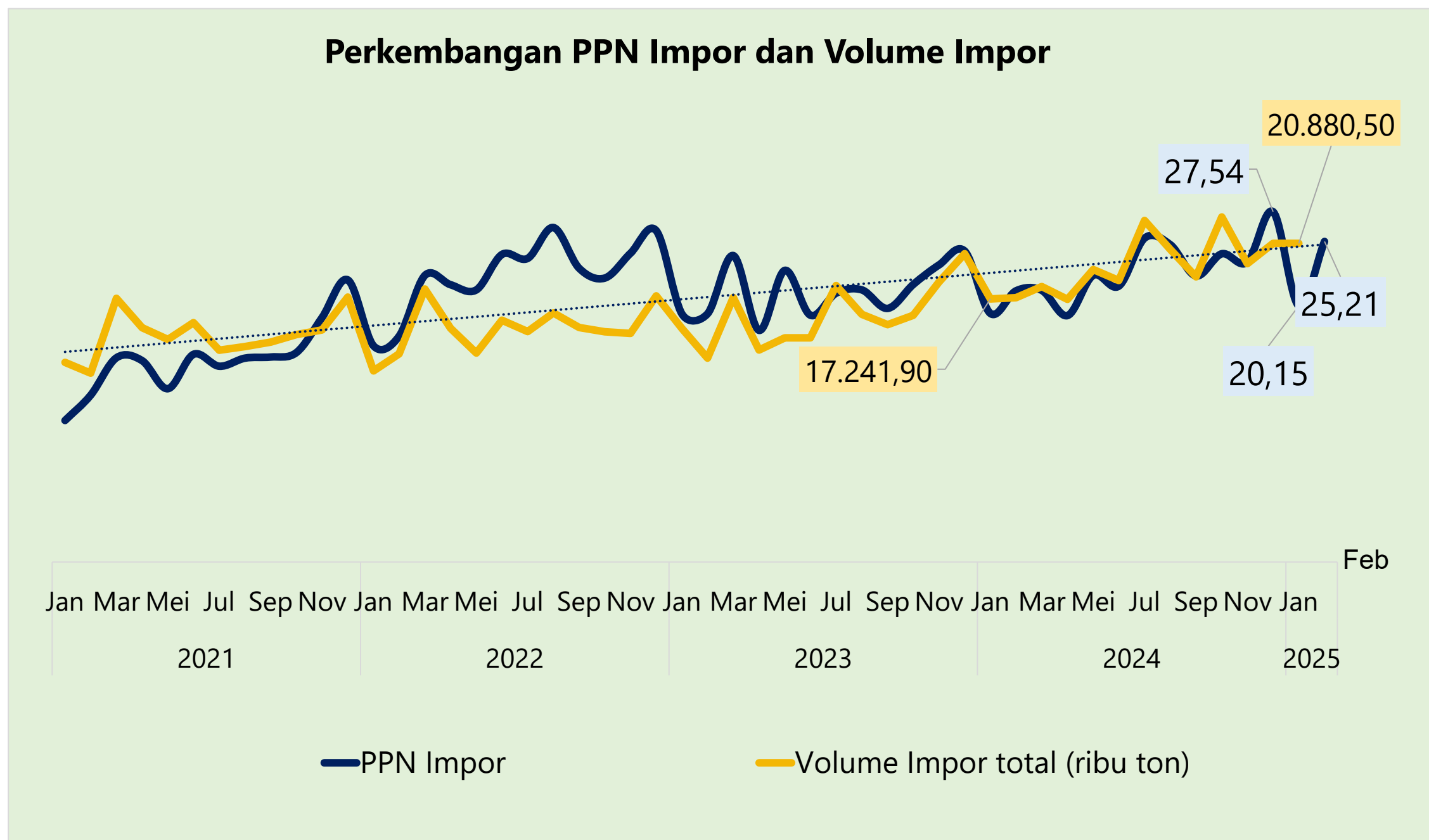


Sumber: PLN

- **Setoran PPh Pasal 25 Badan masih mengikuti pola normal**, meskipun ada sedikit perlambatan, seiring dengan harga beberapa komoditas yang melemah.
- Dengan PMI yang ekspansif dan konsumsi listrik bisnis dan industri yang tumbuh positif, diharapkan kondisi penerimaan akan membaik.

PENERIMAAN PAJAK PER JENIS PAJAK YANG TERKAIT DENGAN AKTIVITAS EKONOMI

PPN Impor tumbuh positif sejalan dengan pertumbuhan volume impor.



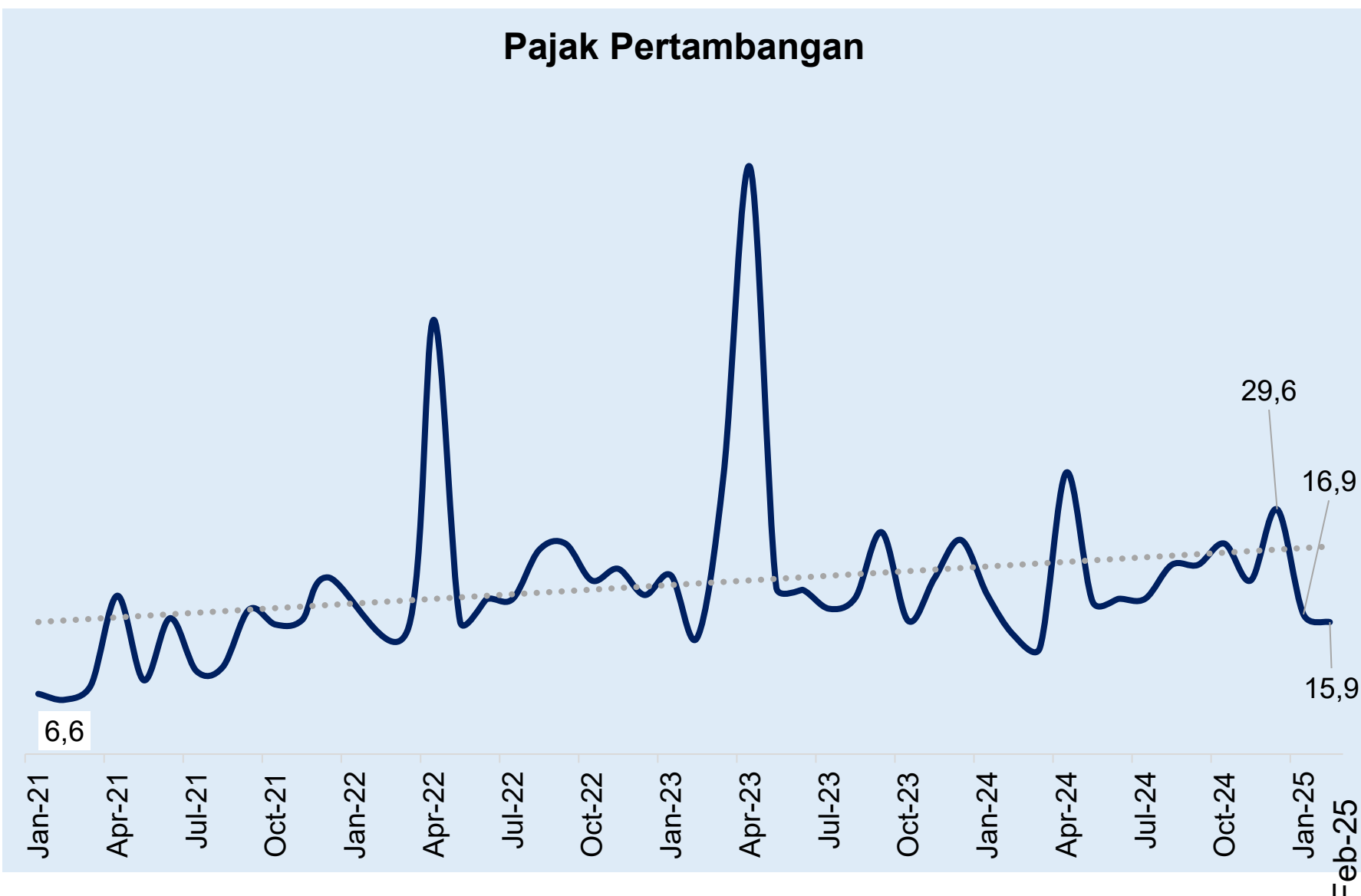
- **Realisasi PPN Impor** tumbuh positif sejalan dengan pertumbuhan volume impor migas dan non-migas sebesar 21,1% (yoy).
- Kinerja ini utamanya didukung oleh pertumbuhan Impor pada sektor Industri Pengolahan sebesar 12,5%, khususnya pada subsektor:
 - Industri Kendaraan bermotor;
 - Industri logam dasar;
 - Industri Kimia & Farmasi.

Sumber: Tabel Dinamis BPS , diakses 12 Maret 2025

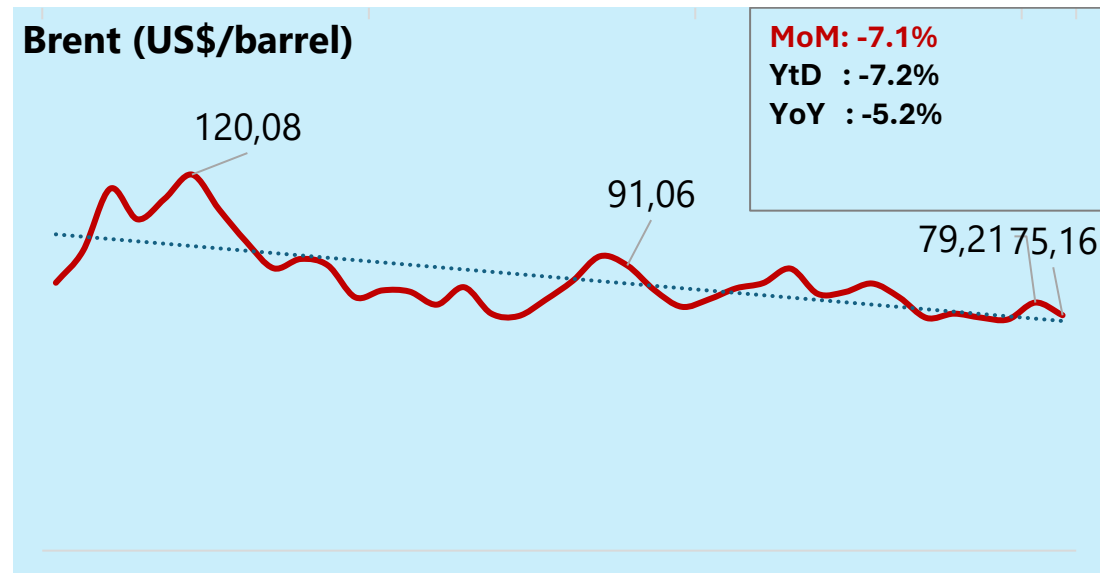
PENERIMAAN PAJAK SEKTOR USAHA DENGAN PENERIMAAN PAJAK TERBESAR

Kinerja sektor Pertambangan sejalan dengan moderasi harga komoditas.

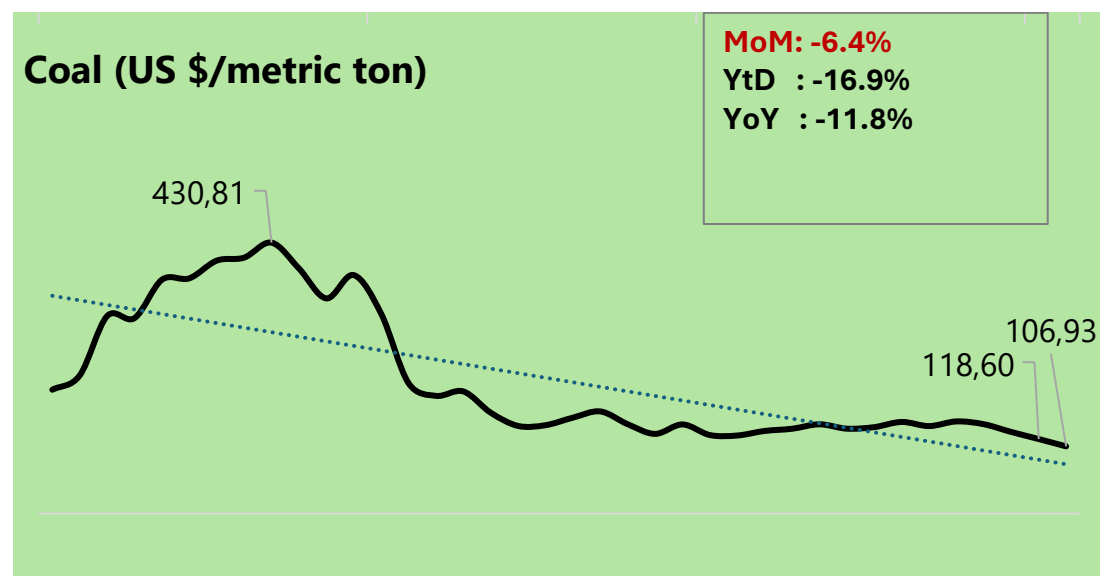
Pajak Pertambangan



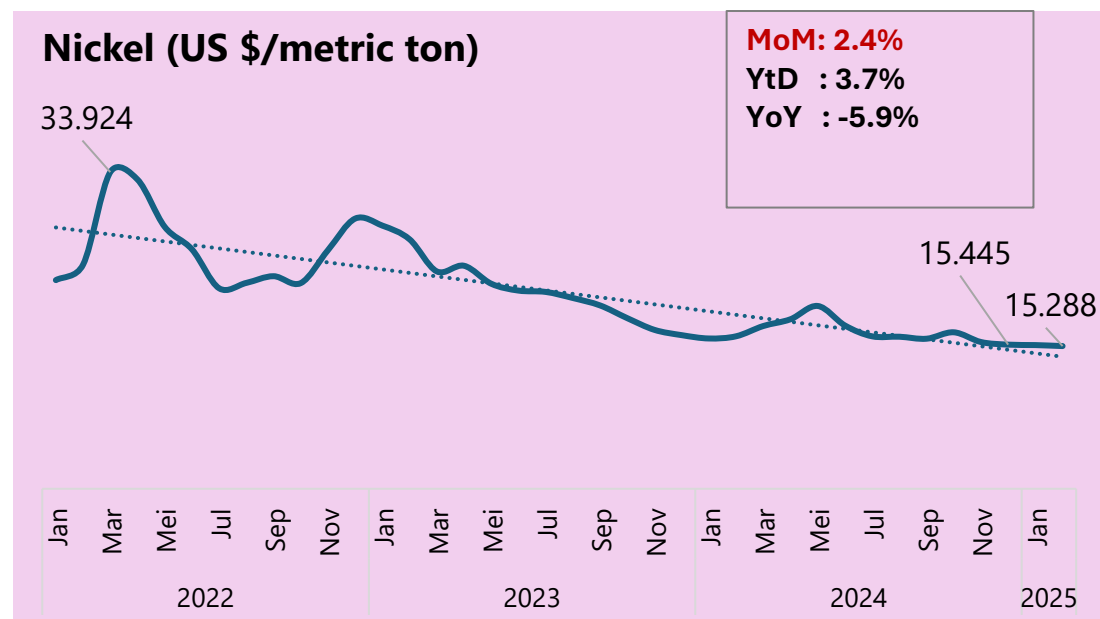
Brent (US\$/barrel)



Coal (US \$/metric ton)

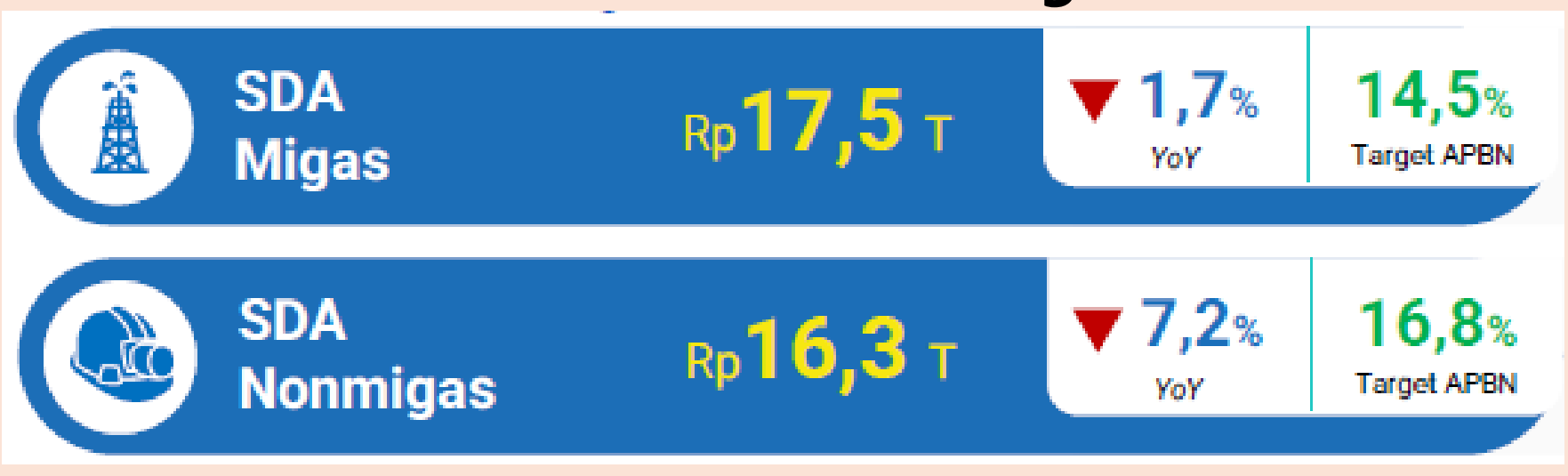


Nickel (US \$/metric ton)



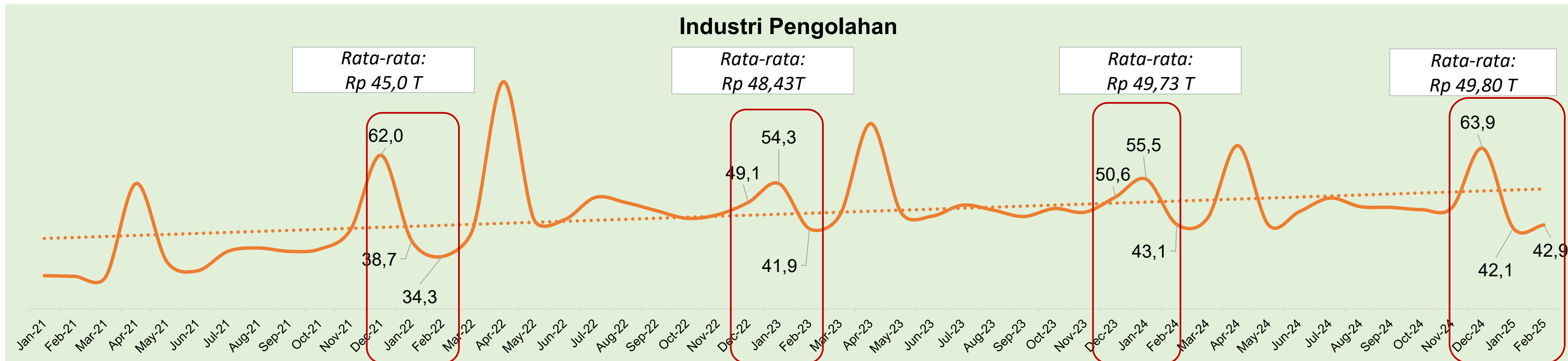
Sektor pertambangan masih mengalami koreksi harga pada Januari Februari melanjutkan tren penurunan harga sejak Oktober 2023, sehingga penerimaan negara pada sektor ini masih tertekan.

PNBP Pertambangan

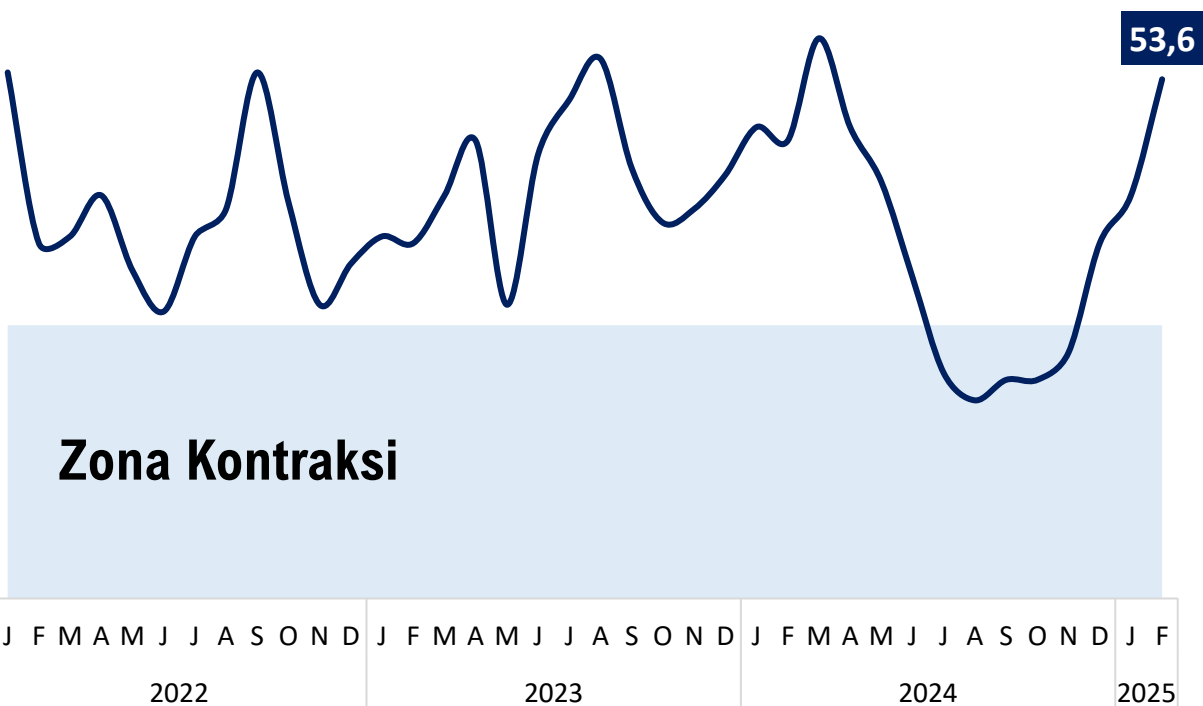


PENERIMAAN PAJAK SEKTOR USAHA DENGAN PENERIMAAN PAJAK TERBESAR

Kinerja sektor Industri Pengolahan sejalan dengan indeks PMI yang ekspansif.

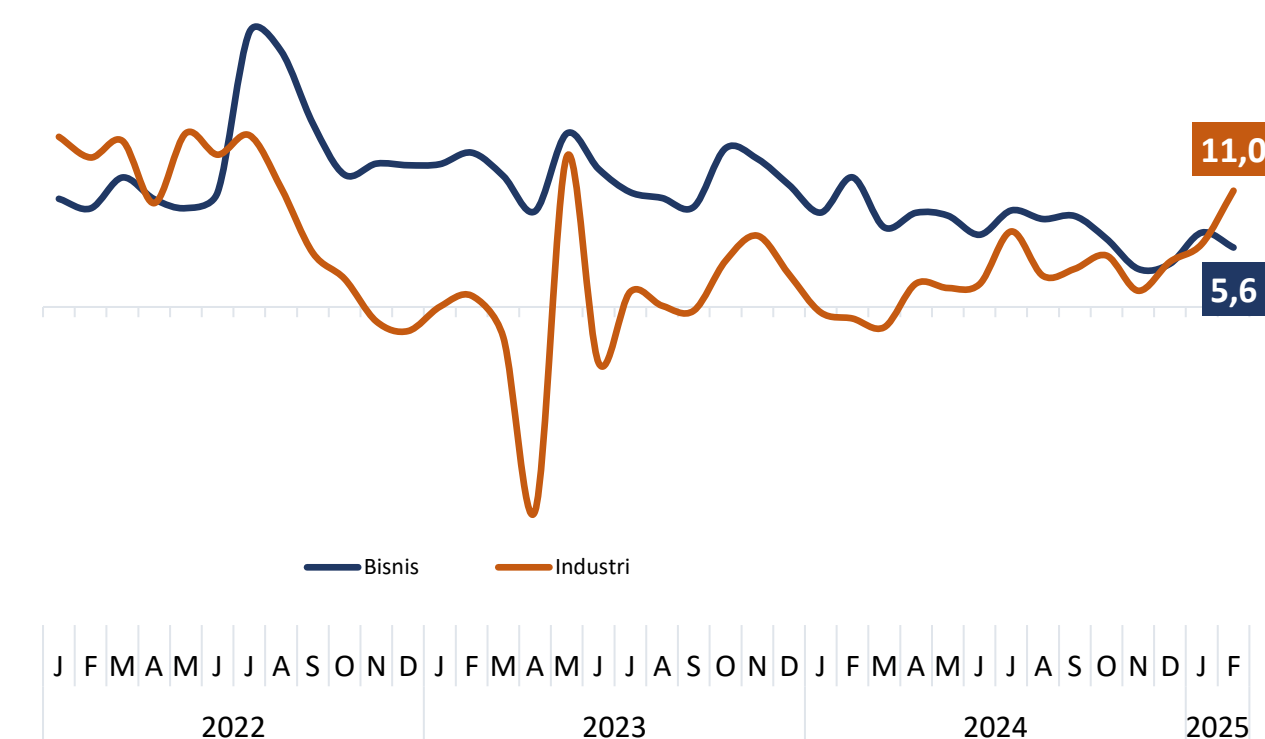


PMI Indonesia melanjutkan tren penguatan, didorong permintaan khususnya sisi domestik (Februari, Index)



Sumber: Bloomberg

Konsumsi listrik industri tumbuh menguat, sementara bisnis tetap tumbuh positif (Februari, % YoY)

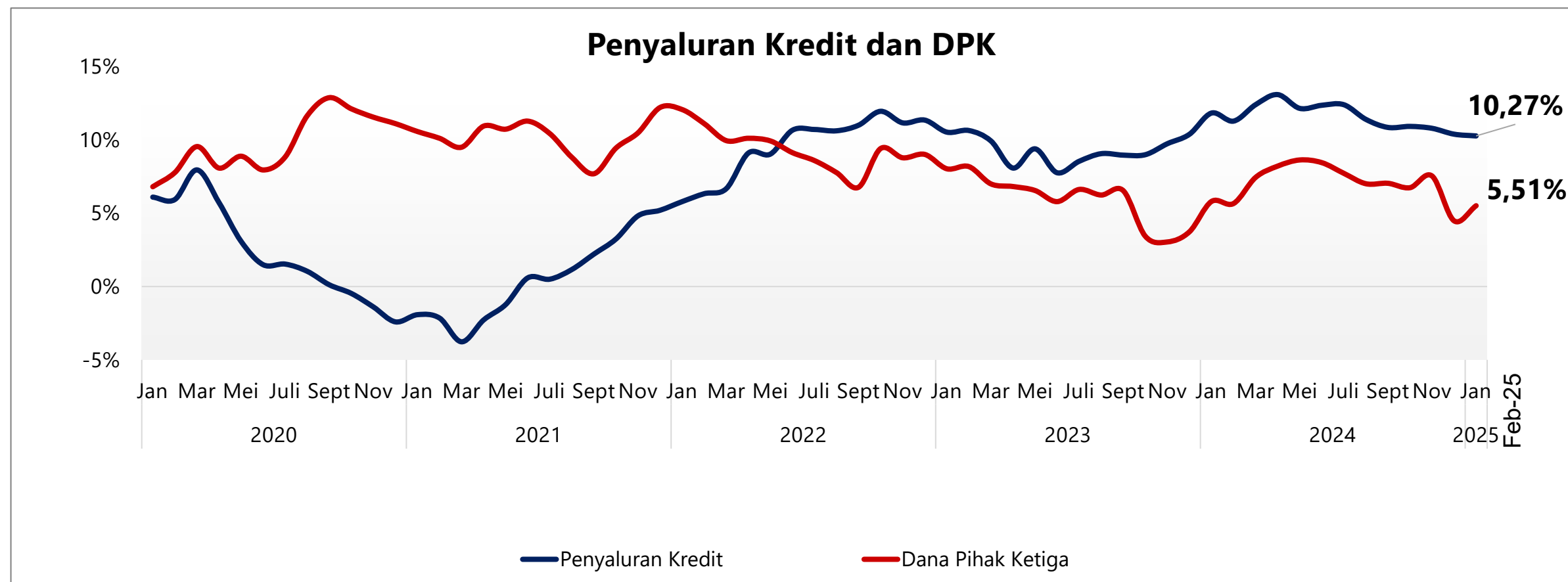
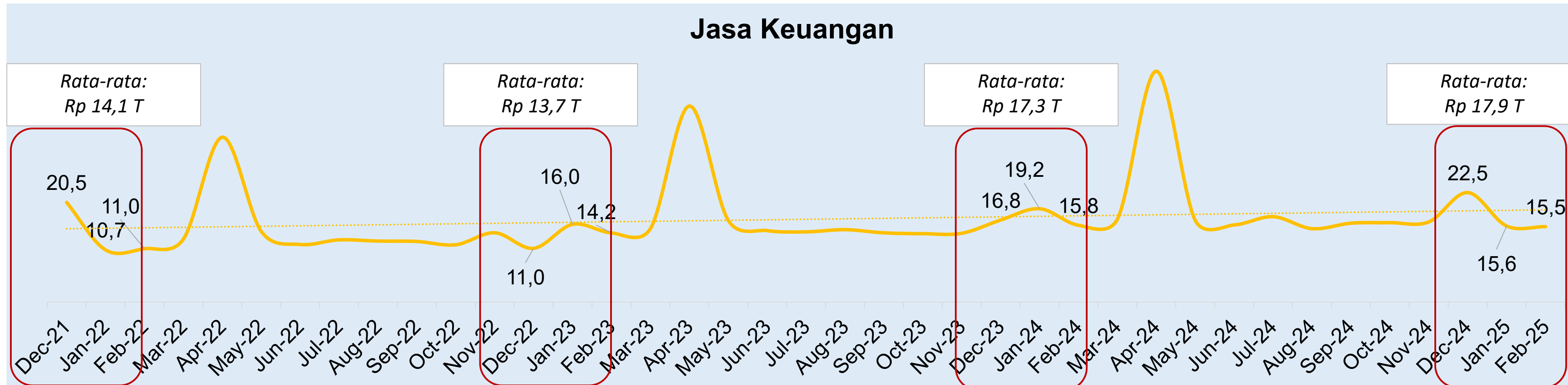


Sumber: PLN

Sektor industri pengolahan terus melanjutkan tren yang positif seiring dengan produksi barang manufaktur baik untuk dalam negeri serta PMI yang konsisten di zona ekspansif. Di samping itu, penggunaan Listrik sektor industri juga menunjukkan peningkatan.

PENERIMAAN PAJAK SEKTOR USAHA DENGAN PENERIMAAN PAJAK TERBESAR

Sektor Jasa Keuangan melanjutkan kinerja positif.



Sektor Jasa Keuangan menunjukkan kinerja jangka panjang yang positif sejalan dengan peningkatan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit perbankan.

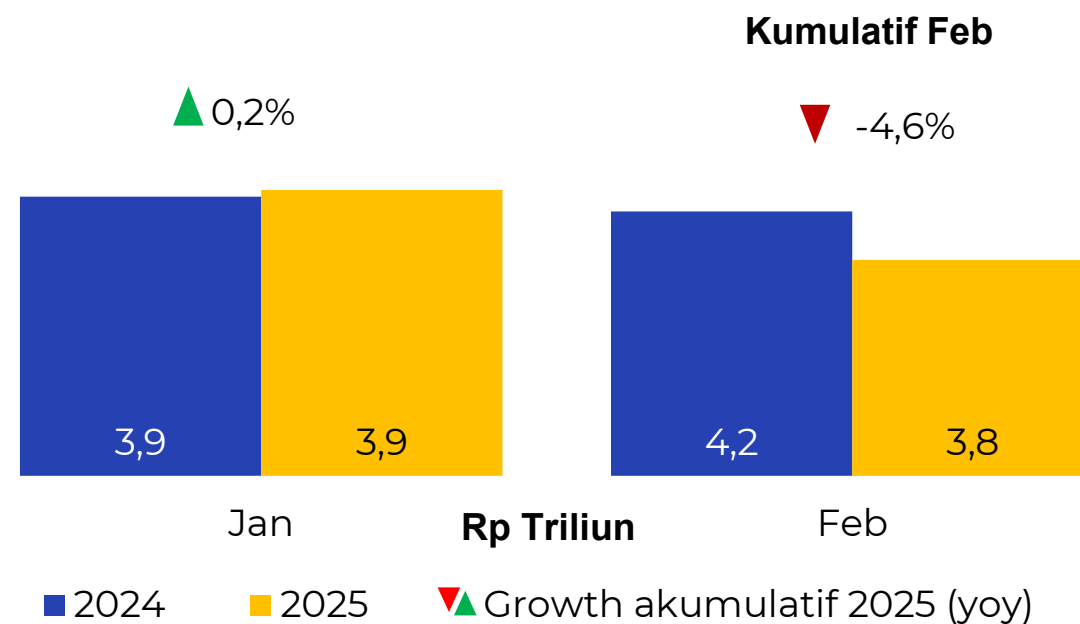
PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

mencapai Rp52,6 T (17,5% dari target APBN) atau tumbuh 2,1% didorong penerimaan Bea Keluar.



BEA MASUK

Rp 7,6T (4,6% yoy) 14,4% APBN



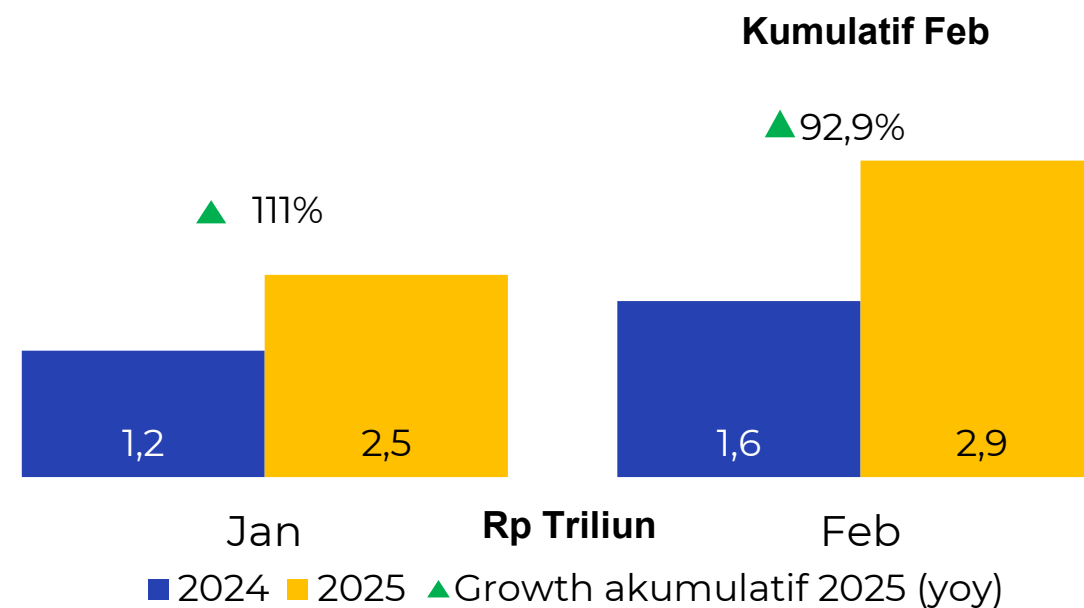
Penerimaan **BM** s.d. Februari 2025 sebesar **Rp7,6 T**, turun 4,6% dipengaruhi oleh:

- ✓ Nilai impor tahun 2025 sebesar USD36,94 M relatif sama dengan realisasi tahun 2024;
- ✓ Penurunan BM dari komoditas **beras** yang diawal tahun 2025 tidak diimpor lagi;
- ✓ Penguatan pelayanan dan pengawasan impor terus dilakukan untuk menjaga penerimaan.



BEA KELUAR

Rp 5,4T (92,9% yoy) 120% APBN



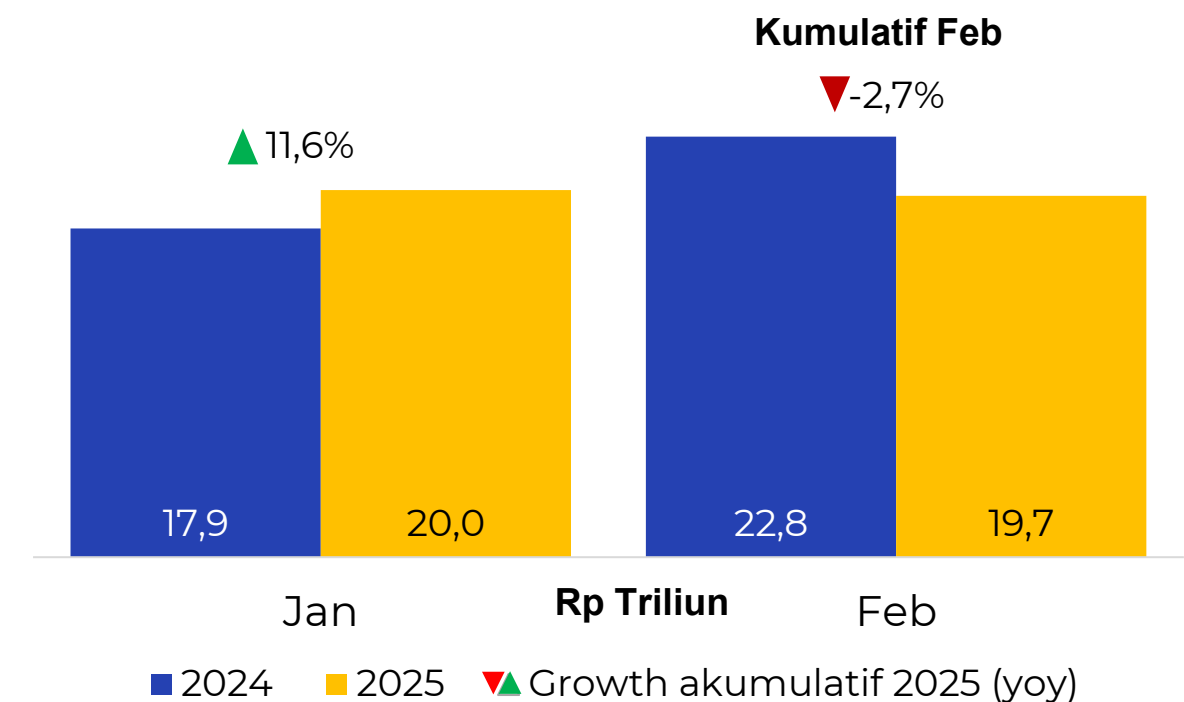
Penerimaan **BK** sd. Februari 2025 sebesar **Rp5,4 T**, naik 92,9%, dipengaruhi oleh:

- BK **produk sawit** mencapai Rp5,3 T, tumbuh 852,9% (yoy) dipengaruhi:
 - ✓ Harga CPO bulan Feb 2025 mencapai USD955/MT yang lebih tinggi 18,5% dari tahun 2024 sebesar USD806/MT;
 - ✓ Walaupun volume ekspor CPO turun 5,5%, utamanya ke India dan Belanda.
- BK Tembaga belum ada realisasinya sampai Februari 2025.



CUKAI

Rp 39,6T (2,7% yoy) 16,2% APBN



Penerimaan Cukai s.d. Februari 2025 sebesar Rp39,6 T, turun 2,7%, dipengaruhi oleh:

- ✓ Cukai HT sebesar Rp38,4 T, turun 2,6% dipengaruhi oleh turunnya produksi rokok bulan Nov & Des 2024 sebesar 5,2%, sebagai basis perhitungan penerimaan HT di bulan Jan & Feb 2025.
- ✓ Penurunan produksi rokok diakhir tahun 2024 dipengaruhi oleh tidak adanya kenaikan tarif CHT diawal tahun 2025.
- ✓ Cukai MMEA sebesar Rp1,1T, turun 7,6%, karena penurunan produksi MMEA sebesar 11,5%.

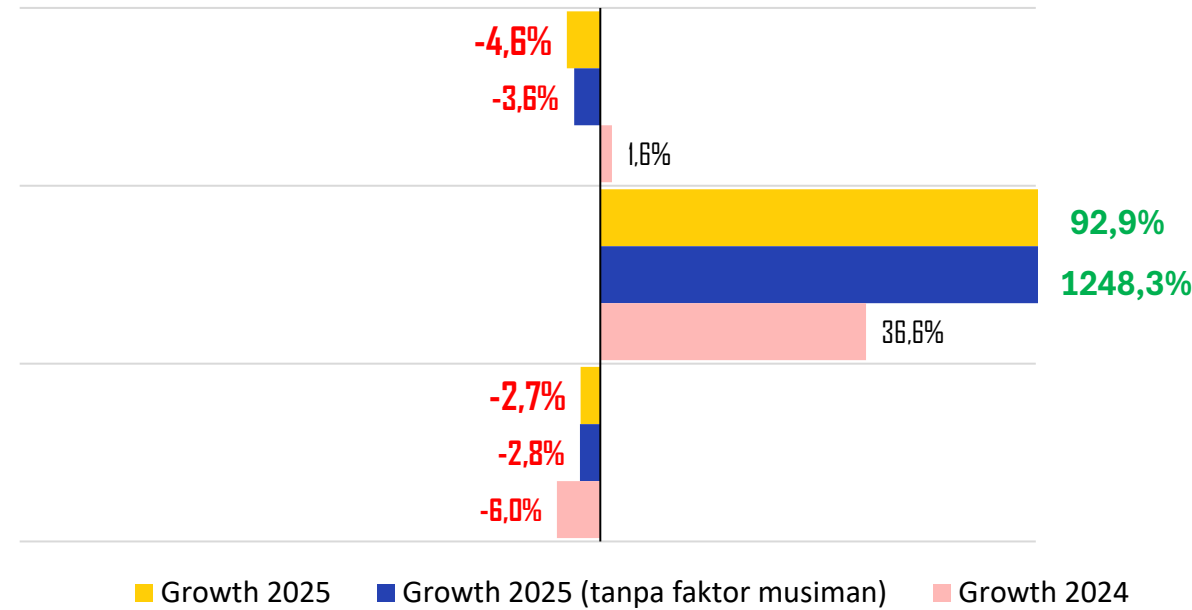
PERTUMBUHAN KUMULATIF PENERIMAAN BEA DAN CUKAI, SERTA IMPORTASI BERDASARKAN GOLONGAN BARANG PERUNTUKANNYA

Realisasi dan Share per Jenis Penerimaan



BEA MASUK	Rp7,6 T (share 14,5%)
BEA KELUAR	Rp5,4 T (share 10,2%)
CUKAI	Rp39,6 T (share 75,3%)

Pertumbuhan Kumulatif



Bea Masuk: turun **4,6%**, namun jika tanpa impor komoditas musiman, yaitu gula dan beras, penurunan BM **3,6%**.

Bea Keluar: tumbuh **92,9%**, namun jika tanpa relaksasi ekspor mineral di tahun 2024, penerimaan BK tumbuh **1.248,3%**.

Pertumbuhan impor bahan baku dan barang penolong 2025 naik sebesar **1,3%**, dan untuk barang modal naik **1,8%**. Pertumbuhan di atas mendorong peningkatan produksi dan industri dalam negeri.

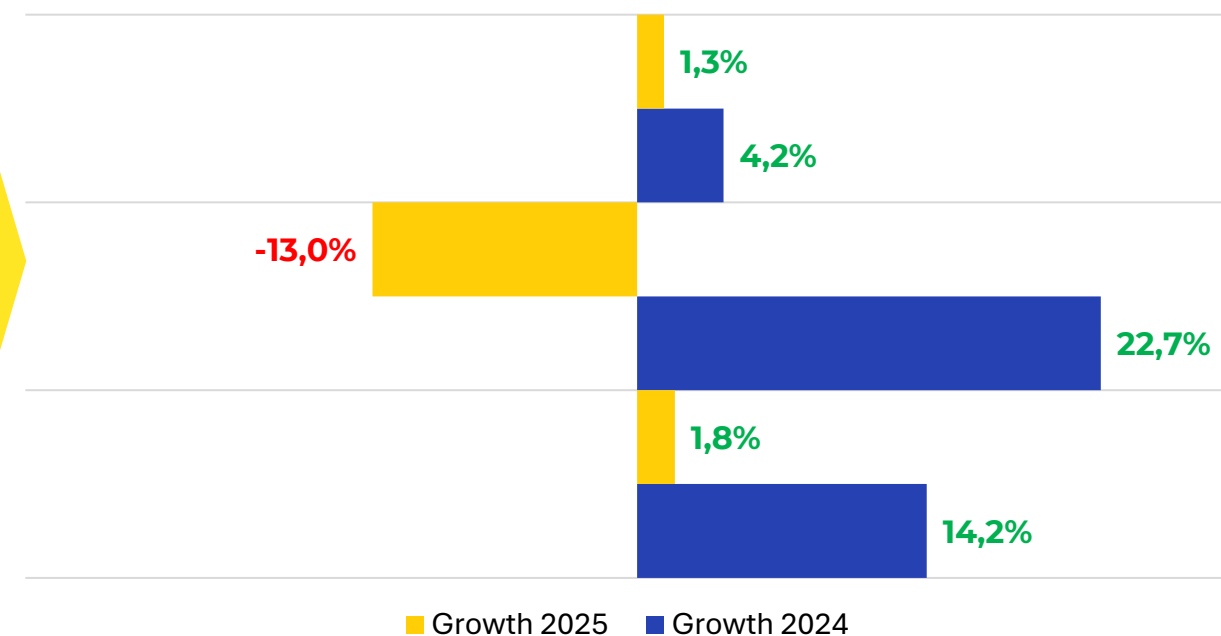
Pertumbuhan impor barang konsumsi 2025 turun **13,0%** dari tahun 2024 yang antara lain disebabkan oleh tidak adanya impor beras di awal tahun 2025.

Impor per Golongan Peruntukan

Bahan baku & barang penolong	USD27,1 M (share 73,4%)
Barang konsumsi	USD3,2 M (share 8,6%)
Barang modal	USD6,7 M (share 18,0%)

* Data sementara CEISA DJBC

Pertumbuhan Kumulatif



REALISASI PNBP

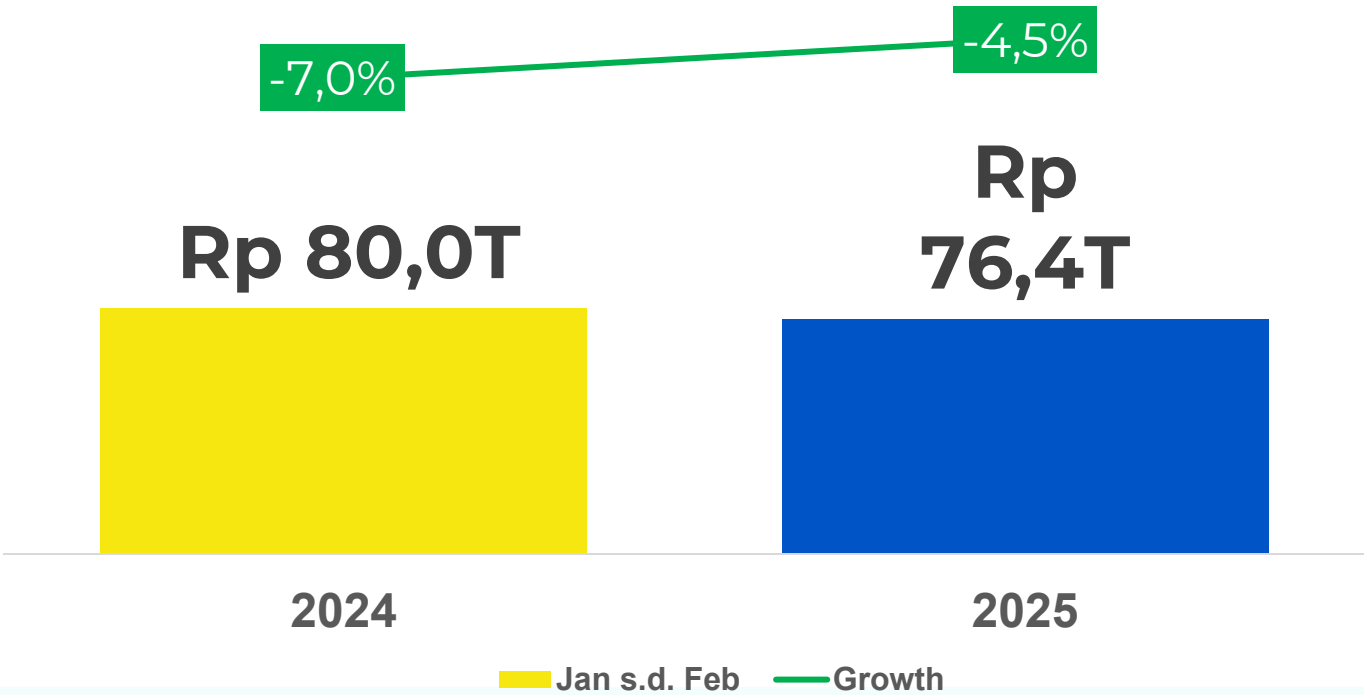
Hingga 28 Februari 2025 tetap terjaga baik
Mencapai

Rp76,4 T

Atau 14,9% dari Target APBN 2025

	SDA Migas	Rp17,5 T	▼ 1,7% YoY	15,5% Target APBN
	SDA Nonmigas	Rp16,3 T	▼ 7,2% YoY	16,8% Target APBN
	KND	Rp10,9 T	▲ 60,7% YoY	12,1% Target APBN
	PNBP Lainnya	Rp23,3 T	▼ 16,0% YoY	18,3% Target APBN
	BLU	Rp8,4 T	▼ 16,9% YoY	10,8% Target APBN

Realisasi dan Pertumbuhan Kumulatif



Realisasi PNBP Januari hingga Februari 2025 utamanya dipengaruhi beberapa faktor:

- **PNBP SDA Migas** berkontraksi terutama dipengaruhi penurunan ICP serta *lifting* gas bumi akibat penyusutan produksi alamiah.
- **PNBP SDA Nonmigas** berkontraksi terutama dipengaruhi penurunan harga dan produksi batubara.
- **PNBP KND** tumbuh karena adanya peningkatan setoran dividen interim dari BUMN Perbankan.
- **PNBP Lainnya** berkontraksi terutama karena penurunan Penjualan Hasil Tambang akibat turunnya harga komoditas dan produksi batubara, serta penurunan PNBP Kementerian/Lembaga.
- **PNBP BLU** berkontraksi terutama dipengaruhi penurunan tarif pungutan ekspor kelapa sawit.

INISIATIF STRATEGIS UNTUK OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA

Kenaikan *Revenue Ratio* dijalankan melalui 4 (empat) **Inisiatif Strategis** yang akan dijalankan pada periode 2025 dengan 4 (empat) **Aspek Kolaborasi** (**Sistem, Big Data, Regulasi, dan Proses Bisnis**) antar unit Kemenkeu.

Aspek Kolaborasi

- 1. Sistem.** Interoperabilitas Sistem/IT antar *Core Revenue System* dengan *Core System* K/L/D/I terkait;
- 2. Pemanfaatan BIG data** dalam optimalisasi penerimaan industri dan SDA;
- 3. Regulasi.** Harmonisasi Regulasi, Kebijakan, dan Strategi Pengamanan Penerimaan; dan
- 4. Proses Bisnis.** Sinkronisasi Proses Bisnis Hulu Hilir Sektor Prioritas dengan Fungsi Pengawasan Penerimaan Kemenkeu.

Inisiatif Strategis

1. Transformasi *Joint Program Sinergi Penerimaan*, a.l. :

- Analisis
- Pengawasan
- Pemeriksaan
- Penagihan
- Intelijen

2. Perpajakan Transaksi Digital DN dan LN

3. Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA (Batubara, Nikel, Timah, Bauksit dan Satgas Sawit)

4. Intensifikasi PNB K/L Layanan Premium





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pembiayaan

www.kemenkeu.go.id/apbnkita



FITCH MENGAFIRMASI *CREDIT RATING* INDONESIA BBB *OUTLOOK STABLE*

<i>Rating Agency</i>	<i>Sovereign Rating</i>	<i>Outlook</i>	<i>Rilis Assessment</i>
Fitch	BBB	Stable	11 Maret 2025
R&I	BBB+	Positive	30 September 2024
S&P	BBB	Stable	30 Juli 2024
Moody's	Baa2	Stable	16 April 2024
JCRA	BBB+	Stable	25 Maret 2024



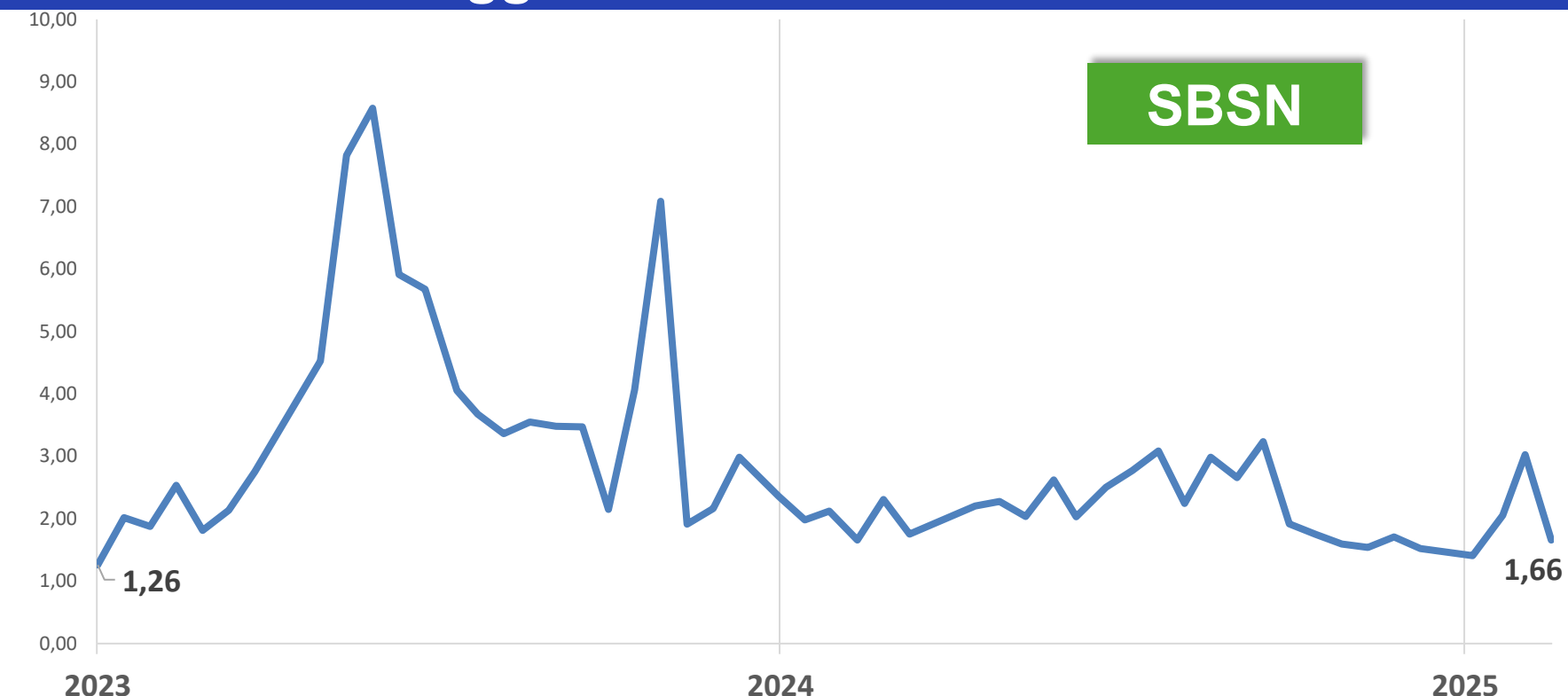
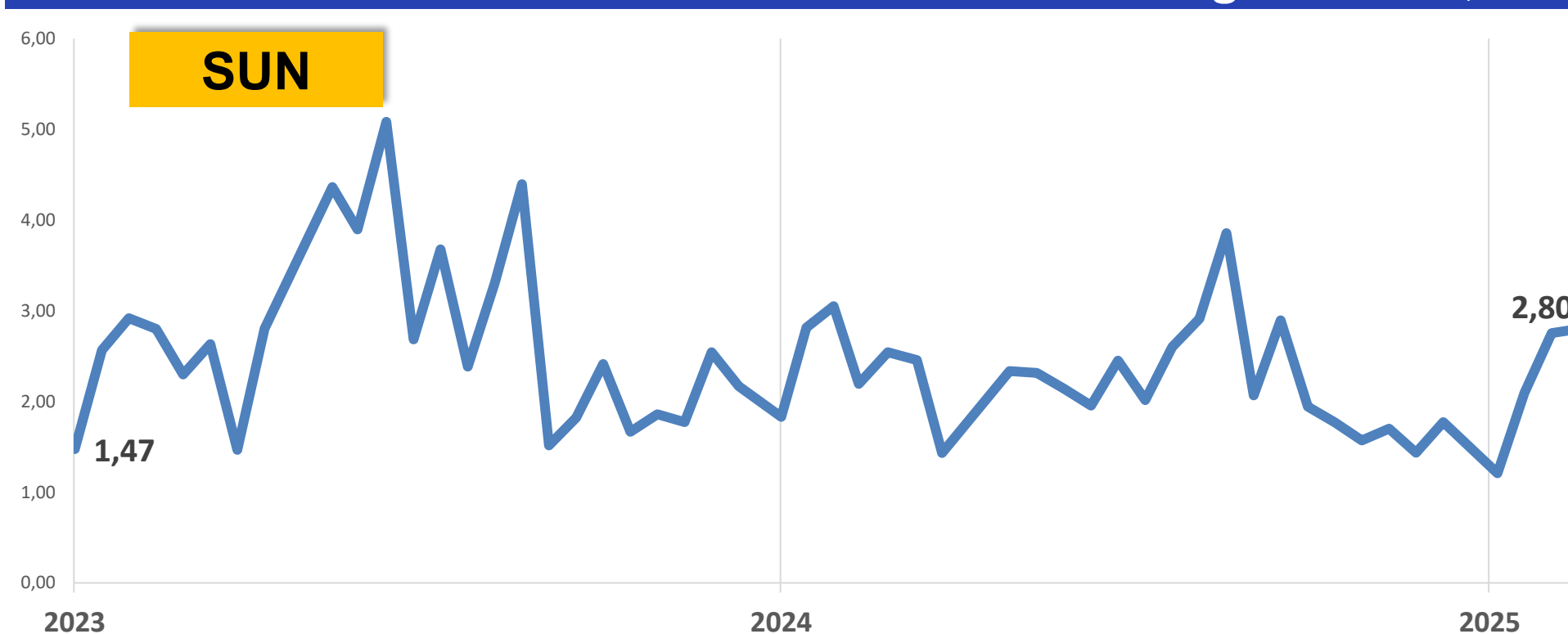
Fitch mempertahankan peringkat Sovereign Credit Rating Indonesia BBB outlook stable (11 Maret 2025).

Afirmasi Fitch Ratings a.l. didukung oleh:

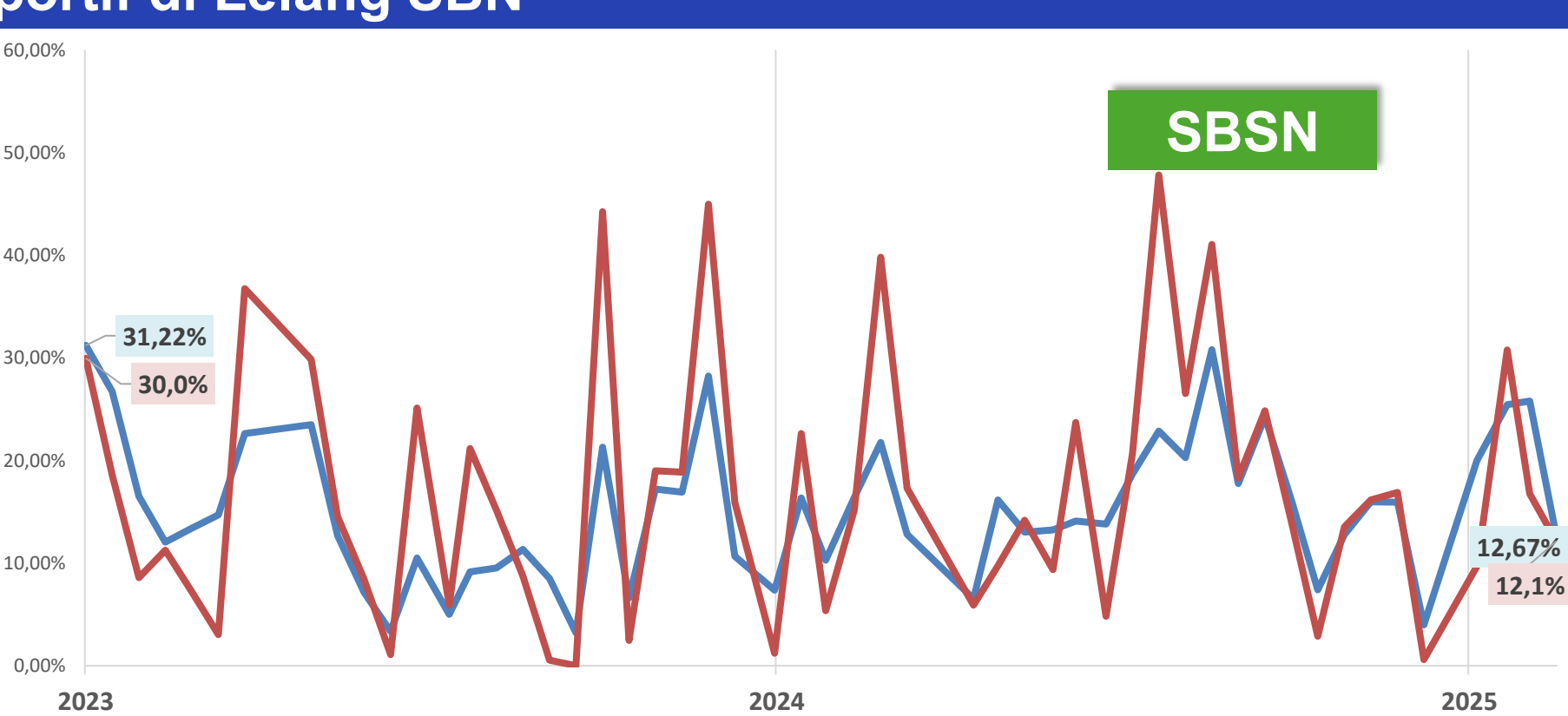
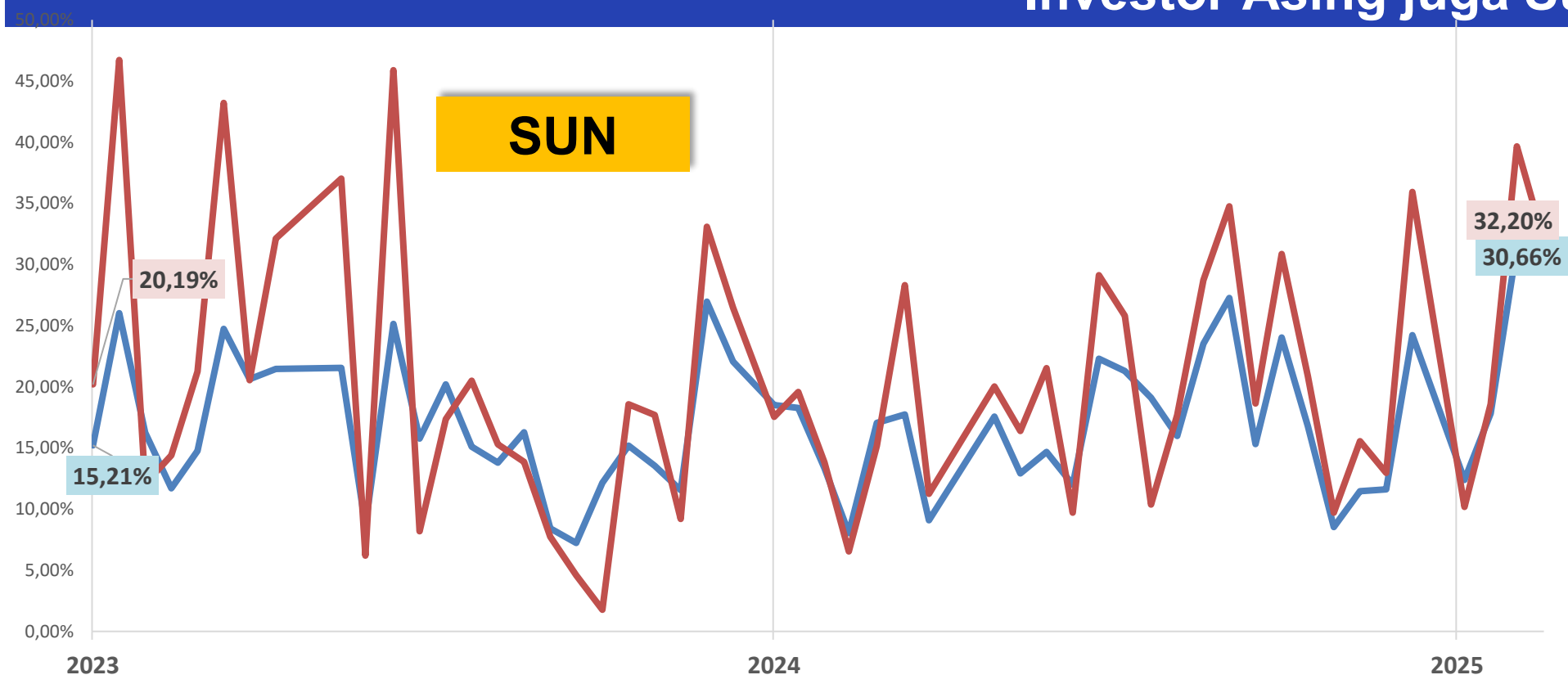
- Stabilitas ekonomi dan terjaganya rasio utang Pemerintah
- Prospek pertumbuhan PDB Riil yang masih tinggi
- Rasio utang/GDP yg relatif rendah dan konsistensi disiplin fiskal
- Peningkatan cadangan devisa
- Program hilirisasi yang berkelanjutan
- Tingkat inflasi yang terkendala
- Transisi pemerintahan berjalan *smooth* dan damai

DI TENGAH DINAMIKA GLOBAL, PERFORMA LELANG SBN (PRIMARY MARKET) HINGGA FEBRUARI SOLID

Incoming Bid kuat, Bid to Cover Ratio tinggi



Investor Asing juga Suportif di Lelang SBN



YIELD SBN STABIL, SPREAD TERHADAP UST CUKUP RENDAH DIBANDINGKAN PEERS

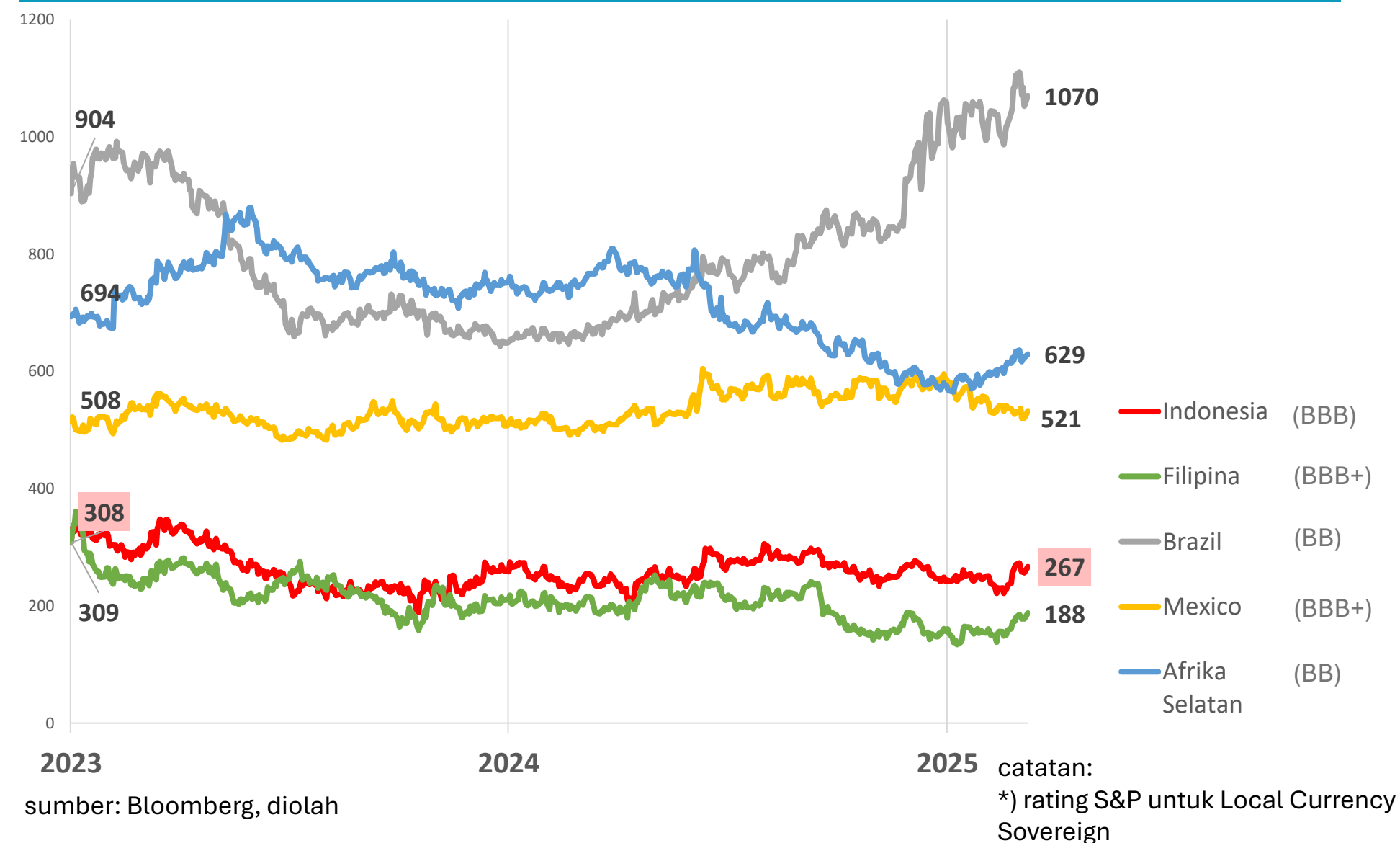
Perkembangan *yield* SUN 10y
dari Januari 2023 – 12 Maret 2025



- *Yield* SBN tenor 10 tahun saat ini berada di level 6,87% atau **turun 15 bps** secara *year to date*.

sumber: PHEI, diolah

Perkembangan Spread dan perbandingannya dengan Peers
dari Januari 2023 – 12 Maret 2025

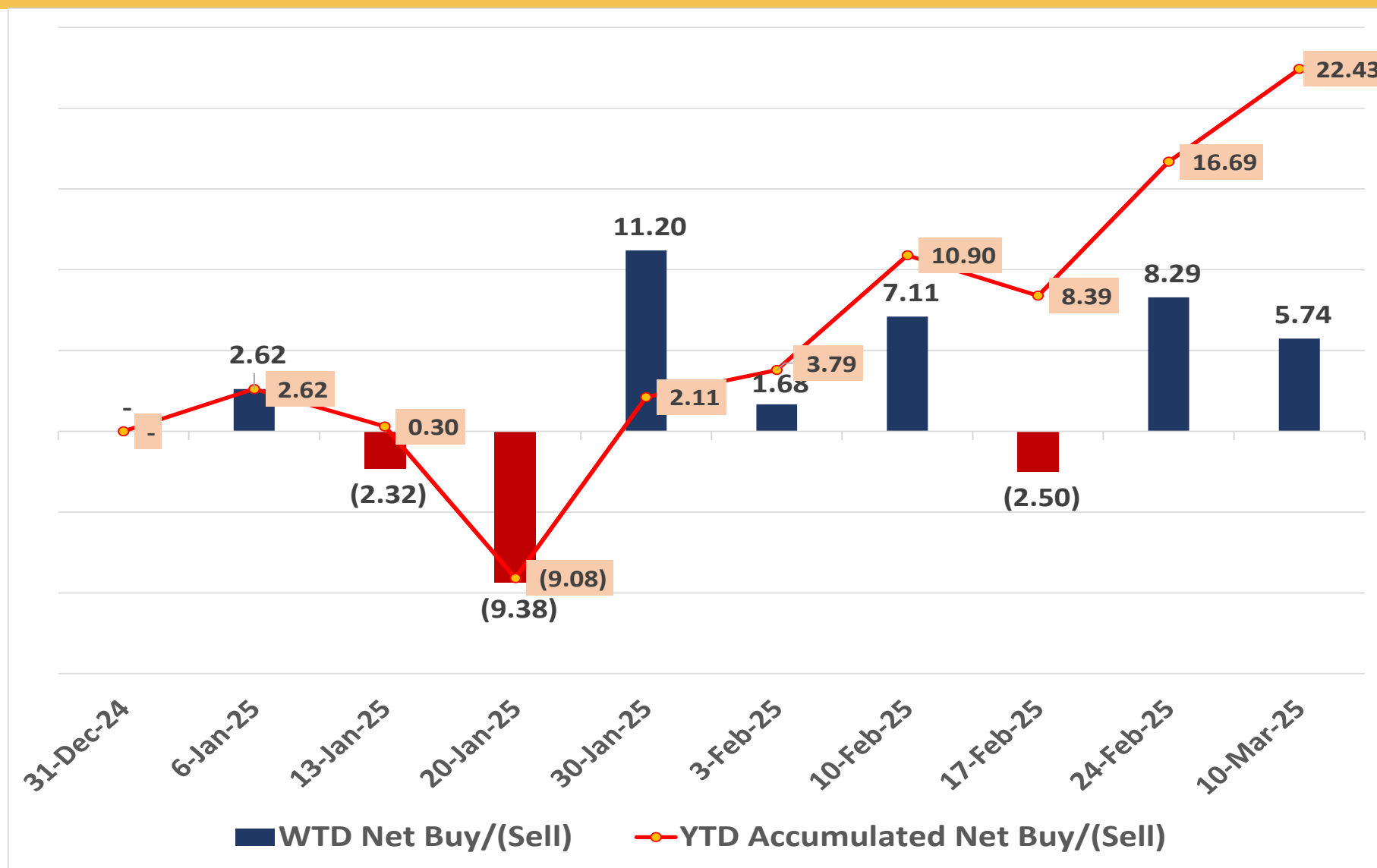


- *Spread yield* SBN 10 tahun terhadap *yield* US Treasury 10 tahun saat ini sebesar 267 bps.

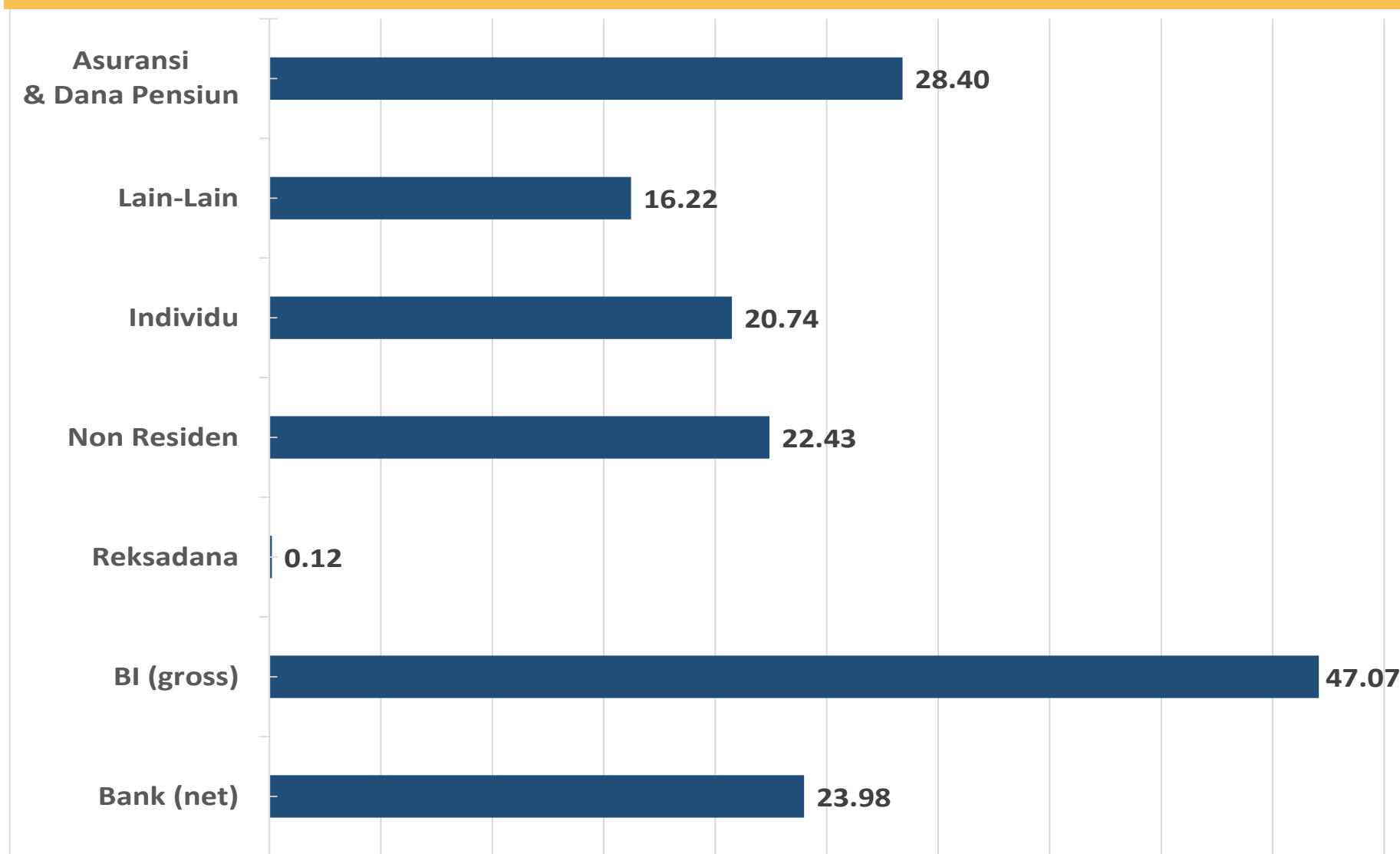
INVESTOR ASING DI PASAR SBN MENCATATKAN *INFLOW* YTD

Rp22,43 T

Posisi Net buy/sell Non Residen (Rp Triliun)



Posisi Net buy/sell per tipe investor (Rp Triliun)



- Sampai 10 Maret 2025, secara YTD Non Residen masih mencatatkan **NET BUY** sebesar Rp22,43 T.
- Sinergi antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam penerbitan SBN dilakukan dengan prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang pruden serta menjaga disiplin dan integritas pasar (*market discipline and integrity*). Pembelian SBN oleh BI di pasar sekunder dilakukan sesuai dengan strategi dan kebutuhan operasi moneter BI.

KINERJA PENERBITAN SBN RITEL - ORI027

	ORI027-T3	ORI027-T6
 Masa Penawaran	27 Januari – 20 Februari 2025	
 Tenor	3 tahun (jatuh tempo, 15 Feb 2028)	6 tahun (jatuh tempo, 15 Feb 2031)
 Kupon	6,65%	6,75%
 Nominal Penjualan	Rp37,36 triliun	Rp32,97 triliun
 Total Investor	86.624 investor	76.866 investor (89% dari total investor)
 Rata-rata Pemesanan per Investor	Rp431,3 juta	Rp428,9 juta
 Jumlah Investor Baru	25.087 investor	4.210 investor



- **Rp37,4 tn** - Nominal pemesanan terbesar dalam penerbitan SBN ritel.
- **86.624 investor** - Investor terbanyak dalam satu penerbitan SBN ritel.
- **46%** investor berasal dari kelompok generasi milenial, **32%** kelompok Gen X.

PEMBIAYAAN ANGGARAN Rp220,1 T

Realisasi per 28 Februari 2025.

Realisasi Pembiayaan Anggaran Per **28 Februari 2025**
mencapai Rp220,1 T. (35,7% dari APBN)

PEMBIAYAAN ANGGARAN (triliun rupiah)		2024			2025		
		Perpres 76/2023	Real s.d. 28 Feb	% thd APBN	APBN	Real s.d. 28 Feb	% thd APBN
1. Pembiayaan Utang		648,1	184,9	28,5	775,9	224,3	28,9
	a. SBN (Neto)	666,4	177,9	26,7	642,6	238,8	37,2
	b. Pinjaman (Neto)	(18,4)	7,0	(38,0)	133,3	(14,4)	(10,8)
2. Pembiayaan Non utang		(125,2)	0,1	(0,1)	(159,7)	(4,3)	2,7
Jumlah		522,8	185,0	35,4	616,2	220,1	35,7

- ❖ Pembiayaan APBN 2025 dikelola secara *prudent* dan terukur serta mempertimbangkan efisiensi anggaran dan dinamika pasar keuangan.
- ❖ Pemenuhan target pembiayaan berjalan *on-track*, dengan menjaga *cost of fund* yang efisien dan risiko yang termitigasi.

PEMBIAYAAN INVESTASI 2025

Untuk Mendukung Program-Program Prioritas Presiden.



Visi

Bersama Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas 2045



Ketahanan Pangan



Kemakmuran dan Nilai Tukar Petani



Program Perumahan bagi MBR (FLPP) untuk mendukung Program 3 Juta Rumah

Pembiayaan Investasi , a.l.:

- **BULOG**
- **AGRINAS**

- **BP Tapera**
- **PT SMF**



Untuk Mendukung Pengadaan dan Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah, sebesar **Rp16,6 Triliun**

Melindungi petani



**Membeli
Gabah dan
Beras**

BULOG
Menjaga Stok
Beras (3 juta
Ton)

**Operasi Pasar
dengan harga
terjangkau**

Stabilisasi Harga



*SPHP Rp12.750
(rata-rata
tertimbang)



Bantuan
Pangan :
Rp9.000/kg
untuk MBR



**Petani
Sejahtera
& NTP naik**



**Inflasi
pangan
terjaga
(3% - 5%)**

*Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)

Untuk Mendukung Ketahanan Pangan, Kemakmuran, dan Nilai Tukar Petani Indonesia

(Rencana Alokasi PMN ke 3 BUMN Agrinas)

Sub Sektor Perikanan



PT Agrinas Jaladri Nusantara
untuk Kegiatan tambak budidaya dan
kegiatan perikanan tangkap

Sub Sektor Pangan



PT Agrinas Pangan Nusantara
untuk Pengelolaan Kawasan Sentra
Produksi Pangan (KSPP)

Sub Sektor Perkebunan



PT Agrinas Palma Nusantara
untuk Program revitalisasi lahan
dan pengelolaan perkebunan kelapa
sawit

PEMBIAYAAN INVESTASI 2025

Untuk Penyediaan Rumah Layak dan Terjangkau bagi MBR serta **Mendukung Program 3 Juta Rumah**.

Pendanaan FLPP disalurkan dengan porsi 75 (BP Tapera) : 25 (PT SMF/Perbankan).
S.d. **28 Februari 2025** telah cair **Rp6 T** ke BP Tapera dari alokasi TA 2025 **Rp18,77 T**.



Total Penyaluran Dana FLPP : **Rp151,22 T**

- DIPA sejak tahun 2010 hingga 2024 : Rp116,27 T
- Penggunaan Pengembalian Pokok: Rp34,95T

1. Total penyaluran dari 2010 s.d. 2024 sebanyak **1.598.879 unit**.
2. Total penyaluran 2025 s.d. 28 Februari 2025 sebanyak **11.430 unit** senilai **Rp1,4 triliun** di **296 kab/kota**.
3. Direncanakan **tambahan alokasi untuk FLPP guna mendukung program 3 juta rumah**.
4. Kontribusi Program FLPP antara lain: **peningkatan akses pembiayaan** pada rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan, peningkatan **penyerapan tenaga kerja**, peningkatan **PDB**, dan peningkatan **investasi**.



PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk mendukung pendanaan porsi 25% FLPP

Total PMN pada PT SMF : **Rp11,22 T**

(DIPA sejak tahun 2017 hingga 2024)

Terhadap PMN tersebut, PT SMF melakukan **leveraging (blended finance)** melalui penerbitan Surat Utang s.d. 2024 senilai **Rp15,36 T**.

Dengan adanya PMN, PT SMF mendukung penyediaan pendanaan bagi perbankan penyalur KPR FLPP dengan **rate kepada MBR sebesar 5%**.

PEMBIAYAAN INVESTASI 2025

Untuk Mendukung Program-Program Prioritas Presiden.



Mendukung visi misi Presiden sesuai Asta Cita ke-5 ***"Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri."***

UU Nomor 1 Tahun 2025 &
PP 10 Tahun 2025

Meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain

Sepenuhnya dimiliki Pemerintah Republik Indonesia



Sinergi Kemenkeu dan KBUMN
untuk Danantara

Modal Badan Paling sedikit Rp1.000T
(dapat dilakukan penambahan melalui penyertaan modal negara dan/atau sumber lain)



Penyertaan Modal Negara (PMN) a.l.:
Saham milik Negara pada BUMN & Dana Tunai

KESIMPULAN



Kondisi geopolitik, geoekonomi, perang dagang menjadi ancaman besar 2025. Suku bunga masih akan tinggi, inflasi global juga tinggi, pertumbuhan global akan terkoreksi.



Indonesia harus tetap *agile* dan resilien. Sektor riil: PMI membaik, ekspor harus terus naik, inflasi rendah mendukung daya beli, investasi harus terus naik, penciptaan lapangan kerja
Sektor moneter: suku bunga mulai turun, likuiditas mulai bertambah Fiskal: tetap ekspansif dan *prudent*, belanja efisien dan berkualitas langsung berdampak pada masyarakat.



Penerimaan Negara mengalami perlambatan a.l. karena moderasi harga-harga komoditas, namun demikian pencapaian akan terus diupayakan optimalisasi melalui berbagai inisiatif strategis dan perbaikan administratif.



Meskipun dilakukan efisiensi anggaran, realisasi Belanja Negara *on track* dan APBN akan terus menjadi instrumen penting dalam menjaga kinerja perekonomian.



APBN terus dioptimalkan dalam mendukung prioritas Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

©2025 Ministry of Finance of the Republic of Indonesia